

EKONOMI SYARIAH



Irwan Misbach

EKONOMI SYARIAH

Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Ekonomi Syariah

Penulis:

Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si

Editor:

Haruddin

Penyelaras Akhir:

Taufiq Mathar

Cetakan I: 2020

x + 259 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-328-290-6

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,

Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>



SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global Covid-19, karya buku *“Ekonomi Syariah”* yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program **Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi**, karya ini dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses *upgrading* kapasitas dan *updating* perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas.

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap



akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori sekaligus *legacy* bagi penulisnya di masa datang. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki *basic core* pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban bangsa.

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. *Āmīn...*

Makassar, 17 Agustus 2020
Rektor UIN Alauddin Makassar,

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullah wabarataktuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt atas berkah rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw yang berkontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan dari dahulu hingga era industri 4.0 saat ini.

Seperti diketahui, pemecahan solusi untuk masalah ekonomi telah menjadi perhatian umum dari semua kelompok masyarakat. Hal ini adalah penyebab dari pemikiran-pemikiran ekonomi. Praktek-praktek ekonomi sudah ada jauh sebelum ada teori pada subjek ekonomi. Anggota masyarakat telah berpikir atas masalah ekonomi tersebut dalam keadaan terisolasi, pada masyarakat tertutup atau bersama-sama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan dan pengembangan ide-ide. Dengan demikian, ekonomi telah mengalami evolusi historis dari berbagai pikiran dan bentuk-bentuk pemikiran ekonomi sebagai pertambahan kumulatif pengetahuan manusia.

Tidak diragukan lagi, peninggalan historis secara umum membawa berbagai kelompok lebih dekat dan menimbulkan saling pengertian dan memperhatikan satu sama lain sehingga menjadi kerjasama dan upaya bersama untuk perbaikan dan kelanjutan dari pemikiran tersebut dan pengkajian di bidang ini. Dengan tujuan ini dalam bentuk suatu pemikiran akan menarik dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan analisis ekonomi Islam. Buku ini juga membahas kontribusi sarjana Muslim yang



memainkan peran penting dalam kelangsungan dan pertumbuhan berbagai ekonomi *mainstream*.

Dalam ajaran Islam, transaksi ekonomi dan keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, bebas dari riba, gharar, risywah, maisyir dan berprinsip kemaslahatan. Beberapa penelitian pun ditemukan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah sistem yang mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi.

Buku ini bertujuan untuk memberikan materi yang dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam literatur tentang sejarah pemikiran ekonomi, sistem ekonomi Islam, deskripsi ekonomi Islam, hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga pendukung ekonomi syariah. Diharapkan bahwa hal ini akan memperkuat semangat integrasi pengetahuan dan pengakuan yang dapat meningkatkan saling pengertian dan kerjasama dalam pembahasan pemikiran ekonomi pada umumnya dan pemikiran ekonomi Islam pada khususnya.

Semoga terbitnya buku ini dapat memberikan kontribusi di bidang Ekonomi Syariah dan menjadi referensi akademisi serta birokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2020
Penulis,

Irwan Misbach



DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHTS).....	1
A. Sumber Hukum Ekonomi Islam (Source of Islamic Economic Law)	1
B. Gerakan Rasionalis di Dunia Islam (The Rationalist Movement in the Islamic World).....	4
C. Gerakan Pencerahan Barat dan Islam (Western and Islamic Enlightenment Movement)	9
D. Pemikiran Ibnu Khaldun (Thought of Ibn Khaldun)...	10
BAB II SISTEM EKONOMI ISLAM (ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM).....	14
A. Konsep Dasar Ekonomi Islam (Basic Concepts of Islamic Economics)	14
B. Pondasi Ekonomi Islam (Basic Islamic Economics)....	16
C. Prinsip Ekonomi Islam (Principles of Islamic Economics)	18
D. Tujuan dan Karakteristik Ekonomi Islam (Objectives and Characteristics of Islamic Economics).....	23
BAB III HUKUM EKONOMI SYARIAH (LAW OF SHARIA ECONOMY).....	30
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (Definition of Sharia Economic Law)	30



B. Kepemilikan dalam Islam (Property Rights in the View of Islam).....	39
C. Sistem Ekonomi Islam (Islamic Economic System).....	40
D. Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dengan Konvensional (The Difference in the System of Islamic Economics with The Conventional Economic System)....	41
BAB IV PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (SHARIA BANKING AND CONVENTIONAL BANKING)	43
A. Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah (Definition of Sharia and Conventional Banks)	43
B. Sejarah Sistem Perbankan Syariah.....	52
C. Urgensi Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah.....	66
D. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah.....	69
E. Sistem Operasional Perbankan Syariah	71
BAB V DASAR HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA (ISLAMIC FUNDAMENTAL BASIS IN INDONESIA)	95
A. Pengertian Perikatan/Akad dalam Islam (Definition of Engagement in Islam)	95
B. Syarat dan Unsur Perikatan dalam Islam (Engagement Elements and Conditions in Islam)	98
C. Prinsip Akad dalam Islam (Principles of Engagement in Islam).....	99
D. Bentuk Akad dalam Islam (Forms of Engagement in Islam).....	101
BAB VI KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (POSITION OF COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAWS)	104
A. Sejarah KHES di Indonesia (KHES History in Indonesia).....	104



B. Kedudukan KHES dalam Hukum Ekonomi di Indonesia (Position of KHES in Economic Law in Indonesia).....	107
C. Perbedaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Gadai dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES (Comparison of the Pawn Code and Compilation of Sharia Economic Law)	109
BAB VII HUKUM INVESTASI SYARIAH (LAW OF SHARIA INVESTMENT)	114
A. Pengertian Investasi Syariah (Definition of Sharia Investment)	114
B. Mengenal Investasi Syariah (Introducing Sharia Investment)	115
C. Pemindaian dengan Indeks Syariah (Scanning Using the Islamic Index).....	117
BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES)	119
A. Kewenangan Peradilan Agama (Authority of the Religious Courts)	119
B. Sengketa Ekonomi Syariah (The Occurrence of Shari'ah Economic Disputes).....	122
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Settlement of Syari'ah Economic Disputes)	123
D. Contoh Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Examples of Settlement of Syari'ah Economic Disputes).....	125
BAB IX TEORI PERILAKU KONSUMSI ISLAMI (THEORY OF ISLAMIC CONSUMPTION BEHAVIOR).....	127
A. Mashlahah dalam Konsumsi (Mashlahah In Consumption)	127
B. Hukum Utilitas dan Mashlahah (Mashlahah In Consumption)	131



C. Keseimbangan Konsumen (Consumer Balance).....	133
D. Model Keseimbangan Konsumsi Islam	139
BAB X PERILAKU PRODUSEN ISLAMIS (ISLAMIC MANUFACTURER BEHAVIOR)	149
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi (Definition and Scope of Production)	149
B. Tujuan Produksi menurut Islam (Production Objectives According to Islam).....	153
C. Motivasi Produsen dalam Berproduksi (Motivation of Producers in Production)	154
D. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam	156
E. Prinsip-Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam.....	166
F. Formulasi Permasalahan Ekonomi	169
G. Formulasi Mashlahah bagi Produsen (Formulation Of Mashlahah for Producers).....	174
BAB XI PERAN DAN MEKANISME PASAR (ROLE AND MARKET MECHANISM)	179
A. Pasar pada Masa Rasulullah (Market at The Time of The Prophet).....	179
B. Pasar bagi Kaum Muslim (Markets for Muslims)	183
C. Mengatur dan Mengawasi Pasar	189
D. Perdagangan Menurut Islam (Trade According to Islam).....	194
E. Keseimbangan Pasar (Equilibrium of Market).....	218
BAB XII KONSEP ASURANSI SYARIAH (CONCEPT OF SHARIA INSURANCE)	221
A. Pengertian Asuransi Syariah (Testing of Sharia Insurance).....	221



B. Asal Muasal Asuransi Syariah (The Origin of Sharia Insurance)	231
C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah (Principles of Sharia Insurance)	233
BAB XIII PERANAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (ROLE OF NATIONAL SHARIA BOARDS).....	238
A. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI (Understanding of the National Sharia Council)	238
B. Dewan Pengawas Syariah/DPS (National Sharia Council)	248
DAFTAR PUSTAKA.....	255





SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM *(HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHTS)*

A. Sumber Hukum Ekonomi Islam (*Source of Islamic Economic Law*)

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis.

Rasulullah bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ

رَسُولِهِ

"Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegangan pada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunah ku (Hadis)."

Di samping itu, para ulama fikih menjadikan ijtihad, sebagai salah satu dasar hukum Islam, setelah Al-Qur'an dan Hadis.

Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan al-Hadis yang memuat Sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam (akidah, syari'ah dan akhlak) dikembangkan dengan rakyu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Mempelajari agama Islam merupakan fardhu 'ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah, sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

Allah telah menetapkan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Ketetapan Allah itu terdapat dalam QS An-Nisa/4:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

... 

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah (kehendak) Allah, taatilah (kehendak) Rasul-Nya, dan (kehendak) ulil amri di antara kamu."

Menurut hadis Mu'az bin Jabal (nama sahabat nabi

yang diutus Rasulullah ke Yaman untuk menjadi Gubernur di sana) sumber ajaran Islam ada tiga, yakni (1) Al-Quran (Kitabullah), (2) As-Sunnah (kini dihimpun dalam al-Hadis) dan (3) Rakyu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Berijtihad adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran, pengetahuan dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran, termasuk ajaran mengenai hukum.

Berikut adalah sumber-sumber hukum Islam :

1. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah swt. turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam QS An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

2. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah

Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.

4. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

B. Gerakan Rasionalis di Dunia Islam (*The Rationalist Movement in the Islamic World*)

Rasionalisme merupakan aliran yang mengungkapkan bahwa alat pengukur dan sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Pengetahuan bersumber dari akal dan hasilnya diukur juga melalui akal. Ilmu yang bersumber dari akal adalah pengetahuan sebagai hasil berpikir logis dan mendalam, sedang ukurannya dibuktikan dengan kelogisannya. Logis berarti benar dan tidak logis berarti salah. Namun demikian, akallah yang membentuk perilaku baik alam semesta,

maupun manusia itu sendiri.

Para cendekiawan Muslim juga tidak menyangkal adanya kemampuan akal (rasionalisme) yang membuktikan kebenaran-kebenaran, termasuk dalam kajian dogmatis. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat perdebatan kemampuan akal untuk digunakan dan dipedomani. Di antara cendekiawan muslim juga mengungkapkan bahwa keberadaan rasio di bawah wahyu, sebagian lainnya menyatakan bahwa penggunaan rasio mampu mengarahkan manusia dalam membimbing dan mengenal Allah swt.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seyogyanya kita memahami juga mengenai konsep dan pandangan rasionalisme sebagai dasar menentukan sesuatu dengan benar dan baik.

Tokoh pertama yang memperkenalkan rasionalisme adalah Rene Descartes (1596-1650) yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Keahliannya dalam bidang ilmu kedokteran, hukum dan ilmu alam. Ia mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan itu wajib bersatu, tidak membandingkan, dan merupakan suatu bangunan yang terpisah dengan cara yang umum disepakati, melalui satu individu yang menyusunnya. Descartes juga menyatakan bahwa akal adalah sumber pengetahuan yang bisa dipercaya karena telah memenuhi kriteria ilmiah yang diinginkan oleh ilmu pengetahuan melalui metode deduktif, sehingga dapat ditemukan sebuah kebenaran ilmiah.

Dalam kajian agama, rasionalisme juga dibutuhkan. Rasionalisme dalam Islam banyak dipengaruhi oleh pikiran dan filsafat Yunani. Munculnya sistem berpikir rasional, menurut Louis Gardet dan Anawati, dipengaruhi oleh

beberapa faktor, di antaranya sistem berpikir rasional dalam kalam (teologi) yaitu kemunculan mazhab-mazhab bahasa yang menginginkan ajaran al-Quran dipelajari dengan baik dan benar. Seperti diketahui, al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab dan terdapat banyak lafaz-lafaz yang tidak mudah untuk dipahami, sehingga dibutuhkan pemikiran yang bersumber dari akal. Faktor lainnya adalah sistem berpikir rasional dalam fikih (yurisprudensi) yaitu kemunculan mazhab-mazhab fikih, yang mencoba memecahkan persoalan-persoalan di bidang hukum dengan menggunakan nalar rasional dalam penggalan hukum (*istinbat*) dengan istilah-istilah seperti istihsan, istislah, qiyas dan lainnya yang telah lazim dipergunakan. Faktor terakhir adalah munculnya penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa arab sejak abad IV Masehi oleh cendikiawan muslim. Proses penerjemahannya dimulai pada masa kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M). Pada masa tersebut, usaha penerjemahan berkaitan dengan persoalan administrasi, laporan dan dokumentasi pemerintahan, kemudian berlanjut dengan ilmu-ilmu pragmatis seperti antropologi, kimia dan kedokteran. Program penerjemahan kemudian berlanjut secara masif karena kebutuhan pada masa itu.

Penggunaan nalar dan akal juga dijelaskan dalam QS Ali-Imran/3:191, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri

atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”

Ayat di atas sangat jelas bahwa setiap manusia diperintahkan untuk selalu menggunakan akalnya dan selalu mengingat Allah swt.

Dalam al-Qur'an, sedikitnya terdapat 49 ayat yang membahas mengenai fungsi dan peran akal, dan sedikitnya terdapat 18 ayat yang menyebutkan tentang pikiran. Lafaz dalam ayat-ayat tersebut menyebutkan: “afala Ta'qiluun”, “afalaa yatafakkaruun”, “afalaa yatadabbaruunal Qur'an”. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpikir, seperti juga yang dijelaskan dalam QS Ar Ra'd/13:3,

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

“Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Di samping itu, terdapat hadis yang juga menganjurkan manusia untuk berpikir, yaitu:

فِكْرُهُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً

“Berfikir sesaat lebih baik dari pada beribadah 60 tahun”.

Hadis ini dicantumkan dalam kitab al-Adzamah dengan sanad: Berkata Abu Syaikh, dari Abdullah bin Muhammad bin Zakariya, dari Utsman Abdillah bin al-Qurasyi, dari Ishaq bin Najih al-Multhi, dari Atha al-Khurasani, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.

Sesungguhnya Islam mengajarkan manusia untuk berpikir, namun demikian, sesungguhnya kemampuan akal memiliki keterbatasan terutama untuk menyelaraskan antara wahyu dan rasio, antara agama dan pemikiran, serta untuk memahami dan menjelaskan al-Qur'an secara rasional. Nabi Muhammad saw, bersabda:

فَكَرْ فِي خَلِيقَةِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرْ فِي اللَّهِ أَبَدًا لِأَنَّ التَّفَكِيرَ فِي الرَّبِّ
(الله) سَيُثِيرُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ

"Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, dan jangan sekali-kali berpikir tentang Allah, sebab memikirkan tentang Ar Rabb (Allah) akan menggoreskan keraguan dalam hati."

Seperti dijelaskan dalam al-Quran, bahwa manusia diperintahkan untuk berpikir mengenai ciptaan Allah beserta makhluk-makhlukNya agar manusia sering mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya, QS Asy-Syura/42:11,

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu

pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

C. Gerakan Pencerahan Barat dan Islam (*Western and Islamic Enlightenment Movement*)

Abad 18 merupakan abad pencerahan (enlightment) dan merupakan istilah yang berkembang di Eropa. Abad ini diistilahkan "al-tanwir" dalam bahasa Arab yang berarti gerakan membebaskan diri dari taqlid dan kekuasaan pemerintah yang mendewakan rasionalisme sebagai filosofis kebebasan akal.

Sebelum abad ini, Peran gereja sangat dominan. Kekuasaannya mampu mengendalikan Eropa pada saat itu. Akal manusia terbelunggu taqlid buta yang diperintahkan oleh gereja. Gerakan pencerahan inilah yang mencoba melepaskan diri dari dogma gereja. Muncullah slogan yang kita kenal yaitu "Tidak ada yang bisa menguasai akal kecuali akal tersebut".

Francis Bacon (1561-1626 M) yang menginisiasi pemikiran ilmu pengetahuan yang tidak boleh dicampuradukkan dengan agama, mulai abad 17. Kemudian berkembang oleh pemikir-pemikir Eropa lainnya, seperti Montesquie, JJ Rousseau dan Voltaire.

Pemikiran Voltaire (1734-1778 M) merupakan yang paling cemerlang pada abad 18, dengan mengkultuskan Akal di atas agama. Dia berkata, "Hidup itu hanya kehidupan jasmani saja. Kehidupan akan sirna dengan sirnanya jasmani.". Voltaire menghapus keyakinan agama dan simbolnya, serta tidak mempercayai adanya pembalasan dan hari kebangkitan, termasuk alam gaib. Paham ini berkembang bersama paham atheis dan kafir di Perancis dan Inggris.

Gerakan pencerahan ini sebenarnya merupakan perlawanan Bangsa Eropa terhadap gereja yang pada saat itu yang cenderung diktator dan menyengsarakan rakyat. Sayangnya berdampak pada pendewaan akal sehingga mengesampingkan agama sebagai sumber keimanan.

Dalam konsep Islam, “al-tanwir” bermakna pencerahan, seperti layaknya cahaya fajar ketika subuh, yaitu al-Quran, Islam dan Rasulullah. Seperti dijelaskan dalam QS al-Taghabun/64:8, yang berbunyi:

فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ... ﴿٨﴾

“Maka berimanlah Kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan cahaya (Al-Qur’an) yang telah Kami turunkan..”

Begitu juga QS al-Baqarah/2:257 yang berbunyi:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ... ﴿٢٥٧﴾

“Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya/Islam ...”

Dan surah al-Maidah/5:15, yang berbunyi:

... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

“Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya (Rasul) dan kitab yang menjelaskan.”

Pencerahan dalam Islam merupakan pencerahan akal melalui pemahaman hukum Allah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sedang pencerahan barat cenderung mendewakan akal dan mengesampingkan ajaran ilahi.

D. Pemikiran Ibnu Khaldun (*Thought of Ibn Khaldun*)

Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang

mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun (lahir 27 Mei 1332/732H, wafat 19 Maret 1406/808H) merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun*, artinya Bapak Ekonomi: Ibnu Khaldun (1962). Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978.



Ibnu Khaldun, nama lengkap: Abu Zayd ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (خلدون بن محمد بن الرحمن عبد الحضرمي) juga dikenal sebagai pendiri ilmu historiografi, ekonomi dan sosiologi. *Muqaddimah* merupakan karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal.

Sebelumnya, dunia barat melakukan kajian-kajian ekonomi cenderung bersifat normatif. Umumnya kajian ekonomi mereka dari perspektif filsafat, moral dan hukum. Kajian ini berasal dari pemikir zaman pertengahan yaitu zaman scholastik dan para ilmuan Yunani yang cenderung bercorak non ilmiah.

Kajian ekonomi Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan

dan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara nyata baik persoalan ekonomi individu maupun persoalan ekonomi sebuah negara. Lebih lanjut, kajian ekonomi Ibnu Khaldun ini lebih rinci dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiq.

Menurutnya, selain membahas tentang ekonomi mikro, yaitu permintaan, penawaran, harga, konsumsi, produksi dan distribusi, juga membahas masalah ekonomi makro seperti alat tukar, pajak, belanja negara, pertumbuhan penduduk, hak milik dan kemaslahatan. Di samping itu juga membahas tentang division of labour termasuk kurva penawaran tenaga kerja dan tata nilai dalam persoalan ekonomi.

Kajian Ibnu Khaldun, juga dijelaskan oleh Boulokia dalam karyanya, "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist". Ia menjelaskan bahwa:

"Beberapa abad sebelum kelahiran teori pembagian kerja Adam Smith dan teori prinsip kerja David Ricardo, Ibnu Khaldun sudah menemukan sejumlah besar pemikiran dan ide ekonomi yang mendasar, yaitu kebutuhan dan keutamaan sistem pembagian kerja dan tata nilai dalam bekerja, bahkan telah menemukan fungsi negara dalam perekonomian sebelum teori John Maynard Keynes dan teroi kependudukan Thomas Robert Malthus. Selain itu, Ibnu Khaldun juga telah menemukan konsep membangun sistem dinamis dalam mekanisme ekonomi sehingga mengarahkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang."

Athur Lafter, penemu teori Laffter Curve, secara jujur mengungkapkan bahwa teori tersebut berasal dari kajian Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberikan solusi dari sebuah resesi ekonomi yaitu melalui peran pemerintah dengan menstimulasi pengeluaran barang dan jasa (ekspor) menjadi

lebih meningkat dan mengurangi beban pajak masyarakat dan industri. Menurutnya, ukuran permintaan dan penawaran di pasar adalah pemerintah, karena negara merupakan ibu dari semua pasar dan juga merupakan pasar terbesar. Jika pasar negara mengalami penurunan, maka secara mikro, permintaan pasar lainpun turut akan turun, dan secara makro akan mempengaruhi lebih luas.

Dijelaskan pula oleh S. Colosia dalam bukunya *Contribution A L' Etude D 'Ibnu Khaldaun Revenue Do Monde Musulman* bahwa: "opini Ibnu khaldun mengenai kehidupan sosial, menjadikan Ibnu Khaldun selaku pionir dalam ilmu filsafat dan memahami tentang pembagian kerja, kepemilikan dan gaji menjadikan Ibnu Khaldun sebagai pionir dalam ilmu ekonomi modern".

Kenyataannya, penjelasan utama Ibnu Khaldun terkait keseimbangan ekonomi di eranya. Khususnya dalam aspek ekonomi yaitu produksi, nilai, distribusi, harga, perpajakan dan beberapa aspek ekonomi lainnya. Jean David Boulkia lebih lanjut mengatakan bahwa "Ibnu Khaldun discovered a great number of fundamental economic".





SISTEM EKONOMI ISLAM (*ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM*)

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam (*Basic Concepts of Islamic Economics*)

Ekonomi secara etimologi berasal dari Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* bermakna rumah tangga dan *nomos* bermakna aturan, sehingga ekonomi ialah aturan rumah tangga. Namun demikian, ekonomi tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara. Sedang ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka.



Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam.

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

- a. Menurut Kursyid Ahmad, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam.
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, yang menjelaskan bahwa usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.
- c. Menurut M. Umer Chapra, yang menjelaskan bahwa pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakseimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang sustainabel dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup
- d. Menurut Muhammad Abdul Manan, yang menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat.
- e. Menurut M. Akram Kan, yang menjelaskan mengenai

pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normatif.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berdasarkan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

B. Pondasi Ekonomi Islam (*Basic Islamic Economics*)

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nilai ini didasarkan pada 3 aspek, yaitu:

1. Akidah

Dalam aspek akidah ini, Ekonomi Islam terbagi dalam beberapa dimensi yaitu:

1) Ekonomi *ilahiyah*

Dimensi ekonomi ilahiyah dalam ekonomi Islam didasarkan pada *tawhid uluhiyyah*, yaitu meng-esa-kan Allah dan menyembah-Nya karena merupakan Zat yang wajib disembah. Dalam praktiknya, semua aktivitas manusia ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, ekonomi mikro maupun ekonomi makro, perlu adanya niat yang tulus, sehingga apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang ditujukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah swt. Dengan demikian, seseorang cenderung melakukan hal-hal baik dan menghindari aktivitas yang mengorbankan kepentingan orang banyak.

2) Ekonomi *Rabbaniyah*

Dimensi ekonomi rabbaniyah dalam ekonomi Islam didasarkan pada *tawhid rububiyah*, yaitu meng-esa-kan Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik alam semesta yang memberikan rezeki, sehingga ketika seseorang telah bersyahadat dan menyembah kepada Allah, maka ia wajib memanfaatkan segala hal yang telah diciptakan-Nya untuk tujuan kemaslahatan bersama umat manusia.

3) Ekonomi *Asma*

Dimensi ekonomi asma dalam ekonomi Islam didasarkan pada *tawhid asma*, yaitu meng-esa-kan Allah swt. dengan pengakuan bahwa semua di dunia ini adalah kepunyaan Allah dan manusia hanya diberikan amanah oleh Allah swt. untuk mengolah dan memanfaatkan milik-Nya dalam rangka kemaslahatan umat manusia. Perlu penghayatan dalam menyejahterakan kehidupan mereka.

2. Aspek Syariah

Aspek syariah dalam ekonomi Islam mensyaratkan bahwa semua kegiatan ekonomi dalam mencapai kemaslahatan diperbolehkan. Kaidah ini diberlakukan bagi seseorang yang menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah Islam, bahwa “segala sesuatu boleh dilakukan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Aspek inilah yang digunakan dalam bermuamalat. Selama unsur kemaslahatannya tercapai dan tidak terdapat larangan di dalamnya, maka semua aktivitas ekonomi dapat dilakukan.

3. Aspek Akhlak

Aspek akhlak dalam ekonomi Islam tidak kalah pentingnya, karena merupakan ruh bagi ekonomi Islam itu sendiri. Aspek inilah yang mengatur tentang tata nilai, etika dan norma yang berasal dari al-Quran dan hadis. Kemaslahatan dapat dicapai jika setiap individu dalam kegiatan ekonominya memperhatikan aspek akhlak ini.

C. Prinsip Ekonomi Islam (*Principles of Islamic Economics*)

Prinsip ekonomi Islam merupakan pondasi sebuah bangunan. Pondasi ini bersifat universal dan merupakan dasar kerangka pembangunan teori ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini, yaitu: prinsip keimanan (tauhid), prinsip keadilan ('adl), prinsip kenabian (nubuwwah), prinsip pemerintahan (khilafah) dan prinsip outcome (ma'ad).

Prinsip-prinsip ini diharapkan memberikan pengaruh pada pengembangan kehidupan ekonomi seseorang. Lebih lanjut, prinsip universal ini menjadikannya sebagai sebuah kajian ilmu ekonomi yang kemudian dibentuklah prinsip derivatif, yaitu:

1. Prinsip keimanan (tauhid)

Prinsip keimanan merupakan dasar utama ajaran Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang bersaksi: "tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah swt. dan tiada pemilik langit, bumi dan isinya, selain Allah swt." Hal ini mengindikasikan bahwa Allah swt. pemilik tunggal segala alam semesta ini beserta isinya, termasuk manusia itu sendiri. Keberadaan manusia hanya sebagai kalifah di muka bumi ini yang diberi amanah untuk memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun

yang diciptakan Allah swt dengan percuma. Pasti ada tujuan yang terkandung di dalamnya, seperti penciptaan manusia yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt., sehingga dengan demikian, semua kegiatan manusia yang terkait dengan alam dan sumber daya lainnya terbingkai dalam kerangka beribadah kepada Allah swt. begitu pula dalam kegiatan ekonomi, tidak ada seorangpun yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai khalifah.

2. Prinsip keadilan ('adl)

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan pada sifat adil Allah swt yang tidak membedakan perlakuan kepada makhluknya. Begitu juga dalam bermuamalat, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, yaitu “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku ekonomi tidak dibenarkan meraup keuntungan sebesar-besarnya, apalagi jika hal tersebut merugikan pihak lain atau bahkan mencederai alam semesta yang merupakan ciptaan Allah swt yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia.

3. Prinsip kenabian (nubuwwah)

Prinsip kenabian yang dimaksud adalah sifat utama kenabian terutama nabiullah Muhammad saw, yang wajib diikuti oleh umatnya, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, di antaranya yaitu:

1) Sifat siddiq

Sifat siddiq adalah bukan hanya perkataan yang jujur, tetapi juga perbuatannya selalu benar. Sifat ini merupakan keharusan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan menjadi visi hidup dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

2) Sifat amanah

Sifat amanah merupakan sifat yang benar-benar bisa dipercaya yang merupakan kredibilitas seseorang dalam memikul tanggung jawabnya. Sifat ini sangat berperan dalam membentuk pondasi muamalat dengan pelaku ekonomi lainnya. Setiap pelaku ekonomi wajib bersikap amanah untuk mengembangkan kehidupan ekonominya.

3) Sifat fathanah

Sifat fathanah merupakan gambaran kecerdasan dan kebijaksanaan seseorang dalam berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Potensi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya dan setiap orang wajib mengoptimalkan potensi ini karena merupakan anugerah tak ternilai yang diberikan oleh manusia yaitu potensi akal pikiran, yaitu dengan memahami dan menghayati secara dalam semua aktivitas ekonominya secara cerdas dan bijaksana dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

4) Sifat tabligh

Sifat tabligh merupakan sifat yang berhubungan dengan keahlian mengkomunikasikan pesan sehingga pelaku ekonomi lainnya yang diajak berbisnis atau berbicara dapat terpengaruh dan yakin pada pesan yang disampaikan. Sifat tabligh menjadikan seseorang piawai dalam memasarkan atau mengkomunikasikan produk atau jasanya sehingga tercapai tujuan bisnisnya. Karena sifat ini adalah dasar ilmu komunikasi, pemasaran, manajemen keterbukaan dan lainnya.

4. Prinsip khilafah

Segala aktivitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi

suatu tujuan, yaitu mencapai kesejahteraan bagi setiap manusia. Seperti diketahui bahwa setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah bagi dirinya sendiri, seperti firman Allah: “dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”.

Hal ini juga dipertegas dengan sabda Rasulullah: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pemimpinnya”. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pelaku ekonomi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. Di samping menjaga keteraturan dalam aktivitas ekonomi, juga menghindari praktik-praktik yang dilarang Allah swt.

Perlu dukungan peran pemerintah dalam stabilitas ekonomi terutama pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak, agar sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari hal-hal munkar, sehingga perekonomian berjalan sesuai syariah, terutama dalam rangka kemaslahatan bersama dunia dan akhirat. Peran pemerintah juga diharapkan mampu melindungi hak individu masyarakat.

5. Prinsip ma'ad

Ma'ad secara harfiah bermakna “kembali” atau sering diartikan sebagai “kebangkitan”, bahwa hidup manusia akan berlanjut dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kehidupan manusia akan kembali ke Penciptanya, yaitu Allah swt. Kehidupan dunia merupakan lahan akhirat bagi manusia. Lahan bagi mereka untuk melakukan kebaikan dan bekerja untuk kebahagiaan akhirat yang diinginkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebahagiaan akhirat tidak terbatas, dibanding kebahagiaan duniawi.

Kelima prinsip ini diharapkan mempengaruhi pengembangan kehidupan ekonomi manusia. Selain itu, juga diderivatif menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam, yaitu:

a. Kepemilikan multijenis (*Multitype Ownership*)

Kepemilikan multijenis ini merupakan gambaran bahwa Allah swt pemilik langit, bumi dan seisinya, sedang manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia hanya pemilik sekunder dan Allah swt adalah pemilik primer. Meskipun kepemilikan manusia hanya sekunder, di bidang ekonomi, swasta, kepemilikannya diakui, tetapi untuk kemaslahatan umat, faktor-faktor produksi tersebut harus dikuasai dan diolah oleh negara.

Karakteristik inilah yang mendasari penguasaan ekonomi dibatasi oleh kepemilikan lainnya, di antaranya kepemilikan individu, perorangan ataupun swasta dan kepemilikan publik atau milik bersama dan yang dikuasai oleh negara.

b. *Freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha)

Dalam ekonomi syariah, kebebasan untuk berusaha setiap individu ataupun kelompok dapat bertindak dalam transaksi ekonomi. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap orang atau kelompok diberi peluang untuk melakukan semua aktivitas ekonomi mereka dan berinovasi dalam usaha mereka.

Konsep *freedom to act* dilahirkan dari konsep keadilan dan konsep khilafah, serta keteladanan sifat nabi Muhammad saw dalam aktivitas ekonominya, yaitu sifat *siddiq*, amanah, *fathonah* dan *tabligh*. Konsep ini kemudian akan melahirkan persaingan pasar sempurna, dimana harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yang merupakan sebuah

keniscayaan dalam ekonomi Islam dalam mekanisme pasar.

Meski demikian, selalu terdapat instrumen yang mengganggu konsep keadilan dalam mekanisme pasar, terutama terkait dengan potensi maisyr, gharar, haram dan riba. Sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam mekanisme pasar untuk menghindari kezaliman yang terjadi diantara dua pihak yang bertransaksi, baik dalam hal permodalan, keuntungan, kerugian dan praktik syirkah lainnya, terutama dalam menjamin aktivitas ekonomi yang tidak melanggar syariat Islam.

c. Social Justice (keadilan sosial)

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia. Hal ini juga mensyaratkan peran pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap jaminan kemaslahatan tersebut. Konsep ma'ad dan khilafah menciptakan konsep keadilan sosial. Konsep inilah yang memberikan aturan bagi individu atau kelompok yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi juga turut memikirkan kemaslahatan bagi pihak lain dalam transaksi ekonomi mereka.

D. Tujuan dan Karakteristik Ekonomi Islam (*Objectives and Characteristics of Islamic Economics*)

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap aktivitas ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberi manfaat, dilarang untuk dilakukan. Kemaslahatan dapat dicapai dengan menghindari semua aktivitas yang merusak (mafsadah) kehidupan manusia

Penggunaan harta ke arah kemaslahatan dapat dilakukan dengan:

1. *Min haytsu al-wujud*

Yaitu dengan mengupayakan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan berkah kemaslahatan, baik dimulai dari pendirian usaha, strategi yang digunakan, pengelolaan usaha, hingga keuntungan yang dihasilkan, semua mengarah kepada kemaslahatan semua pihak.

2. *Min haytsu al-adam*

Yaitu dengan menghindari aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Sumber asasi ekonomi Islam adalah bersumber dari ajaran Islam yang merupakan pondasi teori ekonomi Islam yaitu, akidah, syariah (khususnya muamalah) dan akhlak. Ekonomi Islam memiliki karakteristik, yaitu:

a. Kepemilikan harta hanya sekunder atau titipan semata.

Pemilik tunggal adalah Allah swt. Hal ini sesuai dengan:

1) Segala faktor-faktor produksi yang ada di muka bumi adalah kepunyaan Allah swt, sesuai firman Allah swt QS Al-Baqarah ayat 284.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۴﴾

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah

akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

- 2) Kepemilikan sekunder menggambarkan bahwa manusia hanya sebagai khalifah atas harta miliknya seperti terlihat dalam QS Al-Hadid/57:7,

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

- b. Asas ekonomi Islam tidak terlepas dari ajaran Islam, yaitu akidah, muamalah dan akhlak.

Keterkaitan akidah dalam ekonomi Islam terlihat dengan jelas misalnya penciptaan alam beserta isinya ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt, dan disediakan bagi kemaslahatan umat. Keterkaitan akidah dan muamalah dalam ekonomi Islam memungkinkan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai aktivitas beribadah kepada Allah swt. Keterkaitan akhlak dalam ekonomi Islam, terlihat pada:

- 1) Kepemilikan harta yang tidak digunakan untuk kepentingan kemaslahatan atau merugikan orang lain dilarang oleh Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain."
(HR. Ahmad)

- 2) Aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan maksud penipuan, juga dilarang sebagaimana sabda nabi Muhammad saw, yaitu:

مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita."

- 3) Penimbunan harta kekayaan yang menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam firman Allah swt, QS at Taubah/9:34, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

- 4) Tindakan pemborosan akan merugikan diri sendiri dan berdampak pada kehancuran karena membuat individu sulit untuk berkembang.

c. Keseimbangan antara spritual dan material

Ekonomi Islam menawarkan keseimbangan spritual

dan material. Setiap individu atau kelompok dapat berorientasi kepada materi atau kekayaan, tetapi tidak diperkenankan untuk pelit dan rakus, karena ekonomi Islam juga berorientasi pada nilai ibadah, keadilan dan kemaslahatan. Misalnya, dalam penetapan keuntungan, Islam tidak mengatur takaran maksimalnya dari transaksi ekonomi yang dilakukan, tetapi Islam melarang seseorang untuk memanfaatkan kondisi tersebut dalam mencari keuntungan maksimal sehingga menyebabkan harga menjadi tidak terjangkau.

d. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Keseimbangan yang dimaksud dalam Islam adalah mengutamakan kepentingan individu dalam hal beribadah kepada Allah swt dan mengutamakan kepentingan sosial dalam hal bermuamalah. Kedua hal tersebut bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi sesuatu yang saling melengkapi, termasuk dalam hal hak milik.

e. Perintah konsumsi

Setiap individu muslim diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu, seperti dijelaskan dalam QS al-Araf ayat 31, yang berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Setiap individu muslim juga diperintahkan untuk tidak

bersikap angkuh dan hidup bermegah-megahan, seperti tersurat dalam QS al-Isra ayat 16, yaitu:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

f. Perintah investasi

Investasi adalah komitmen untuk menahan sejumlah harta dengan tujuan mendapatkan hasil di masa akan datang. Dalam banyak kegiatan investasi, terdapat produk dan aktivitas usaha yang tidak sesuai syariah. Investasi menurut al-Quran terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 268, surat an-Nisa ayat 9, surat Yusuf ayat 47-49, surat al-Hasyr ayat 18, dan surat Luqman ayat 34, yang memandang investasi sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa akan datang.

Dalam *al-mawsu'ah al-ilmiah wa al-amaliyah al-Islamiyah* memberikan pedoman dalam berinvestasi, yaitu:

- 1) Proyek haruslah sesuai dengan al-Quran dan hadis atau sesuai ajaran Islam.
- 2) Proyek investasi haruslah berdampak pada rezeki kepada orang lain
- 3) Proyek investasi haruslah dapat memperbaiki kehidupan dan menghilangkan kakafiran.
- 4) Proyek investasi haruslah mampu menumbuhkembangkan

kekayaan dimiliki.

5) Proyek investasi haruslah mampu melindungi kepentingan orang lain.

g. Perintah zakat

Zakat adalah kewajiban material dan merupakan pondasi dalam ekonomi Islam karena merupakan sumber jaminan sosial. Zakat merupakan potensi dalam kesejahteraan masyarakat dan solusi alternatif sumber devisa negara.

h. Larangan riba

Larangan riba merupakan penghapusan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Larangan ini ditujukan untuk melindungi kemaslahatan baik dari aspek akhlak, masyarakat maupun perekonomian negara, karena riba akan meningkatkan harga barang normal menjadi sangat mahal, dan akan mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara, yang kemudian menyebabkan tingginya tingkat inflasi, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat terutama tingkat kehidupannya.



HUKUM EKONOMI SYARIAH (*LAW OF SHARIA ECONOMY*)

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (*Definition of Sharia Economic Law*)

Hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari hukum Islam. Selain itu, sumber hukumnya bersumber dari beberapa kitab fikih dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa “ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. Kegiatan usaha



yang dimaksud adalah: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Kegiatan-kegiatan ekonomi syariah di atas memiliki tujuan yang dalam sistem ekonomi, yaitu:

1. Kemasalahatan ekonomi sebagai dasar pemikiran yang tercantum dalam QS al-Baqarah/2 ayat 2 dan 168,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,"

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

QS Al-Maidah ayat 87-88,

يَأْيُهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, dan pernikahan yang diharamkan bagi kalian. Janganlah kalian mengharamkannya dengan niat bersikap

zuhud atau beribadah. Dan janganlah kalian melanggar larangan-larangan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar larangan-larangan-Nya, bahkan Dia membenci mereka. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

QS Al-Jumu'ah ayat 10,

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

2. Terciptanya tata sosial yang berkeadilan seperti terlihat dalam QS al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

QS al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

QS Asy-syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;"

3. Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, yang tercermin dalam QS al-An'am ayat 165, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

QS An-Nahl ayat 71,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

(٧١)

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

QS Az-Zukhruf ayat 32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

4. Kesejahteraan sosial melalui kebebasan Individu, yang tersurat dalam QS ar-Ra'd ayat 36, yaitu:

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٦﴾

“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.”

QS Lukman ayat 22,

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.”

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Tujuan Ekonomi Islam menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali (Kompasiana, 13 Mei 2018) menggunakan pendekatan yaitu; “a) Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. b) Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam. c) Dalam mengatur distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan. d) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana

distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.”

Di samping itu, terdapat beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli, di antaranya:

- 1) S. M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”
- 2) Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak akses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik”
- 3) M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”
- 4) M. N. Siddiqi, “ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”
- 5) Khursid Ahmad, “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”
- 6) M. A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”

Hukum ekonomi syariah mengidentifikasi 5 nilai dalam perkembangannya, yaitu:

- a. Nilai Ilahiah/Ketuhanan
- b. Nilai Khilafah/Kepemimpinan
- c. Nilai Tawazun/Keseimbangan
- d. Nilai ‘Adalah/Keadilan
- e. Nilai Maslahah/Kesejahteraan

Selain itu, dalam perkembangannya, ekonomi syariah

memiliki 2 pendekatan yaitu normatif dan rasional obyektif. Pendekatan normatif berbicara tentang tingkat keimanan seseorang. Pendekatan ini disebut juga pendekatan emosional, karena bersumber dari wahyu Allah swt yang merupakan indoktrinatif tanpa adanya keraguan dan tidak memerlukan intepretasi dan rasional pemahaman terkait hal tersebut. pendekatan kedua adalah pendekatan rasional obyektif yang cenderung bersifat ilmiah dan empiris.

Prinsip dan dasar ekonomi syariah tercermin dalam QS al-Mutahffifin ayat 1-3, yaitu :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang berbuat curang dalam transaksi ekonominya, baik dalam menjual ataupun membeli produk atau jasa.

Mokh. Saiful Bakhri mengutip Didin Hafiuddin mengungkapkan bahwa segala jenis transaksi ekonomi wajib senantiasa dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah swt. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah swt senantiasa mengawasi aktivitas ekonomi setiap ciptaan-Nya.

Prinsip nilai ketuhanan teraktualisasi dalam aktivitas ekonomi dan indikasi negatifnya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nilai ketuhanan dalam aktivitas ekonomi

Nilai	Aktualisasi	Indikasi negatif
Ilahiah/ Ketuhanan	Akidah, Ibadah, Syariah, Pemilik Mutlak. Tazkiyah (halal-tayyib).	Atheisme, sekularisme, komunisme, eigendom (hak milik mutlak manusia)

Sedangkan beberapa prinsip ekonomi syariah yang merupakan penyangga bangunan ekonomi syariah, di antaranya:

a. Kesiapan menghadapi risiko

Seperti diketahui, tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia dan akhirat, termasuk kegiatan ekonomi luput dari syariat Islam. Allah swt sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melakukan perencanaan di masa depan. Hal ini terlihat dalam surat al-Hasyr ayat 18 dan surat Lukman ayat 34 yang merupakan dasar intropeksi diri dan sepatutnya memerhatikan setiap risiko aktivitas yang dilakukannya, karena setiap kegiatan mengandung risiko untuk gagal ataupun berhasil. Ada kalanya, seseorang mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, dan ada kalanya seseorang berada dalam kesulitan. Bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti apa yang diusahakannya besok.

b. Tidak Menumpukkan Kekayaan

Ekonomi Islam tidak mengizinkan seseorang melakukan penimbunan harta. Penimbunan akan berdampak pada distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan seseorang untuk membagikan sebagian harta kekayaannya



untuk membantu saudaranya yang kekurangan. Selain itu, Penimbunan barang di pasar akan menyebabkan kekurangan komoditas dalam pasar dan menyebabkan kenaikan harga karena kelangkaan. Dan hal ini merupakan perilaku ekonomi yang mengandung kezaliman, karena menyebabkan ketersediaan jumlah barang dan permintaan barang tersebut menjadi berfluktuasi.

c. Larangan monopoli

Ekonomi Islam melarang suatu keadaan bisnis, yang hanya dikuasai oleh individu atau kelompok sehingga tidak memiliki kompetitor lain. Monopoli ini dapat mengambil keuntungan maksimal karena tekanan pasar dan hukumnya haram.

d. Larangan bunga

Semua aktivitas ekonomi yang mempersyaratkan bunga sebagai kompensasi atau imbalan termasuk riba. Karena pada hakikatnya akan memberatkan pihak lainnya terutama peminjam.

B. Kepemilikan dalam Islam (*Property Rights in the View of Islam*)

a. Pengertian kepemilikan

Kepemilikan atau hak milik merupakan kekhususan yang dimiliki seseorang terhadap suatu harta dan menghalangi orang lain dari harta tersebut. Kata *menghalangi* menjelaskan bahwa terdapat hal yang mencegah seseorang untuk memanfaatkan atau menggunakan tanpa seizin dari pemiliknya.

Secara etimologi, kepemilikan adalah suatu kekuatan yang didasarkan syariat untuk menggunakannya atau

memanfaatkan obyek tertentu atau harta yang dimiliki, tanpa ada yang melarang. Pada perkembangannya, hak milik dikhususkan untuk pemanfaatan umat muslim. Artinya secara hukum terkandung bahwa kegunaan suatu barang menuntut adanya kesempatan memanfaatkan dan menggunakannya melalui penguasaan sumber daya atau kekayaan yang ditujukan untuk pelayanan sosial.

b. Sifat hak milik

Islam mengungkapkan bahwa kepemilikan segala sesuatu adalah milik Allah swt. Manusia diberi kewenangan secara individu untuk memiliki, dan menikmati kekayaannya tetapi diberi batasan berdasarkan syariat Islam. Ini bermakna kepemilikan individu tidaklah bersifat absolut. Karena pada hakekatnya seseorang merupakan perwakilan dari masyarakat dan harta kekayaan bukanlah milik pribadi atau sekelompok orang saja.

C. Sistem Ekonomi Islam (*Islamic Economic System*)

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pemerintah dalam mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang/jasa yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan yang didasarkan ajaran Islam.

Ajaran-ajaran Islam yang merupakan sumber sistem ekonomi Islam adalah al-Quran dan hadis. Di samping itu juga, aturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh pemikiran manusia dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Segala aktivitas ekonomi yang diperbuat manusia haruslah sesuai dengan ketentuan Allah swt.

Muhammad Syafi'i Antonio pernah menggambarkan pluralisme dalam sistem ekonomi dengan mengemukakan bahwa:

“Di satu pihak, kita mendapati para ekonom, bankir, dan wirausahawan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi ‘lupa’ membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariat terlebih fikih muamalah secara mendalam. Di lain pihak, kita menemukan para kiai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fikih ulumul qur’an dan disiplin lainnya, tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejala bisnis di sekitarnya. Akibatnya, ada semacam tendensi ‘biarlah kamu mengatur urusan akhirat dan mereka urusan dunia’. Padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat”.

D. Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dengan Konvensional (*The Difference in the System of Islamic Economics with The Conventional Economic System*)

Etzioni dan Mydal menjelaskan bahwa ekonomi merupakan disiplin ilmu yang bebas nilai. Nilai yang bersifat agamis merupakan nilai yang tidak memiliki relasi dan terpisah dengan ekonomi. Pendewaan rasionalitas (power of rationality) pada ekonomi konvensional menghilangkan aspek subyektivitas seperti nilai moral dan etika yang cenderung bersifat agamis.

Hal ini menyebabkan praktik ekonomi cenderung apa adanya (as it is). Namun praktik ekonomi ini memiliki kemampuan menjelaskan dan meramalkan sehingga dikenal dengan *mainstream* ekonomi (ekonomi positivistik).

Menurut Triyuwono bahwa hukum universal dari ilmu ekonomi dapat terpenuhi jika proses formulasi teorinya jauh dari intervensi kepentingan yang cenderung subyektif, jauh

dari nilai budaya, sosial, politik, bahkan agama.

Featherstone mengungkapkan bahwa *mainstream* ekonomi berpotensi kuat menghapuskan nilai-nilai lokal (local wisdom) yang membudaya di masyarakat. Bahkan penerapan hukum universal ini dapat menciptakan peradaban fragmatis, konsumtif, hedonisme, penyakit peradaban dan modernisasi kemiskinan.

Ibrahim mengungkapkan bahwa universal hukum ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara agniya/the have dan fuqara/the have not, keberpihakan pada kelompok elit yang merupakan spirit profit oriented atau capital oriented yang mampu menghilangkan nilai-nilai lain yang bersifat immaterial. Hal inilah yang menyebabkan ekonomi mengabaikan aspek spritual dan hanya mengandalkan rasionalitas.



PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (*SHARIA BANKING AND CONVENTIONAL BANKING*)

A. Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah (*Definition of Sharia and Conventional Banks*)

Istilah *bank* telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Palang Merah punya 'bank darah', di lingkungan kesehatan ada 'bank sperma', lembaga penelitian punya 'bank data', dan orang atau lembaga yang mengalami keruntuhan keuangan disebut *bankrupt*. Tentu saja yang akan dibahas dalam buku ini bukan bank-bank semacam itu, melainkan bank dalam arti



suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial.

Kata *bank* dapat ditelusuri berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti-bank berarti portofolio aktiva yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank 'darah kehidupan' bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak (Arifin, 2006).

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu 'penukaran uang' atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu 'membayar barang dan jasa'. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti *counter* di pasar swalayan atau *counter* di restoran siap saji (*fast food*).

Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*self keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional dapat didefinisikan juga seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana menganggur (*idle money*).

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang syariat, minuman keras misalnya.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariat dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami adalah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- c. Memberikan zakat (Ibrahim dalam Arifin, 2006).

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam tersebut merencanakan dan menetapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu Dewan Syariah berfungsi memberikan advis kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

- a. Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal
- b. Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat
- c. Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya.

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal (Ismail, 2011).

Jika yang dimaksud dengan 'bank' adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual-beli), *dayn* (hutang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga ini pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqih disebut *syakhsyiyah al i'tibariyah* atau *syakhsyiyah al ma'nawiyah* (Arifin, 2002).

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika misalnya

sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional dan mampu melakukan tugas-tugas *teamwork*.

Selain itu, cara perpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Mengenai akhlak, al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya terdapat pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah (QS. 2:282-283). Demikian pula konsep *trust (amanah)* (QS. 2:283) dan keadilan (di antaranya QS. 4:4, 128, 135, dan QS. 5:8). Untuk menjaga stabilitas lembaga tersebut, al-Qur'an mengajarkan tindakan tegas (*amar ma'ruf nahi mungkar*) (QS. 3:110) dan teguran (*tawsiyah* untuk menegakkan kebenaran dan berlaku kesabaran) (QS. Al 'Ashr).

Walaupun bank-bank Islam modern baru mulai didirikan pada 1960-an, sebenarnya aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad Saw sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *Al Amin*, yang artinya orang yang terpercaya. Karena kejujuran itulah nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*deposit*) orang ramai. Begitu amanahnya beliau dalam menjaga deposit tersebut, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya (Hamoud, 1985).



Tindakan Rasulullah tersebut ternyata dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dicontohkan oleh sahabat beliau, Zubair bin Awwam, yang tidak pernah mau menerima uang dari semua orang dalam bentuk deposit (simpanan/titipan). Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa bila ada orang datang membawa uang untuk disimpan pada ayahnya, maka ayahnya takut jika deposit uang itu akan hilang. Tindakan Zubair ini menunjukkan dua hal yang dapat ditarik hikmahnya. Pertama, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk menggunakannya; kedua, jika uang itu dalam bentuk pinjaman maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula (Haron, 1996).

Dengan demikian, ada dua macam praktek simpanan (deposit) yang diterapkan pada masa awal Islam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan jenis simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi konsep pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwam (Arifin, 2002).

Aktivitas perniagaan yang menggunakan cara *mudharabah* dan *musyarakah* juga telah dikenal sejak masa awal Islam. Sebagaimana juga berkembang aktivitas pengiriman uang (misalnya kisah Ibnu Abbas mengirim uang ke Al Kuffah; lalu kisah Abdullah bin Zubair mengirim uang dari Makkah kepada adiknya Misab bin Zubair di Irak), dan aktivitas penggunaan cek (misalnya kisah Umar bin



Khatab r.a. ketika mengimpor sejumlah besar barang dari mesir ke madinah, dimana untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah, Kahlifah mengeluarkan cek untuk penduduk madinah; dan juga kisah Saif Dawala al Hamadani, *Amir* di Aleppo, yang menggunakan cek untuk membayar minuman di kedai Bani Khaqan tanpa mereka sadar bahwa ia adalah seorang *amir* (Haron, 1996), sebagai bentuk mekanisme pembayaran dari suatu perdagangan.

Sebagaimana pembentukan bank konvensional pertama yang beroperasi di Venesia yaitu Banco della Pizze di Rialto (1587) dianggap sebagai titik awal berkembangnya perbankan modern, walaupun pada prakteknya telah dilaksanakan sejak 900 tahun sebelumnya, maka pendirian sebuah *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi Sungai Nil, Mesir, pada tahun 1960-an oleh Dr. Abdul hamid An Naggat, telah menjadi tonggak berdirinya lembaga perbankan Islam modern pertama, bahkan lembaga keuangan Islam modern yang pertama di dunia. Meski beberapa tahun kemudian ditutup karena masalah manajemen, bank lokal ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara.

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank Islam semata-mat bersifat

komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan 15% per tahun. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka '*Islamic Windows*' di dalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk bank Islam, antara lain di Malaysia, '*the Islamic transaction*' di cabang-cabang bank Mesir, dan '*the Islamic Services*' di cabang-cabang Bank perdagangan Nasional Arab Saudi (Hamoud, 1985).

Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di Bahrain, yang merupakan *wholly-owned subsidiary* dari Citicorp. Chase Manhattan Bank telah mengembangkan produk Chase Manhattan Leasing Liquidity Program (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi *overnite* dan *short term* lain yang halal. Produk-produk konvensional seperti The Wellington Management Company (Amerika Serikat), Oasis International Equity Funds dari Flamings Bank (Inggris), State Street Investment Management (AS), dan Kleintworth Benson Bank (Inggris) (Arifin, 2002).

Perusahaan-perusahaan besar yang berminat menggunakan jasa bank Islam juga semakin banyak. Xerox, General Motor, IBM, General Electric, dan Chrysler adalah sebagian dari perusahaan *blue chip* di Amerika yang semakin banyak menggunakan *ijarah* (*Islamic Lease Finance*), The United Bank of Kuwait pada tahun 1994 lalu melaporkan pertumbuhan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk produk *ijarah* di Amerika Serikat.

Bahkan dari segi pengembangan teori Bank Islam, Universitas Harvard telah mendirikan program khusus The Harvard University Center for Middle Eastern Studies, yang disponsori oleh The Islamic Company of Gulf (Bahrain)

Investment Bankers (Cabang Dar al-maal al Islami Trust).

B. Sejarah Sistem Perbankan Syariah

Menurut Abdullah Seed, sejak awal kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis (Syafi'i, 2001:108). Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah.

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman rasulullah. Praktik-praktik seperti menitipkan harta, meminjamkan harta untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman rasulullah saw. Dengan demikian. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah saw, Zubair bin Awwam r.a., memilih tidak menerima harta titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkan, kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini,, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqoh, telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum anshor.

Rasulullah saw pun menjalankan praktisi itu sebelumnya, yaitu ketika ia bertindak sebagai mudharib (pengelola investasi) untuk Khadijah. Dan Khalifah Umar bin al-Khattab menginvestasikan uang anak yatim kepada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan bisnis berdasarkan sistem bagi hasil sederhana semacam ini terus dipraktekan selama berabad-abad tanpa perlu perubahan bentuk sama sekali.



Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Di zaman Rasulullah saw. fungsi-fungsi utama perbankan dilakukan oleh perorangnya dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal itu diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam yang mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *saraf*, dan *jihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*money changer*).

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai bank. Ketika bangsa Eropa melakukan praktik perbankan, mulai timbul masalah karena transaksi yang menggunakan konsep bunga yang dalam ilmu fiqh disebut dengan *riba*, dan haram hukumnya.

Transaksi bunga ini merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 memperbolehkan instrumen ini meskipun tetap mengharuskan asalkan tidak boleh berlipat ganda. Ketika wafat dan digantikan oleh Edward VI yang membatalkan konsep ini, dan tidak berlangsung lama. Ketika dia wafat dan digantikan Elizabeth I, konsep bunga kembali diperbolehkan untuk dipergunakan.

Pada masa kebangkitannya dan mengalami Renaissance, bangsa Eropa melakukan penjajahan dan perluasan ke seluruh dunia sehingga sebagian besar aktivitas didominasi oleh bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan jatuh satu-persatu ke dalam cengkeraman Eropa. Akibatnya, institusi perekonomian Islam mulai runtuh dan digantikan oleh institusi perekonomian bangsa Eropa dan berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan di negara-negara yang mayoritasnya muslim adalah warisan dari bangsa Eropa yang menggunakan konsep bunga (*interest*).

Oleh karena bunga dalam Islam tidak diperbolehkan dan haram, maka di sejumlah Negara Islam mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Hal ini terjadi setelah negara-negara muslim mendapatkan kemerdekaannya dari bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank non bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940an, tetapi usaha tersebut tidak sukses. Eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.



Upaya awal penerapan sistem profit dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jama'ah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Syafi'i, 2001:18). Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Baru pada 1963 perbankan syari'ah pertama didirikan di Mesir dengan nama Mit Ghamr Local Saving Bank yang menerapkan sistem bagi hasil, pada awalnya berdirinya bank ini disambut hangat oleh pelaku ekonomi di Mesir, namun sayang pada tahun 1967 terjadi kekacauan politik yang mengakibatkan Mit Ghamr diambil alih oleh Bank of Egypt yang beroperasi menggunakan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr nampaknya menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga pada tahun 1975 terbentuklah IDB (Islamic Development Bank) yang diprakarsai oleh Organisasi Konferensi Islam (organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969). Bank ini bertujuan untuk menyediakan bantuan finansial (keuangan) bagi negara-negara anggota dan membantu pendirian bank-bank syari'ah di negara masing-masing.

Kini perbankan syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak



negara, bahkan ke negara-negara barat, adalah The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di dataran Eropa pada tahun 1983 bahkan kini bank-bank kelas dunia sebut saja HSBC, Citibank dan banyak lainnya mulai membuka windows Syariah.

Upaya Insentif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Bait al Maal wat Tamwil* (BMT) atau *Bait al Qiradh* menurut masyarakat Aceh.

Setelah dua tahun beroperasi Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya lembaga reksadana Syariah oleh PT Danareksa.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank tersebut yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan badan pelaksanaan harian pengembangan sumber daya, perintis Baitul Maal nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan sumber daya manusia. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan keleluasaan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mengambil prakarsa mempersiapkan sistem dan produk perbankan bebas bunga dan menghimpun dana *waqaf*, *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan kepada umat Islam diserukan agar mengembangkan sikap dan perilaku hemat dan gemar menabung, menggairahkan persoalan *zakat*, *infaq*, dan *sedeqah* mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan masjid untuk beribadah dan meningkatkan kualitas hidup umat, serta mengembangkan kesadaran Ukhuwah Islamiah



dalam tukar menukar informasi dan peningkatan kerja sama proyek-proyek konkret *amalan shalihah*, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan *da'wah bil hal*.

Dalam keputusan lokakarya tersebut juga terdapat pengakuan adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu hukumnya haram, sedangkan pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal. Meski diakui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut adalah *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, namun dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan untuk ditempuh, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional, dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*). Oleh karena itu maka usaha pengembangan perbankan yang sistem operasinya tidak mengenakan bunga (*interest free banking system*) lebih ditujukan kepada pemantapan pengaliran dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan.

Dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan

Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Saat ini, potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional. Rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 37%, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 32% dan pembiayaan tumbuh 40%. *Market share* pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya 5,24%.

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp179 triliun (4,4 % dari aset perbankan nasional), sementara DPK sebesar Rp137 triliun. Yang luar biasa adalah total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp139 triliun, melebihi jumlah DPK, Ini berarti FDR perbankan syariah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian sangat besar dewasa ini.

Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012

menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.

Menurut data Bank Indonesia, kini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.574 di tahun 2012, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%. (Data diperoleh pada 17 Desember 2012).

Berdasarkan hasil riset tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh **MARS Indonesia** pada akhir tahun 2011, terungkap bahwa jumlah populasi di 5 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan) yang memiliki rekening di bank syariah baru sebesar 3,3% (setara dengan 621.110 populasi). Jumlah tersebut berasal dari 4,7% (setara dengan 450.213) populasi di Jakarta, 0,9% (setara 20.159) populasi Bandung, 1,1% (setara 33.728) populasi di Surabaya, 3,0% (setara 45.008) populasi di Semarang, dan 3,4% (setara 72.002) populasi di Medan.

Dibandingkan dengan hasil studi bank syariah tahun 2008, saat ini terjadi kenaikan kepemilikan rekening di bank syariah sekitar 1,3%, dari sebelumnya yang hanya 2,0%. Berdasarkan data-data tersebut, potensi pasar perbankan syariah masih sangat terbuka, hal ini tercermin dari jumlah populasi yang belum memiliki rekening di bank yang mencapai 96,7%.

Berdasarkan data populasi dari BPS yang diolah kembali oleh MARS, per akhir tahun 2011 penduduk kota Jakarta berjumlah 9.578.999 jiwa, Bandung 2.239.886 jiwa, Surabaya 3.066.161 jiwa, Semarang 1.500.268 jiwa dan Medan 2.117.693 jiwa.

Berdasarkan riset tersebut, persentase terbesar nasabah perbankan syariah ada pada kelompok usia tua (35-55 tahun), yaitu mencapai 50,8%. Berikutnya ada pada kelompok usia dewasa (25-34 tahun) sebesar 37,6%, dan pada kelompok usia muda (18-24 tahun) hanya 11,6%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, nasabah bank syariah paling besar ada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah, yaitu mencapai 51,9%. Berikutnya adalah nasabah yang berpendidikan sarjana (32,9%), dan terendah berpendidikan diploma (15,1%)

Atas kinerja tersebut, perbankan syariah Indonesia, menurut Bank Indonesia, kini berada di posisi empat dunia, atau di bawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan Bahrain dan Uni Emirat Arab (Kristiyono & Afandi, 2013)

Terlepas dari perkembangan yang cukup menggembirakan, dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Ini terlihat pertumbuhan jumlah jaringan kantor bank konvensional dan bank syariah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Jumlah Jaringan Kantor Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank	Jumlah Jaringan Kantor				
		Des 2014	Des 2015	Des 2016	Des 2017	Des 2018
1.	Konvensional	30.532	31.169	30.999	30.607	29.927
2.	Syariah	1.946	1.780	1.731	1.678	1.691

Sumber: Badan Pusat Statistik: Statistik Indonesia 2019.



Jumlah jaringan kantor bank konvensional lebih banyak dari bank syariah, hingga mencapai 94,65% pada tahun 2018 dan hanya 5,35% jaringan kantor bank syariah. Namun demikian, jumlah jaringan kantor akhir tahun 2018 pada bank konvensional mengalami penurunan sebesar 680 jumlah kantor bank konvensional, dan di satu sisi, jumlah jaringan kantor bank syariah mengalami peningkatan sebesar 13 kantor.

Perkembangan perbankan syariah masih cukup lambat bila melihat rentang waktu sejak bank syariah (Bank Muamalat) berdiri. Bahkan, target pangsa pasar 5 persen sampai akhir 2008 yang telah dicanangkan Bank Indonesia terancam gagal (Kuncoro, 2008). Karena itu, tema utama yang selalu menjadi perbincangan hangat bagi pelaku perbankan syariah adalah bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Saat ini kontribusi pasar perbankan syariah baru sekitar 2% dari total perbankan nasional (Ponggawa et al, 2009).

Sebagian besar nasabah yang dirangkul perbankan syariah ditengarai berasal dari kaum syariah loyalis atau mereka yang masih meyakini hukum bunga bank adalah riba dan haram. Hafasnuddin (2007 dalam Arwani, 2009) mengemukakan bahwa hanya 33,75% nasabah bank syariah yang mempunyai loyalitas sesungguhnya (*true loyalty*).

Riset yang dilakukan Karim Business Consulting (KBC) mulai awal tahun 2004 melalui wawancara dengan jajaran direksi 21 bank nasional, menunjukkan potensi dana nasabah loyalis diperkirakan sebesar Rp 10 triliun yang sudah habis tergarap terutama oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Lembaga ini membagi tiga golongan nasabah yang kemungkinan bisa menopang penghimpunan

dana masyarakat bagi industri perbankan. Selain loyalis, ada pula floating market (pasar mengambang) dan konvensional loyalis. Potensi yang dimiliki oleh floating market ini diperkirakan sebesar Rp 720 triliun, sementara potensi dari kaum loyalis konvensional dan tidak mau berpindah menjadi nasabah bank syariah hanya sebesar Rp 240 triliun. Adiwarman Karim, Presiden Direktur KBC menyebutkan potensi floating market hingga kini belum tergarap secara maksimal oleh perbankan syariah. Bila dipecah-pecah, pasar floating terdiri dari nasabah individual maupun korporasi yang menginginkan layanan perbankan biasa serta nasabah kakap yang tentunya membutuhkan layanan lebih bersifat privasi (Harian Sinar Harapan, 4 Juni 2007).

Menurut ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, fatwa haram bunga bank oleh Muhammadiyah tidak akan berpengaruh sama sekali. Menurutnya, masyarakat sudah sejak dulu mengetahui bahwa bunga bank itu haram, tapi tetap saja mereka memilih menabung di bank non syariah dan sudah terbiasa dengan sistem ekonomi barat, sehingga bank syariah sulit menggantikan posisi bank konvensional. Bank syariah adalah komplemen untuk orang-orang alim yang benar-benar tidak mau mendapat bunga (Koran Tempo, 6 April 2010).

Faktor agama pada awalnya memang sangat efektif untuk menarik nasabah memasuki “pintu gerbang” bank syariah. Namun, apabila bank syariah tidak memiliki kemampuan memenuhi preferensi dan harapan nasabah, maka mereka akan mencari dan mendapatkannya dari pesaing (Fatmah, 2007). Lebih lanjut, Wardani (2008) menguji potensi dan preferensi masyarakat terhadap bank

syariah di kota Medan, dan menemukan bahwa preferensi masyarakat tentang perbankan syariah memberikan keuntungan relatif atau memiliki nilai dibanding bank konvensional karena penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankannya.

Sayangnya, meskipun bank syariah memiliki beberapa keunggulan, sampai saat ini masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam Perbankan Syariah sebagai wujud bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat pada masyarakat (Rhanu, 2010).

MARS Indonesia (2008) dalam Studi Pasar dan Perilaku Nasabah Bank Syariah menemukan bahwa hanya 12,5% pelayanan Bank Umum Syariah dalam memuaskan nasabah. Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut masalah kualitas layanan, antrian yang tidak teratur, sedikitnya jumlah counter kasir yang melayani nasabah, ruangan pelayanan dan tempat tunggu yang sempit, belum tersedianya telepon khusus yang bisa menangani keluhan para nasabah, serta sulitnya mendapatkan informasi dan komplain terhadap fasilitas produk yang ditawarkan (Kastawindiyanti, 2007).

Di satu sisi, Rivai et al (2007) dalam penelitiannya dalam Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan adalah bahwa konsumen yang memilih bank syariah, selain sangat dipengaruhi oleh faktor keyakinan bahwa bunga bank bertentangan dengan agama, juga keramahan petugas dan persepsi bahwa berurusan dengan bank syariah lebih cepat dan mudah. Lebih lanjut, Fatmah (2007) menemukan bahwa persepsi religius berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan,

komitmen dan loyalitas nasabah terhadap bank umum syariah di Jawa Timur.

Setelah menelusuri sejarah hingga perkembangan bank syariah dan praktiknya oleh umat muslim, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek – praktek perbankan sudah dilakukan oleh umat muslim sehingga berkembang sampai saat ini. Walaupun pernah mengalami pengalaman buruk ketika bangsa eropa menjajah negara – negara muslim sehingga praktek ekonomi islam terhambat. Tetapi, ekonomi islam telah membuktikan bahwa mereka bisa bangkit kembali dan berkembang hingga sampai saat ini karena menggunakan konsep – konsep kerjasama yang menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, juga tentunya diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, praktik perbankan bukanlah hal yang asing lagi bagi umat muslim. Sehingga proses penggalan hukum untuk merumuskan konsep perbankan modern yang berbasis syariah tidak dimulai dari nol. Dan tentunya diperlukan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang atau semua pihak yang mampu secara materi dan legalitas untuk mendirikan bank-bank berbasis syariah di seluruh pelosok negeri.

C. Urgensi Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah

Jika melihat dari awal pendirian Bank Syariah di Indonesia, secara nasional perkembangan ekonomi Islam diwarnai oleh perkembangan pemikiran ekonomi syariah dunia dan pemikiran tentang perbankan syariah, pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya 3 BPRS di Bandung

pada tahun 1991. Selain itu juga berdiri PT BPRS Hareukat di NAD. Prakarsa pendirian bank syariah di Indonesia oleh MUI melalui lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas mendalam dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas IV MUI dibentuk tim kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sehingga PT BMI berdiri tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Diantara manfaat dari pendirian Bank Syariah adalah sebagai pelengkap keberadaan Bank Konvensional, bank syariah digunakan sebagai alternatif transaksi perbankan konvensional, yang kedua adalah sebagai pengakomodasi kelompok masyarakat yang antipasti terhadap dunia perbankan konvensional, dan yang terakhir sebagai salah satu upaya peningkatan mobilisasi dana masyarakat.

Perkembangan masyarakat tampaknya mengarah kepada asalnya "*back to nature*". Lembaga bisnis syariah ternyata telah mulai menjadi perhatian para ahli ekonomi, bukan hanya dari pihak muslim tetapi juga non muslim. Seiring dengan meningkatnya rasa keberagamaan (*religiusitas*) masyarakat Muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, semakin banyak pula institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah.

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai. Bisnis secara syariah ditujukan untuk

memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Lembaga keuangan syariah harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

- a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi;
- b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal;
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya;
- d. Larangan menjalankan monopoli;
- e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama dan harus di hindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah,

- a. Menjauhkan diri dari unsur Riba, caranya:
 - 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Lukman: 34)
 - 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/ simpanan

tersebut hanya karena berjalannya waktu, terdapat dalam QS al-Imran: 130.

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada QS Al-Baqarah ayat 275.

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam di atas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dengan bank non Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

D. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Dari hasil musyawarah (Ijma' Internasional) para ahli ekonomi *mudlim* beserta para ahli fiqih dari akademi fiqh di Mekah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Bank konvensional sudah eksis di bumi Indonesia sejak berdirinya *De Javasche Bank* tahun 1872. Munculnya lembaga keuangan syariah seolah-olah merupakan kehadiran *makhluk asing* yang secara operasinya sulit diterima akal mereka.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang

terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non-syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee/jasa.

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu dalam perbankan syariah ada prinsip-prinsip yang dianut dalam mengusahakan kegiatannya. Ada beberapa prinsip utama operasional bank Islam, yaitu:

a. Prinsip al-Ta'awun

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan. Firman Allah Swt, yang artinya: *"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..."*, (QS Al-Ma'idah ayat 2).

b. Prinsip menghindar al-Ikhtinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana firman Allah Swt:, yang artinya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa ayat 29)

c. Memonopoli

Menurut Ibnu Taimiyah tidak membolehkan berbagai koalisi profesional baik individu maupun kelompok.

Memonopoli akan menyebabkan penindasan kepada masyarakat, umumnya masyarakat menengah ke bawah.

d. Bebas dari “MAGHRIB”

Dalam operasional ekonomi Islam haruslah terbebas dari unsur *maghrib* (maisyr, gharar, haram, riba dan bathil) karena ekonomi Islam bukan hanya berprinsip rela merelakan melainkan juga terbebas dari kedzaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain

e. Menjalankan bisnis dan Aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yaitu memenuhi rukun, hak dan kewajiban dalam transaksi serta yang berkaitan dengan hal itu.

f. Menyalurkan ZIS (*Zakat, Infak dan Sedekah*). Bank Syariah mempunyai dua peran yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial.

E. Sistem Operasional Perbankan Syariah

1. Sistem Penghimpunan Dana (Funding)

Metode penghimpunan dana yang ada pada Bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga Kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1) Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Di samping itu, sebagai bank syariah yang diuntut untuk mempraktikan kaidah Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem Wadi'ah, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (Mudhrabah Muqayyadah) atau investasi terbatas (Mudhrabah Muqayyadah) serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

a) Modal

Modal merupakan dana (dalam bentuk pembelian saham) yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah fi sahm asy-syariqah atau equity participation pada saham perseroan bank, yaitu: dana titipan masyarakat dan dana dari ZIS.

Dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank syariah selain mengelola dana untuk kepentingan komersial bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian

masyarakat seperti Dompot Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ)

b) Titipan (Al-Wadiah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Al-Wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis Al-Wadiah, yaitu:

(1) Wadiah Yad Al-Amanah

Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya (Fee) kepada yang menitipkan.
- Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

(2) Wadiah Yad Adh-Dhomah

Wadiah jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan,
- Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada

kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang di manfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

c) Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabbah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan dibank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Mudharabah Muthlaqah

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.

(2) Mudharabah Muqayyadah

Pada jenis akad ini, shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha,

tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.

b. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu;

1) *Equity Financing*

Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah muthalaqah/muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah.

(1) Al-Mudharabah

Dari segi konsep dasar, mudharabah yang akan dijelaskan disini sama dengan mudharabah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpunan dana bank (deposit nasabah), namun ada yang membedakannya. Al-Mudharabah pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib (pengelola dana).

Pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai shahibul maal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu

tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Dalam pelaksanaan kontrak AL-Murabahah, bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (*full investment*).

(2) Al-Musyarakah

Yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut presentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen syarikat Al-Man, karena jenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, di antaranya modal ventura, dimana bank ikut memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang. Di Indonesia,

sudah ada banyak bank syariah yang melakukan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri (manufacturing), usaha atas dasar kontrak dan lain sebagainya. dalam kontrak Al-Musyarakah, bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi fasad.

2) *Debt Financing*

Debt Financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan ribah fadhal. Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian, di khawatirkan dapat menimbulkan ribah nasiah. Pertukaran antar uang dengan uang (sharf) dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

3) Barang dengan uang

Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan skim jual beli (ba'i) atau pun sewa menyewa (ujrah). Yang termasuk skim jual beli adalah:

(a) Ba'i Al-Murabahah

Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam ba'i Al- murabahah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (mark up). margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapat bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktutertentu yang disepakati. Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan elemen murabahah ini adalah suatu yang dibenarkan dalam islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- (1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli,
- (2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan,
- (3) Barang yang dijualbelikan bukanlah barang barang ribawi,
- (4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan Islam.

Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah:

- (1) Penjual (ba'i)
- (2) Pembeli (musytariy)
- (3) Barang (mabi')
- (4) Sighat dalam bentuk ijab kabul.

(b) Ba'i Bithaman Ajil

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal karena prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan arau secara diangsur (al-taqsid).

Sedangkan yang termasuk skim sewa-menyewa (ujrah):

1) Al-Ijarah (operasional Lease)

Konsep ini secara etimologi erarti upah atau sewa. Ahli sewa islam mendefinisikan dengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual-beli, sebab akad jal beli adalah kekal (muabbadan), sedangkan al-ijarah akad ini dalam masa tertentu (muaqqatan). Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagi bentuk produk yang diletakkan pada skim pembiayaan, diantara caranya adalah:

- (1) Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta dibawah elemen al-ijarah.
 - (2) Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat-syarat lain yang disetujui kedua belah pihak.
- 2) Ijarah wa iqtina (finansial lease)

Skim ini merupakan bentuk lain dari ijarah di mana persewaan berakhir dengan perpindahan hak milik dan

objek sewa. Skim ini lebih banyak dipakai pada perbankan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

4) Uang dengan Barang

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim:

a) Ba'i as-Salam (*In-front Payment Sale*)

Skim ini secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Di dalam masyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Dalam transaksi ba'i as-salam mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridhaan para pihak. Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera.

b) Ba'i al-Istishna (*istisna sale*)

Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli dengan produsen atau penjual di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

Dalam literatur fikih klasik disebutkan istishna sebagai lanjutan dari ba'i as-salam, sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad ba'i as-salam. Adapun yang

membedakannya dengan as-salam adaah pada metode pembayaran sifat kontraknya. Pada ba'i as-salam, pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifat kontrak pada skim baik as-salam adalah mengikat secara asli (thabi'i) pada semua pihak dari semula, sedangkan pada istishna, bersifat mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

c. Jasa Layanan Perbankan

1) Al-Wakalah (Deputyship)

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan Letter Of Credit(L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di Luar Negeri(L/C Ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

2) Kafalah(Garanty)

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin)ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (Bank Guarantee).

Ada beberapa jenis kafalah, yaitu:

- (a) Kafalah bin Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (personal guarantee).

- (b) Kafalah bil-Maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (Advance Payment Bond) atau jaminan pembayaran (Payment Bond).
- (c) Kafalah Mualaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu suatu proyek (Performance Bond) atau jaminan penawaran (Bid Bond).
- (d) Kafalah Bit Taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

3) Hawalah (*Transfer Service*)

Hawalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'iin) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal 'alaih). Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut:

- (a) Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank.
- (b) Post-dated Check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.
- (c) Bill Discounting, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah lainnya.

4) Ju'alah

Jualah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh



pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha dan lain sebagainya.

5) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang dithan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan/pinjaman.

6) Al-Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-Qard al-Hasan sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya qardhul hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.

7) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini

yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

2. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tidak sedikit masyarakat umum dan bahkan kalangan intelektual terdidik yang belum memahami konsep bank syariah. Mereka beranggapan bagi hasil dan bagi hasil adalah sama dengan bunga. Mereka mengklaim, bahwa bagi hasil hanyalah nama lain dari sistem bunga. Pandangan ini juga masih terdapat di kalangan sebagian kecil ustadz yang belum memahami konsep dan operasional bagi hasil.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang menyangkut akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja serta *corporate culture*.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Ismail (2011: 32) dalam buku Perbankan Syariah Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan as-Sunah.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Fikih muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam

akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karim, 2004: 63).

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut

- 1) Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul.
- 2) Syarat, seperti:
 - a) Barang dan jasa harus halal.
 - b) Harga barang dan jasa harus jelas
 - c) Tempat penyerahan harus jelas
 - d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan

b. Struktur Organisasi

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan



ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (*The Shari'a Supervisory Board*) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/akad (*agreements, appointment and engagement*) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah. Dewan ini ditempatkan sejajar dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai *director* atau komisaris utama (*President Commissioner* atau *significant shareholders*) dari institusi keuangan syariah tersebut. Pembubaran atau penggantian anggota dewan syariah mesti mendapat rekomendasi *directors* dan dikehendaki mendapat pengesahan dari pemegang saham (*shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau *general meeting*.

Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan/ institusi keuangan syariah yaitu:

- 1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah,

maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.

- 3) Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta (Rachdian, 2011).
- 4) Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat.
- 6) Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah yang berpusat di Ibu Kota negara Indonesia-Jakarta, maka tidak menolak kemungkinan timbulnya berbagai perbedaan pendapat (*ijtihad*) tentang beberapa produk perbankan syariah antara satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Hal ini akan membingungkan para nasabah (*customers*) dan menyukarkan untuk menyatukan persepsi umat Islam terhadap perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu



didirikanlah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengetuai semua institusi keuangan syariah di Indonesia.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah :

- 1) Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain sebagainya.
- 2) Untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap institusi keuangan Syariah untuk mengawasi jalanya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut.
- 3) Dewan Syariah Nasional juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi keuangan syariah.
- 4) Dewan Syariah Nasional juga mengesahkan usulan nama-nama orang yang akan disahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah yang berada di setiap institusi keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberi cadangan para ulama/intelektual Muslim yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di institusi keuangan syariah (Amuaz, 2008).



c. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasar prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara dewan pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SKnya No.Kep 09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan:

- 1) Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- 2) Mengubah bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi
- 3) BASYARNAS bersifat otonom dan independen (Barokah, 2009).

Tugas dan kewenangan BASYARNAS:

- 1) Menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian.
- 2) Menyelesaikan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadikan syariah sebagai dasarnya.
- 3) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
- 4) Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Barokah, 2009).

Mekanisme operasional BASYARNAS:

- 1) Permohonan untuk mengadakan arbitrase
- 2) Penetapan arbiter
- 3) Acara pemeriksaan
- 4) Perdamaian
- 5) Pembuktian dan saksi
- 6) Berakhirnya pemeriksaan
- 7) Pengambilan putusan
- 8) Perbaikan putusan
- 9) Pembatalan putusan
- 10) Pendaftaran putusan
- 11) Pelaksanaan putusan
- 12) Biaya arbitrase

Mengenai kewenangan kompetensi absolut terhadap penyelesaian permasalahan hukum antara nasabah dan bank syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh



pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Hal tersebut telah diperkuat dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal
- 2) Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat
- 3) Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya.

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal.

e. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan bank syariah harus skillful dan profesional dan mampu melakukan tugas-tugas *teamwork*.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai perangkat bunga
Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi	Besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi akan selalu untung
Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya presentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan
Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku	Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun
Kerugian ditanggung bersama	Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan	Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat
Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan
Berorientasi pada keuntungan	<i>Profit oriented</i>



<i>(profit oriented)</i> dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Murni, 2009





DASAR HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA (*ISLAMIC FUNDAMENTAL BASIS IN INDONESIA*)

A. Pengertian Perikatan/Akad dalam Islam (*Definition of Engagement in Islam*)

Akad atau Perikatan bermakna menyimpulkan yang berasal dari bahasa Arab yaitu 'aqada. Aqad atau disebut juga 'uquud berarti mengikat atau kontrak perjanjian. Secara etimologi, akad ialah ikatan yang menggabungkan dua utas tali. Akad juga berasal dari kata 'ahdu yakni berjanji atau disamakan dengan istilah overeenkomst atau perjanjian yang bermakna “pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak melakukan



sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain”. Quraish Shihab mengartikan ‘uquud sebagai sesuatu yang mengikat satu dengan lainnya menjadi kesatuan yang tidak saling terpisahkan.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk bertindak atau tidak bertindak dalam perbuatan hukum tertentu atau seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur mengenai hubungan dua pihak atau lebih tentang suatu hal atau objek yang menjadikannya halal dalam transaksi.

Fuqaha (ahli hukum Islam) menjelaskan bahwa akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah yang berdampak hukum terhadap obyek pertalian. Karena merupakan hukum Islaam, maka kaidah hukumnya berasal dari al-Quran dan Sunnah, serta ijtiha (hasil pemikiran manusia) sebagai penerapan dari syara’ yakni fikih.

Hukum pertalian ini selain sebagai ketaatan menjalankan syariat Islam, juga memiliki dampak terhadap hukum perdata. Ketaatan ini merupakan relijius transendental yang melekat pada kaidah-kaidah sebagai cerminan dari kekuasaan Allah swt.

Akad Islam didasarkan pada QS Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.



Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

QS Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Dan juga berdasarkan pada hadis Nabiullah Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Apakah pencaharian yang paling baik? Jawabanya: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”.

Selain itu, hukum akad juga bersumber dari beberapa mazhab, yang salah satu di antaranya adalah mazhab Hambali yang membolehkan akad jika tidak terdapat hal-hal yang jelas dilarang oleh Agama. Mazhab Hanafi menyatakan dengan jelas bahwa akad dilarang, kecuali jika terdapat keadaan yang menimbulkan seseorang untuk melakukan perikatan dengan orang lain (Istihsan). Juga mazhab syafi’i yang tidak memperbolehkan akad jika belum nampak obyek akad dihadapan orang lain yang melakukan perikatan.

B. Syarat dan Unsur Perikatan dalam Islam (*Engagement Elements and Conditions in Islam*)

Akad adalah tasharuf (perbuatan hukum) yang berdampak hukum terhadap obyek yang diikatkan berdasarkan atau telah memenuhi syarat dari akad tersebut, yaitu:

1) Adanya subyek hukum (aqidain)

Ash-Shiddiqy mengungkapkan bahwa kedua pihak yang melakukan perikatan (berakad) haruslah ahliyatul aqidaini atau cakap, baik individu maupun lembaga hukum. Hal ini mempersyaratkan pengetahuan seseorang terhadap akad yang dilakukan, sehingga bagi anak kecil ataupun orang gila, tidak akan berlaku akad Islam bagi mereka.

2) Adanya obyek hukum (mahallul aqad)

Obyek hukum dalam perikatan, dapat diakui dan diterima secara hukum oleh kedua belah pihak. Di samping itu, beberapa persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh obyek akad adalah:

- Obyek akad harus tersedia ketika berlangsung perikatan untuk diadakan dan perikatan berakhir ketika obyek tersebut telah diterima pihak lainnya yang berhak. Islam mengharamkan menjual obyek yang masih belum waktunya, seperti transaksi pada buah yang mentah atau pada bayi ternak yang masih dalam kandungan.
- Obyek akad haruslah dibenarkan dalam syariah. Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Inilah yang membedakan perikatan Islam dengan perikatan umum.
- Objek akad haruslah jelas dan dapat diketahui bentuk

dan jenis, serta ukuran dari obyek tersebut.

- Obyek akad dapat diserahterimakan pada waktu transaksi terjadi atau ketika terjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi tersebut.

Perikatan atau akad dalam Islam yang merupakan perikatan ijab qabul yang berdampak hukum pada obyek akad. Adapun unsur-unsur perikatan berdasarkan hal tersebut, yakni:

a. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan pernyataan keinginan oleh pihak mujib untuk bertindak atau tidak mengerjakan sesuatu hal, sedang qabul merupakan pernyataan qaabil yang menyetujui keinginan pihak mujib dalam sebuah perikatan. Kedua unsur ini merupakan legalitas dalam perikatan antara pihak mujib dan qaabil.

b. Diperbolehkan oleh syariat

Akad yang terjadi tidak dapat bertentangan dengan syariat Islam yaitu al-Quran dan sunnah. Begitu pun obyek akad tidak dapat bertentangan dengan syariat Islam.

- c. Adanya dampak hukum terhadap objek akad terutama dalam kepemilikan atau pendayagunaan obyek akad.

C. Prinsip Akad dalam Islam (*Principles of Engagement in Islam*)

1) Prinsip Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Prinsip ini merupakan prinsip asasi dalam fikih muamalah dan juga merupakan prinsip asasi dalam sebuah akad (hukum perjanjian). Dalam hal ini, prinsip kebebasan membolehkan dua pihak atau lebih yang melakukan pengikatan bebas dalam menentukan persyaratan dalam



hal objek akad, dan hal lainnya termasuk jika terjadi perselisihan atau sengketa.

2) Prinsip Kestaraan (Al-Musawah)

Prinsip ini memberikan dasar bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dengan kedudukan dan fungsi yang setara atau sebanding dalam hak dan kewajiban dalam perikatan.

3) Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Prinsip keadilan merupakan prinsip dasar dalam akad yang juga merupakan salah satu sifat Allah swt. Pada prinsip ini segala kewajiban yang tertuang dalam akad wajib dipenuhi sesuai keadaan atau keinginan kedua belah pihak. Prinsip ini juga terkait juga dengan prinsip kestaraan, meskipun hak dan kewajibannya tidak sama.

4) Prinsip Kerelaan (Ar-Ridha)

Prinsip ini merupakan penyatuan dalam akad melalui kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Kerelaan kedua belah pihak inilah dianggap sebagai prasyarat terwujudnya segala transaksi dalam akad. Pelanggaran terhadap prinsip ini dipandang sebagai kebatilan (al-akl bil bathil) karena mengandung unsur memakan sesuatu dengan bathil. Di samping itu, prinsip ini mengisyaratkan tidak terdapatnya adanya penipuan, paksaan, tekanan atau ketidakjujuran dalam akad perikatan.

5) Prinsip Kebenaran/Kejujuran (Ash-Shidiq)

Prinsip kebenaran atau kejujuran merupakan etika yang melandasi setiap akad/perikatan. Islam dengan tegas melarang berkata tidak benar dan tidak jujur dalam apapun juga. Prinsip kebenaran ini menghindari kedua belah pihak

untuk melakukan perbuatan pemalsuan dan penipuan. Konsekuensi ketika prinsip ini dilanggar oleh salah satu pihak atau keduanya akan mengakibatkan akad perjanjian menjadi tidak sah.

6) Prinsip Tertulis (Al – Kitabah)

Prinsip tertulis ini merupakan persyaratan keshahihan sebuah akad. Legalitas sebuah akad tercermin dari prinsip ini. Islam memerintahkan bahwa semua transaksi atau akad dibuatkan kontrak perjanjian atau catatan (khitabah).

D. Bentuk Akad dalam Islam (*Forms of Engagement in Islam*)

Bentuk akad atau perikatan berdasarkan obyeknya, terdiri dari:

1) Akad Hutang (al-Iltizam bi ad-Dain)

Akad hutang dalam Islam dinyatakan sebagai suatu tanggungan (dzimmah) seseorang. Sumber akad hutang yaitu adalah perikatan atau akad itu sendiri, keinginan salah satu pihak yang berakad, memiliki obyek akad baik materi maupun non materi, tindakan berdampak hukum, pembayaran tanpa sebab dan sesuai syariat Islam. Semua ketentuan tersebut menentukan kewajiban seseorang untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pihak lain.

2) Akad Benda (al-Iltizam bi al-'Ain)

Akad benda adalah pengikatan dengan obyek akad yaitu pengikatan terhadap suatu harta kekayaan yang dipindahtangankan baik kepemilikannya maupun manfaatnya kepada pihak lain, seperti sewa menyewa atau jual beli. Sumber perikatannya adalah akad itu sendiri dan benda yang diakadkan. Selain itu, sumber perikatannya

berasal dari keinginan salah satu pihak dan tindakan hukum yang dilakukan.

3) Akad Kerja (al-Iltizam bi al-'Amal)

Akad kerja merupakan perikatan tindakan melakukan suatu hal bagi kedua belah pihak. Sumber perikatannya dalam bentuk ijarah dan istisna. Akad ijarah adalah perikatan atas biaya yang obyeknya adalah jasa atau pemanfaatan obyeknya dapat dalam bentuk perjanjian kerja (ijaran al-manafi) dan sewa menyewa (ijarah al-a'mal). Sedang akad istisna merupakan perikatan dimana obyek dan pekerjaannya dilakukan oleh pihak lainnya.

4) Akad Jaminan (al-Itizam bi at-Tautsiq)

Akad ini adalah salah satu bentuk perikatan yang obyek akadnya merupakan menjamin (menanggung) dalam suatu akad. Dalam hal ini, diperlukan pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin salah satu pihak yang bertransaksi dalam akad. Akad ini dapat dilakukan dalam menjamin suatu akad utang, akad benda dan akad kerja yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam suatu akad/perikatan.

5) Batal atau Berakhir suatu Akad

Akad merupakan perikatan atau perjanjian kontrak antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kehendak untuk bertindak dan berdampak sesuai hukum, terutama hukum Islam. Kehendak inilah yang merupakan batasan berakhirnya atau batalnya suatu akad. Sehingga yang membatalkan atau berakhirnya suatu akad adalah tujuan akad itu sendiri yang telah dicapai dan jangka waktu yang telah berakhir (fasakh). Sebab-sebab berakhirnya suatu akad antara lain adalah:

- a) Dibatalkan karena tersinyalir terdapatnya sesuatu kandungan yang dilarang oleh syariat, seperti objeknya dari hasil yang haram atau tidak terpenuhinya kejelasan obyek akad atau ada unsur riba di dalamnya.
- b) Salah satu pihak membatalkan akad tersebut, karena ketidaksesuaian obyek akad yang diinginkan atau dikehendaki dengan yang diterima dalam transaksi (khiyar) misalnya produk cacat, jumlah yang tidak sesuai atau hal lainnya yang memaksa salah satu pihak untuk membatalkan.
- c) Salah satu pihak membatalkan akad tersebut, karena timbulnya persetujuan lain oleh salah satu pihak dengan pihak lain (iqalah).
- d) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban dalam akad oleh salah satu pihak, baik dengan tidak disengaja maupun yang secara sadar tidak memenuhi kewajibannya karena faktor eksternal atau faktor lainnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban maka pihak yang dirugikan berhak menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan atau lembaga hukum lainnya seperti badan arbitrase atau badan syariah nasional.
- e) Jangka waktu telah berakhir, seperti dalam akad barang, akad kerja, akan penjamin dan akad lainnya yang pemanfaatannya telah selesai sesuai jangka waktu yang telah ditentukan di awal dalam akad.



KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*POSITION OF COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAWS*)

A. Sejarah KHES di Indonesia (*KHES History in Indonesia*)

Kelahiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dimulai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini berdampak pada perluasan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang semula hanya penyelesaian sengketa di bidang pernikahan, adopsi anak, warisan, wasiat, zakat, infak, wakaf dan sedekah. Saat ini peradilan agama juga memiliki



kewenangan penyelesaian sengketa perdata seperti sengketa hak milik dan perdata lainnya, serta sengketa dalam ekonomi syariah.

Selain itu, sengketa dalam ruang lingkup ekonomi syariah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mencakup: bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menegah syariah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan syariah, lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah lainnya.

Kewenangan peradilan agama dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dalam pasal 49 berubah menjadi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oirang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”. “Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. resuransi syari’ah; e. reksadana syari’ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.”

Terbitnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 menginisiasi terbentuknya Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. yang secara umum bertugas:

“Menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang

diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia."

KHES memiliki sumber hukum sebagai dasar rujukan di antaranya kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), seperti:

- 1) Durar al Hukam: Syarah Majjalat al ahkam, karya Ali Haidar
- 2) Al Muqarat Al Tasyriyyah Baina Al Qawaniin Al Wadhiyah Al Madaniyah Wa Al Tasyri' Al Islami, karya Sayyid Abdullah Al Husaini.
- 3) Al Wasith Fii Syarh Al Qanun Al Madani Al Jadid, karya Abd Al Razaq Ahmad Al Sanhuri.
- 4) Al Muammalat Al Madiyah Wa al Adabiyah, karya Ali Fikri
- 5) Al Fiqh Al Islami fi Tsaubihi al jadid, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
- 6) Al fiqh al Islami wa Adhilatuhu, karya Wahbah al Zuhaili.
- 7) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 8) Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
- 9) PSAK Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah. *"(Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", Jakarta : Kencana, 2009).*

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), memuat 4 bagian yang secara sistematis terdiri dari:

- 1) Tentang Subjek Hukum dan Amwal, yang dibagi ke dalam 3 bab, dan dimulai dari pasal 1 hingga pasal 19.
- 2) Tentang Akad, yang terbagi dalam 29 bab, dan dimulai dari pasal 20 hingga pasal 673.
- 3) Tentang Zakat dan Hibah, yang terbagi dalam 4 bab, dan dimulai dari pasal 674 hingga pasal 734.
- 4) Tentang Akuntansi Syariah, yang terbagi ke dalam 7 bab, dan dimulai dari pasal 735 hingga pasal 796.

Peraturan KHES ini jika ditinjau dari materinya maka setidaknya memuat 80% pasal atau sebanyak 653 pasal membahas tentang akad atau hukum perikatan, yang merupakan kandungan isi terbanyak dalam ketentuan ekonomi syariah.

Cakupan KHES ini meliputi di antaranya terkait akuntansi syariah, hibah, zakat, dana pensiun syariah, pembiayaan rekening koran syariah, qard, pembiayaan multi jasa, sertifikat BI Syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah mudharabah, takmin, pelepasan hak, shulhu, wakalah, ghashab dan itlaf, wadiah, rahn, hawalah, kafalah, ijarah, istisna, khiyat, muzarah dan musaqah, murabahah, mudharabah, syirkah, bai dan akad jual beli.

B. Kedudukan KHES dalam Hukum Ekonomi di Indonesia *(Position of KHES in Economic Law in Indonesia)*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merubah secara komprehensif kedudukan dan keberadaan peradilan agama di Indonesia. Selain eksistensinya di bidang hukum keluarga Islam, yang selama ini menjadi kewenangan utamanya, juga diberikan

kewenangan penyelesaian sengketa atau perkara dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, di antaranya bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menegah syariah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah lainnya.

Mahkamah Agung RI menetapkan kewenangan peradilan agama dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Perbaikan sarana dan prasarana baik perihal yang terkait fisik gedung maupun perihal yang terkait dengan peralatan lembaga peradilan agama.
- b. Peningkatan kapasitas ketrampilan teknis SDM (sumber daya manusia) peradilan Agama dengan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pendidikan tinggi untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan aparat peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang ekonomi syariah.
- c. Pembentukan hukum formil dan materil sebagai panduan aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa ekonomi syariah.
- d. Pemenuhan sistem dan prosedur dalam sengketa atau perkara terkait ekonomi syariah sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah, sederhana, dan berbiaya minim.

Kebijakan Mahkamah Agung ini adalah tiang utama kewenangan kehakiman dalam aktivitas peradilan agama sesuai amant Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Dasar 1945 terutama pasal 24.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berkedudukan sebagai hukum positif dan normatif yang bersifat unikatif, yang sebelumnya hanya merujuk pada kitab-kitab fikih dengan berbagai mazhab dan karya, menjadi dasar bagi hakim peradilan agama untuk memutuskan penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang menjadi desparisitas di setiap peradilan agama yang ada di Indonesia, termasuk keputusan antar hakim dengan hakim lainnya. Hal ini mengungkapkan bahwa “different judge, different sentences (lain hakim, lain pula pendapat dan putusannya)” dapat terjadi dan berlaku bagi perkara ekonomi syariah.

Perkara-perkara ekonomi syariah semakin banyak dan telah dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang ada, terutama ketentuan-ketentuan syariah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Perbedaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Gadai dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES (*Comparison of the Pawn Code and Compilation of Sharia Economic Law*)

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Gadai

Pengertian gadai secara umum menurut pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului

kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan rnengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dari definisi di atas, gadai mengandung beberapa unsur pokok di antaranya:

1. Gadai terjadi disebabkan adanya perikatan penyerahan kekuasaan terhadap barang yang digadai kepada pihak pemegang gadai (kreditur);
2. Penyerahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak penggadai (debitur);
3. Terdapat obyek atau barang yang digadai dalam bentuk barang bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud, dan benda bergerak tersebut tidak dapat digadai, jika obyeknya tidak bisa dipindahtangankan;
4. Pihak pemegang gadai memiliki hak dalam menerima pelunasan obyek gadai dari para kreditur lainnya.

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai Rahn

Secara etimologi, *rahn* (رهن) bermakna kekal, tetap dan berkelanjutan. *Rahn* juga mengandung arti *al-habsu* (الحبس) yang bermakna menahan atau jaminan.

Perikatan *rahn* dalam terminologi positif diistilahkan dengan agunan, runggahan dan barang jaminan. Islam menyebutkan bahwa rahn adalah fasilitas saling tolong-menolong tanpa tambahan imbalah bagi umat Islam.

Dalam KHES buku 2 pada bab I mengenai ketentuan umum dalam pasal 20 ayat 14 disebutkan bahwa rahn adalah: *“Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi*

pinjaman sebagai jaminan."

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa Nomor 25 DSN-MUI/III/2002 menjelaskan tentang sifat hukum rahn. Di samping itu, dalam KHES buku 2 pada bab 13 pasal 343 menjelaskan tentang rahn, bahwa: "Murtahin selaku peneriman harta gadai mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang râhin dilunasi. Oleh sebab itu, apabila barang jaminan telah dikuasai oleh murtahin selaku pemberi utang maka akad rahn bersifat mengikat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh râhin".

Pada pasal yang lain yaitu pasal 357 membahas tentang pemanfaatan obyek rahn yang dengan jelas menyatakan bahwa: *"Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (selanjutnya dibaca : râhin)."*

Pada pasal 362 pada bab 13 KHES buku 2 menjelaskan tentang biaya pemeliharaan obyek rahn, yang secara jelas dinyatakan bahwa: *"Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad."*

3) Perbedaan Gadai pada KUH perdata dan Rahn pada KHES

Perbedaan gadai atau rahn dalam KUH Perdata dengan KHES, adalah sebagai berikut:

1. KHES menyatakan bahwa *Rahn* merupakan tindakan seseorang yang didasarkan atas tolong-menolong, sukarela dan tidak meraup keuntungan melalui penetapan tingkat bunga atau sewa modal dari obyek rahn.

2. KHU Perdata menyatakan bahwa suatu keharusan dalam gadai untuk membebaskan nasabah dengan sewa modal sebagai tambahan dan diperhitungkan dalam total pinjamannya. Sedang rahn dibolehkan menarik dana sebagai biaya sewa atas pemeliharaan atau biaya perawatan obyek rahn.
3. Dalam gadai, keberadaan obyek gadai bersifat aksesoris, sehingga obyek gadai dapat tidak dijaminkan, atau seperti praktik fidusia dilakukan. Dalam gadai, hanya satu kontrak perikatan yaitu transaksi hutang piutang yang menjaminkan benda bergerak. Dalam rahn, keberadaan obyek rahn mutlak dibutuhkan sebagai dasar pembebanan jasa penyimpanan atau pemeliharaan.
4. KUH Perdata mensyaratkan aktivitas gadai dilakukan melalui sebuah lembaga gadai (perusahaan umum pegadaian), sedang dalam KHES, transaksi rahn bisa dilakukan tanpa melalui sebuah badan hukum. Namun, jika dilakukan dalam lembaga keuangan syariah, maka obyek rahn dianggap sebagai produk tersendiri dan atau produk pelengkap.
5. Barang yang dijaminkan ketika tidak dapat ditebus, maka barang tersebut dilelang atau dijual. Dalam rahn, kelebihan dana hasil lelang tersebut, diberikan kepada lembaga Zakat, Infak dan Sedekah jika pemiliknya tidak mengambilnya. Sedang dalam gadai, kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian.

Perbedaan akumulasi biaya gadai/rahn antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Gadai

Beban	Persentase bunga	Jumlah	Jangka Waktu pinjaman per 15 hari
Administrasi	1%		
Pinjaman	1,25%	<20.000.000	15 hari
	1%	>20.000.000	15 hari

Tabel Beban Rahn

Beban	Jumlah Rahn	Jasa Simpanan per 10 hari
Administrasi	20.000 – 150.000	1.000
	155.000 – 500.000	3.000
	505.000 – 1.000.000	5.000
	1.050.000 – 10.000.000	15.000
	10.050.000 – ke atasnya	25.000





HUKUM INVESTASI SYARIAH (*LAW OF SHARIA INVESTMENT*)

A. Pengertian Investasi Syariah (*Definition of Sharia Investment*)

Investasi syariah merupakan suatu aktivitas penanaman modal yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang sesuai dengan tuntutan dan hukum Islam. Aktivitas investasi syariah merupakan salah satu aktivitas muamalah dalam bidang ekonomi antar individu ataupun kelompok dan individu lainnya atau lembaga/instansi/perusahaan.



Setiap aktivitas muamalah dalam kaidah fikih asal hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Hal ini berarti setiap kegiatan yang berhubungan dengan antar manusia dibolehkan kecuali aktivitas yang secara hukum Islam adalah haram atau dilarang oleh agama Islam.

Banyaknya aktivitas muamalah bermunculan dan terbilang baru dalam era digitalisasi ini, terutama belum tertuang secara eksplisit atau implisit dalam al-Quran dan Sunnah. Semua aktivitas ini menurut Islam dibolehkan kecuali yang secara jelas dilarang dalam al-Quran dan Sunnah.

Terminologi investasi syariah dan pasar modal, belum terdapat pada literatur-literatur Islam klasik. Umumnya semua kegiatan ekonomi dalam literatur tersebut hanya memuat aktivitas jual beli (al-bay)

Di samping itu, kegiatan investasi bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari keuntungan yang diperoleh. Tandelilin mengungkapkan beberapa motif seseorang berinvestasi, di antaranya:

- Memperoleh penghidupan yang lebih baik di waktu akan datang
- Berdampak pada menurunnya tingkat inflasi suatu negara
- Termasuk dalam kategori aktivitas penghematan pajak.

B. Mengenal Investasi Syariah (*Introducing Sharia Investment*)

Seperti diketahui, investasi syariah adalah salah satu aktivitas muamalah yang dapat menghasilkan keuntungan, dan dibolehkan oleh ajaran Islam, kecuali yang dilarang

dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mengisyaratkan bahwa aktivitas investasi syariah dapat dilakukan jika:

1. Tidak mengandung unsur riba (tidak terkait bunga sebagai kompensasi hasil investasi)
2. Dana yang dimiliki digunakan untuk investasi yang halal saja.

Investasi syariah yang halal terutama yang berhubungan dengan investasi pasar modal, telah dikuatkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:

1. Fatwa mengenai Jual Beli Saham Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000;
2. Fatwa mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000;
3. Fatwa mengenai Obligasi Syariah Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002;
4. Fatwa mengenai Obligasi Syariah Mudharabah Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002;
5. Fatwa mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal Nomor 40/DSN-MUI/IX/2003;
6. Fatwa mengenai Obligasi Syariah Ijarah Nomor 41/DSN-MUI/III/2004.

Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI telah menguatkan aktivitas investasi syariah di Indonesia. Fatwa ini secara jelas mengatur prinsip syariah dalam transaksi di pasar modal.

C. Pemindaian dengan Indeks Syariah (*Scanning Using the Islamic Index*)

Investasi syariah dapat dilakukan jika investasi tersebut adalah halal. Dalam menentukan investasi tersebut halal atau haram, dapat digunakan indeks syariah. Indeks syariah adalah salah satu metode dalam menentukan investasi yang dilakukan halal atau haram. Metode ini digunakan dengan memindai dan menyeleksi beberapa surat berharga di pasar modal dengan memperhitungkan kriteria tertentu dalam menentukan kesesuaian syariah atau tidak.

Indeks syariah diinisiasi oleh Indeks Bursa Syariah Dow Jones (Dow Jones Islamic Market Indexes/DJIM Indexes) pada tahun 1999 dengan membandingkan surat berharga yang memenuhi kepatuhan syariah. Indeks ini memberikan indikasi terkait kepatuhan syariah pada saham dalam satu kelompok. Hingga kini, terdapat 70 lebih saham terindeks DJIM Technology Index.

Dalam menentukan dan menemukan investasi halal dalam Indeks Bursa Syariah Dow Jones (Dow Jones Islamic Market Indexes/DJIM Indexes), melakukan proses pemindaian dengan:

1. Penyaringan industri atau perusahaan terindikasi haram, meliputi perusahaan yang berbisnis alkohol, rokok, produk babi, berbisnis layanan keuangan konvensional (mengandung bunga), senjata dan pertahanan, serta industri hiburan seperti perjudian, hiburan malam dan pornografi.
2. Penyisihan perusahaan atau industri yang aktivitas bisnisnya mengandung unsur haram telah dilakukan pada saham di pasar modal, maka surat berharga yang masih ada, dilakukan pemindaian selanjutnya dengan

mengidentifikasi industri yang terdapat kandungan riba dalam bisnisnya, baik dari sumber pendanaan perusahaan maupun penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan.





PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (*SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES*)

A. Kewenangan Peradilan Agama (*Authority of the Religious Courts*)

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang melakukan wewenang kehakiman dalam penegakan keadilan dan hukum terutama diperuntukkan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Yuridiksi peradilan agama secara formal diatur dalam Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan hanya pada: "penyelesaian perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah". Namun sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan lebih kepada peradilan agama, sebagaimana ditegaskan bahwa: *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 'perkara tertentu' sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini"*.

Kata "perkara tertentu" adalah hasil revisi pada kata "perkara perdata tertentu" yang termaktub dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Penghilangan kata "perdata" mengandung makna agar bukan hanya kasus perdata saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

Kekuasaan atau kewenangan peradilan agama memuat dua hal yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan yang terkait dengan jenis sengketa dan kasus kekuasaan pengadilan. Kekuasaan ini menyangkut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata tertentu pada kalangan kelompok rakyat tertentu, yakni rakyat Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan absolut jelas termaktub dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Sedang kewenangan relatif merupakan kewenangan peradilan yang sejenis dan sesama tingkatan lainnya. Artinya, kewenangan relatif ini diberikan antara peradilan dalam lingkungan yang sama atau kewenangan yang terkait dengan wilayah hukum antarperadilan agama, seperti peradilan agama Makassar dengan peradilan agama Gowa.



Ekonomi syariah sering dikatakan sebagai ekonomi Islam yang merupakan ekonomi berasaskan prinsip syariah atau segala aktivitas usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan ekuitas berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 49 huruf i yang tidak berubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:

1. Bank syari’ah
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah
3. Asuransi syari’ah
4. Reasuransi syari’ah
5. Reksadana syari’ah
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
7. Sekuritas syari’ah
8. Pembiayaan syari’ah
9. Pegadaian syari’ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan
11. Bisnis syari’ah”.

Penjelasan pasal 49 ini menyebutkan 11 bidang usaha syariah. meski demikian tidak menutup kemungkinan munculnya investasi syariah lainnya yang belum terakomodir ke dalam 11 aktivitas investasi tersebut.



Seperti halnya diketahui bahwa ekonomi syariah adalah aktivitas atau perilaku ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan selama tidak dilarang atau haram menurut hukum Islam, maka semua investasi syariah dapat dilakukan meskipun belum termaktub dalam 11 bidang usaha ekonomi syariah sesuai perundang-undangan.

Pelaku ekonomi yang menjadi kekuasaan peradilan agama sebagai subyek hukum Islam menurut undang-undang peradilan agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yang beragama Islam merupakan orang atau lembaga hukum yang secara otomatis secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Artinya, semua sengketa dan perkara hukum dalam bidang usaha ekonomi syariah, baik pelaksanaan pengikatannya maupun penyelesaian perselisihannya merupakan kewenangan peradilan agama.

B. Sengketa Ekonomi Syariah (*The Occurrence of Shari'ah Economic Disputes*)

Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*.
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudlorobah*.
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari'ah, akad *qirah* dan lain-lain.
4. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan.



Sengketa ekonomi syariah, secara garis besar diklasifikasikan ke dalam:

1. Perkara ekonomi syariah antara lembaga keuangan syariah atau lembaga pembiayaan syariah dan nasabahnya.
2. Perkara ekonomi syariah antar lembaga syariah, baik keuangan syariah maupun pembiayaan syariah.
3. Perkara ekonomi syariah antar umat Islam dengan umat Islam lainnya yang akad perikatannya didasarkan prinsip syariah.

Selain itu, Sengketa ekonomi syariah juga menangani bentuk sengketa kepailitan seperti Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara kepailitan lainnya.

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (*Settlement of Syari'ah Economic Disputes*)

Sengketa atau perkara yang timbul dalam bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu:

1) *Sulhu* atau dengan Perdamaian

Ketika terjadi sengketa ekonomi syariah maka hal yang pertama kali dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara *sulhu*. Cara *sulhu* merupakan cara yang diinginkan oleh Islam. Penyelesaian cara ini dicapai dengan musyawarah (*Syuura*) melalui kesepakatan atau mufakat antar pihak yang bersengketa.

Cara damai hakikatnya cara yang mengedepankan kesadaran antar pihak yang bersengketa untuk kembali kepada Sang Pemilik yaitu Allah swt dan Rasul-Nya Muhammad saw dala setiap perselisihan yang terjadi antar umat Islam. Di samping itu, cara musyawarah juga mengedepankan penyelesaian dengan prinsip syariah atau



hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Penyelesaian sengketa dengan cara ini diharapkan dapat menyelesaikan setiap perselisihan ekonomi syariah yang terjadi antar umat Islam.

2) *Tahkim* atau melalui Lembaga Arbitrase Syariah

Sengketa ekonomi syariah kadang kala tidak dapat diselesaikan secara damai antara dua pihak yang berselisih. Dalam hal ini diperlukan pihak ketiga sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian perkara perdata tersebut. keterlibatan mediator ini dapat diusulkan oleh salah satu pihak yang bertikai dan merasa tidak mampu penyelesaian perkara dilakukan dengan kesepakatan damai.

Mediator ini dalam perselisihan ekonomi syariah ditangani oleh lembaga formil (atau non lembaga/individu) yang secara khusus menangani sengketa perdata disebut arbitrase. Lembaga arbitrase ini merupakan lembaga mediasi segala perkara perselisihan sengketa ekonomi syariah yang mencapai kesepakatan melalui perjanjian arbitrase yang secara tertulis dibuat oleh pihak-pihak yang berselisih. Umumnya cara ini dilakukan sebelum perkara perselisihan dilakukan melalui peradilan agama.

3) *Qadha* atau melalui Lembaga Peradilan Syariah

Saat ini, segala penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di peradilan agama. Dukungan penuh berasal dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama selain kewenangan sebelumnya yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat,



hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, juga kewenangan di bidang ekonomi syari'ah yang termaktub dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan perluasan kewenangan ini, peradilan agama menjadi alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jika dengan *sulhu* (perdamaian) dan *tahkim* (arbitrase syariah) sengketa atau perkara perselisihan tidak dapat terselesaikan.

D. Contoh Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah *(Examples of Settlement of Syari'ah Economic Disputes)*

Banyak sengketa ekonomi syariah terjadi belakangan ini. Salah satu yang cukup populer adalah kasus pihak Pertamina sebagai nasabah pada salah satu Bank Syariah di Indonesia. Awalnya Pertamina melakukan pengikatan *murabahah* yang merupakan salah satu produk bank syariah khususnya dalam jual beli. Saat itu, pihak Pertamina mengajukan permohonan pembiayaan pengadaan 100 buah kendaraan dalam akad *murabahah*. Dalam kesepakatan awal, bank syariah bersedia dan telah membiayai setengah atau 50 buah kendaraan. Dalam periode pembiayaannya, pihak Pertamina mengalami gagal bayar dan pada saat yang sama bank syariah melakukan tambahan pada harga jual kendaraan yang dibiayai, sedang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pihak bank tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi harga barang yang dibiayai selama periode pembiayaan berdasarkan kesepakatan.

Perselisihan antara pihak Pertamina dan bank syariah tak kunjung usai, karena pihak bank tidak bersedia menyelesaikan sengketa ini di lembaga arbitrase atau Badan



Syariah Nasional, yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah jika kedua pihak bersedia dan menyetujui melalui arbitrase.

Dalam sengketa ini, pihak bank memilih menyelesaikan perselisihan ini melalui peradilan umum dan memperoleh pendapatan atau laba mencapai 250 juta rupiah. Di satu sisi, pihak pertamina dalam hal ini kuasa hukumnya, meskipun hasilnya nihil, tetap melaporkan perkara ini ke Bank Indonesia yang merupakan lembaga tertinggi perbankan dan melaporkan juga ke Dewan Syariah Nasional yang merupakan subbagian dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah bersangkutan. Berdasarkan kasus ini, maka segala perselisihan sengketa ekonomi syariah harusnya diselesaikan melalui lembaga peradilan agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.



BAB IX

TEORI PERILAKU KONSUMSI ISLAMIS *(THEORY OF ISLAMIC CONSUMPTION BEHAVIOR)*

A. Mashlahah dalam Konsumsi (*Mashlahah In Consumption*)

Maslahah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata mursalah berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalahah-mursalah menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalahah-mursalah (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus).

1) Etika Konsumsi dalam Islam

a. Tauhid (kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga senantiasa berada dalam hukum syariah.

b. Adil (keadilan)

Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan materiil, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

c. *Free Will* (kehendak bebas)

Manusia diberi kekuasaan karunia yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar. Sehingga kebebasan dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzalimi pihak lain.

d. Amanah (pertanggungjawaban)

Manusia merupakan pengemban amanah Allah. Dalam melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun diakhirat kelak.

e. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik



secara materi maupun spiritual.

f. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Etika konsumsi dalam Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya.

Masalah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu diantara hal berikut ini:

- Manfaat materil, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta/kekayaan bagi konsumen sebagai akibat pembelian suatu barang /jasa. Misalkan murah nya harga, biaya transportasi, dan semacamnya.
- Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia seperti rasa lapar, haus, kedinginan, keamanan, kenyamanan, dan harga diri.
- Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa.
- Manfaat terhadap lingkungan, yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
- Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa.



Selain itu, kegiatan konsumsi terhadap barang/jasa yang halal dan bermanfaat serta membawa kebajikan akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam aktivitas konsumsinya:

- Barang /jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Barang/jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak yaitu babi, darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau merusak.
- Tidak melakukan konsumsi yang berlebih-lebihan di luar kemampuan dan kebutuhan dirinya.
- Aktivitas konsumsi yang dilakukan diniatkan untuk mendapatkan rida Allah SWT.

Maslahah dalam konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama masalah akhirat atau berkah. Adapun masalah dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi dilakukan. Keberkahan dengan meningkatkan frekuensi kegiatan mak tidak akan pernah terjadi penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah tidak pernah menurun. Adapun masalah dunia akan meingkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan manusia didunia dalah terbatas sehingga ketika terjadi konsumsi yang berlebihan akan terjadi penurunan masalah dunia.

2) Konsep Masalah dalam Konsumsi

Kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan. Keinginan ditetapkan berdasarkan konsep kesatuan, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah. Tujuan syariah adalah mensejahterakan manusia.

Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan masalah disebut kebutuhan manusia. Teori ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai pemilik terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. "Kepuasan" bersifat subjektif. setiap orang menentukan kepuasan berdasarkan criteria mereka sendiri.

Konsep masalah menaungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, karenanya hal ini adalah tujuan dari konsumsi sebagaimana dalam produksi dan transaksi berbeda dengan teori konvensional dimana utility adalah tujuan konsumsi dan laba adalah tujuan produksi. Konsep masalah juga merupakan tujuan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun negara.

Masalah bagi setiap individu selalu konsisten dengan masalah sosial, berbeda utility pada seseorang seiring konflik dengan kepentingan sosial.

B. Hukum Utilitas dan Mashlahah (*Mashlahah In Consumption*)

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak terlepas dari yang namanya konsumsi. Mengenai konsumsi, antara teori ekonomi konvensional dan teori ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda.

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan memiliki tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) yang maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan disini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu manfaat dan kemaslahatan.

Sebab, bisa jadi konsumen menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap barang atau jasa akan tetapi justru barang/jasa tersebut tidak memberikan manfaat

karena hanya ingin memuaskan keinginannya. Berbeda dengan teori ekonomi Islam, perilaku konsumen menekankan pada konsep dasar cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah.

Masalah dipergunakan dalam Islam disebabkan penggunaan asumsi manusia yang bertujuan mencari kepuasan (utilitas) maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunaannya. Selain itu, batasan seseorang dalam mengonsumsi hanyalah kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan aturan dan prinsip syariat.

Konsep masalah dihubungkan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dihubungkan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan akibat dari terpenuhinya suatu keinginan dan masalah merupakan akibat terpenuhinya kebutuhan.

Sebagai contoh, ketika seseorang mengonsumsi makanan untuk menghilangkan rasa lapar, maka ia akan mendapatkan masalah untuk tubuhnya. Namun akan berbeda jika seseorang mengonsumsi makanan dengan alasan hanya untuk mencapai keinginannya.

Kandungan masalah terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Seorang konsumen akan merasakan adanya manfaat dari kegiatan konsumsi jika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis bahkan material.

Pada sisi lain, berkah yang diperolehnya ketika

mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Sebab mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah dan mendapat pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Oleh karena itu, manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam ekonomi Islam.

Mengapa konsep masalah lebih objektif dibandingkan dengan konsep utilitas? ada beberapa alasan yang dapat kita ketahui, yakni sebagai berikut :

- Masalah individu relatif konsisten dengan masalah sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja tidak berpengaruh terhadap utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar dalam menentukannya relatif objektif, sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dengan sosial. Misalnya minuman keras memiliki utilitas bagi individu yang menyukainya tetapi tidak memiliki utilitas sosial.
- Masalah memiliki konsep pemikiran terukur dan dapat dipertimbangkan sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggarannya. Sebaliknya dalam mengukur tingkat utilitas tidak akan mudah antara barang yang satu dengan lainnya. Meski mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam segi kualitas dan kuantitanya.
- Dengan menggunakan konsep masalah kita bisa membedakan kepentingan konsumsi antara satu orang dengan orang lainnya.

C. Keseimbangan Konsumen (*Consumer Balance*)

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginannya, sedang sumber daya yang dimiliki

terbatas (*scarcity*). Kebutuhan dan keinginan inilah yang memotivasi manusia untuk bertindak. Pemenuhan kebutuhan inilah dapat dicapai melalui mengonsumsi barang atau jasa.

Tujuan utama konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa yang dijual di pasar adalah memaksimalkan kepuasan total (*total satisfaction/utility*). Kepuasan total yang diperoleh konsumen ketika mengonsumsi produk/jasa tersebut didefinisikan sebagai utilitas total yang diperoleh dari sejumlah item per periode waktu. Fungsi utilitas total ini (*total utility function*) menunjukkan hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi barang/jasa dan tingkat konsumsi dari konsumen.

Kepuasan konsumen berkaitan dengan *product utility* yaitu kepemilikan, tempat, waktu dan bentuk dari produk tersebut. utilitas yang melekat pada produk ini mencerminkan kemampuan kualitas untuk memberikan kepuasan total kepada konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Jadi, kepuasan konsumen adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk/jasa yang dikonsumsi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen, yaitu:

1. Kebutuhan dan keinginan, yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika melakukan transaksi dengan produsen;
2. Pengalaman masa lalu, ketika mengonsumsi produk dari produsen;
3. Pengalaman dari teman-teman dekat ketika mereka



menceritakan kualitas produk yang akan dikonsumsi;

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran.

Jika ditinjau dari produk yang diinginkan konsumen, maka karakteristik yang diinginkan adalah:

1. *Faster* (lebih cepat), berkaitan dengan dimensi waktu yang memperlihatkan kecepatan dan kemudahan termasuk kenyamanan yang dirasakan konsumen dalam memperoleh produk tersebut.
2. *Cheaper* (lebih murah), berkaitan dengan dimensi biaya yang memperlihatkan harga atau ongkos dari suatu produk yang harus dikeluarkan oleh konsumen.
3. *Better* (lebih baik), berkaitan dengan dimensi kualitas produk yang dalam hal ini paling sulit digambarkan secara tepat.

Dimensi karakteristik kualitas produk menurut David Garvin, di antaranya:

1. Performansi; berkaitan dengan aspek fungsional dari suatu produk, misalnya TV memiliki gambar yang jelas, HP memiliki sinyal yang baik.
2. Features; merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, misalnya TV memiliki DVD input, HP memiliki kamera.
3. Keandalan; berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu.
4. Konformansi; berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan konsumen.
5. Durabilitas; merupakan ukuran masa pakai suatu produk.



6. Kemampuan pelayanan; berkaitan dengan kecepatan, keramahan atau kesopanan, kompetensi, dan kemudahan serta akurasi dalam perbaikan.
7. Estetika; bersifat subyektif yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individu.
8. Kualitas yang dirasakan; bersifat subektif yang berkaitan dengan perasaan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk, misalnya merk Iphone.

Dalam teori ekonomi, kombinasi dari berbagai konsumsi produk yang berbeda yang memberikan utilitas atau kepuasan yang sama disebut kurva indiferen (*indifference curve*). Dalam analisisnya memiliki asumsi bahwa semua produk yang dipertimbangkan dalam analisis dapat dibagi secara kontinu ke dalam sub unit atau konsumen tidak dibatasi oleh ukuran dari unit produk yang dikonsumsi. Selain itu, selera dan urutan preferensi konsumen diantara berbagai kombinasi produk yang dikonsumsi dapat diuraikan secara baik dan konsisten, serta konsumen memandang produk sebagai sesuatu yang disukai, dalam hal ini konsumen berkeinginan untuk mengonsumsi lebih daripada kekurangan.

Seperti diketahui, pada dasarnya konsumen memiliki keinginan mengonsumsi produk/jasa sebanyak-banyaknya guna memberikan utilitaspuasan total sebesar-besarnya. Selain itu, produk dan jasa yang ditawarkan pasar juga cenderung bervariasi mengikuti perkembangan zaman. Namun, setiap konsumen memiliki atau dibatasi dengan anggaran untuk mengonsumsi produk/jasa yang diinginkan tersebut, bahkan cenderung tidak memperhatikan aspek masalah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Perilaku



konsumen saat ini cenderung menjadi lifestyle (gaya hidup) yang merupakan kebiasaan baru yang melekat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, keseimbangan konsumen bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki atau lebih berfokus pada jumlah dana yang dimiliki, tetapi mengajarkan tentang kemaslahatan yang tidak terlepas dari keimanan konsumen yang memberikan dampak terhadap baik kualitas maupun kuantitas konsumsi sehingga tercapai utilitas total dalam material dan spritual. Aspek spritual inilah yang dapat memberikan cara pandang dunia bahwa konsumen Islam mengonsumsi produk/jasa atau berperilaku ekonomi dengan tujuan membersihkan harta dan menyucikan hati dari penyakit pelit, cinta pada dunia, dan sifat *israf* dalam memenuhi keinginan nafsu belaka.

Di samping itu, keseimbangan konsumen dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi, bukan hanya sekedar memenuhi kepuasan total dengan menghabiskan semua anggaran dana atau kemampuan finansial yang dimiliki untuk mengonsumsi barang/jasa, dengan berbagai kombinasi pilihan produk yang ditawarkan oleh pasar.

Keadilan distribusi dapat tercapai jika kepuasan konsumen tercapai ketika seseorang membelanjakan pendapatannya (alokasi dana) untuk pemenuhan bukan hanya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan sosial.

Kebutuhan materi ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup duniawi, termasuk keluarga dan kebutuhan sosial ditujukan dalam rangka kepentingan akhirat, mencakup zakat, infak dan sedekah sesuai ketentuan dan kerelaan konsumen. Jadi konsumen Islam

menghabiskan dananya untuk dunia dan akhirat.

Konsumsi sosial ini dijelaskan dalam al-Quran dalam Firman Allah swt QS al-Ma'arij ayat 24-25, yaitu:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".

Lebih lanjut dijelaskan dalam QS at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat di atas secara jelas menegaskan bahwa dalam harta kekayaan seseorang yang dimiliki, terdapat hak orang lain didalamnya dan yang berhak atas harta tersebut di antaranya orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa meskipun mereka tidak meminta-minta. Konsumsi sosial ini ditujukan tidak lain hanyalah untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Selain itu, tercapai juga keadilan distribusi. Dengan demikian, teori keseimbangan konsumsi dapat tercapai.

D. Model Keseimbangan Konsumsi Islam

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keimanan merupakan aspek yang mempengaruhi perilaku konsumsi seorang muslim. Karena aspek inilah yang memengaruhi kualitas dan kuantitas konsumsi seseorang yang dapat memberikan kepuasan bukan hanya kepuasan material, tetapi juga kepuasan spritual.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh konsumen Islam selalu mengutamakan keberkahan dalam setiap transaksinya sehingga tercapai kemaslahatan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Hal ini menjadikan keseimbangan konsumsi dilakukan melalui konsumsi sosial yang utama karena syarat berkah dan maslahah bagi umat Islam.

Keseimbangan konsumsi dalam Islam, tercapai melalui konsumsi pribadi dan konsumsi sosial yang memperhatikan aspek halal dan haram, baik, bersih dan tidak menjijikkan, serta larangan *israf* dan bermegah-megahan.

Di samping itu, keberkahan dan maslahah dalam aktivitas konsumsi sosial memberikan rasa tentram, seimbang dan rasa aman, serta menghindari ketimpangan ekonomi dan sosial karena mampu menghapus sifat dengki dari masyarakat dan tercipta sikap saling menyayangi serta saling tolong menolong. Hal inilah memperlihatkan bahwa ekonomi Islam mencapai tujuannya yaitu ketentaraman atau *falah* melalui keberkahan dan maslahah sebagai tahapannya.

Model keseimbangan konsumsi dalam Islam digambarkan melalui model maslahah atau kesejahteraan yang lebih luas melalui keseimbangan pendapatan nasional. Model keseimbangan pendapatan nasional dalam teori

ekonomi dijelaskan dengan fungsi $Y = C$, dimana Y (*income*) adalah pendapatan dan C (*consumption*) adalah pengeluaran konsumsi. Sedangkan dalam keseimbangan pendapatan nasional dalam Islam dijelaskan dengan fungsi $Y_i = C_d + C_a$, dimana Y_i (*Income*) adalah pendapatan dalam ekonomi Islam, C_d (*Consumption of dunia*) adalah konsumsi untuk kepentingan duniawi dan C_a (*Consumption of akhirat*) adalah konsumsi untuk kepentingan *ukhrawi*. $C_a = C_z + C_{is}$ yang merupakan fungsi dari konsumsi untuk kepentingan akhirat, dimana C_z (*Consumption of Zakat*) adalah konsumsi untuk pengeluaran zakat dan C_{is} (*Consumption of Infaq & Shadaqah*) adalah konsumsi untuk pengeluaran infak dan sedekah.

Jadi keseimbangan pendapatan nasional dalam Islam menjadi:

$$Y = C_d + (C_z + C_{is})$$

Model ini menggambarkan bahwa pendapatan nasional berasal dari konsumsi duniawi dan konsumsi *ukhrawi* yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah yang merupakan konsumsi sosial (C_a). Sehingga untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka perlu peran aktif para pelaku ekonomi (konsumen/*muzakki*) untuk mengoptimalkan penyaluran zakat, infak dan sedekahnya.

Perilaku konsumen (*muzakki*) dipengaruhi oleh keimanan mereka. Sebab semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin banyak konsumsi sosial yang dikeluarkannya. Artinya, keimanan seseorang juga berpengaruh kepada kemanfaatan mereka (*maslahah*) bagi masyarakat terutama para *mustahiq*.

Dalam aktivitas konsumen, baik dalam membeli

maupun dalam penggunaan barang/jasa, diikat oleh hak dan kewajiban, di antaranya hak untuk melakukan pilihan, didengar, mengonsumsi dengan aman dan *privacy* (hak perlindungan pribadi). Di samping itu, kewajiban konsumen mencakup di antaranya menjaga keseimbangan dalam mengonsumsi dalam bentuk kewajiban sosial (tanggung jawab), mendukung pembangunan bangsa dan merawat kelestarian lingkungan.

Pada kenyataannya, segala tingkah laku ekonomi memiliki dampak pada pemanfaatan produk/jasa lainnya yang terkait, baik dari segi harga, kuantitas, maupun kualitas, sehingga setiap keputusan yang diambil memengaruhi penggunaan produk/jasa lainnya. Beberapa hubungan antar produk/jasa yang satu dengan lainnya adalah:

1. Hubungan Antarproduk

Dalam teori ekonomi, hubungan antara produk yang satu dengan lainnya dipengerahui oleh beberapa faktor, termasuk di antaranya harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling terkait yang juga memepengaruhi penggunaannya, yaitu substitusi (saling mengganti, seperti kopi dan teh), komplementer (saling melengkapi, seperti kopi dan gula), dan independen (tidak ada hubungan, seperti kopi dan handphone).

2. Hubungan Substitusi

Produk yang memiliki hubungan substitusi merupakan pilihan konsumsi yang dapat menggantikan pilihan produk lainnya karena memiliki fungsi kegunaan yang sama dengan yang dikonsumsi. Hubungan substitusi ini adalah negatif. Artinya, jika jika konsumen menambah konsumsi suatu



produk, maka kuantitas permintaan produk lain akan berkurang. Karena sifat produk tersebut sebagai pengganti produk lainnya. Banyak hal mengapa konsumen memilih produk yang dikonsumsi sebagai pengganti, seperti harga, ketersediaan produk, preferensi orang lain dan lainnya. Produk substitusi atau pengganti seperti kopi dengan teh, minyak dengan gas, dan lain-lain.

Dalam hubungan substitusi suatu produk memiliki tingkatan, yaitu:

3) Hubungan substitusi sempurna

Substitusi sempurna suatu produk terjadi jika produk pengganti dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan produk lainnya, tanpa sedikitpun mengurangi fungsi penggunaannya dalam konsumsi. Misalnya, produk gula pasir. Produk tersebut (gula pasir) yang dikonsumsi oleh konsumen tidak dipilih berdasarkan pabrik mana yang memproduksi gula pasir tersebut, sebab konsumen tidak menemukan perbedaan mendasar dalam kepuasan mengonsumsi gula pasir tersebut.

4) Hubungan substitusi dekat

Substitusi dekat suatu produk terjadi jika produk tersebut dapat menggantikan produk lainnya, tetapi terdapat perbedaan dalam hal kepuasan sebagai akibat mengonsumsi produk tersebut. Misalnya, produk rokok yang rutin dikonsumsi, kemudian diganti dengan merek rokok yang lain, meskipun memberi kepuasan dalam mengonsumsi rokok tersebut, tetapi tingkat kepuasannya tidak sama dengan ketika mengonsumsi rokok yang biasa atau rutin dikonsumsi.

5) Hubungan substitusi jauh

Substitusi jauh suatu produk merupakan produk pengganti yang mengandung unsur keterpaksaan dalam mengonsumsinya. Misalnya, produk roti. Produk roti dapat menjadi alternatif pengganti fungsi nasi, tetapi produk tersebut tidak dapat menggantikan fungsi nasi sebagai menu utama dalam konsumsi harian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

6) Hubungan Komplemen

Seperti halnya dalam substitusi, produk komplemen memiliki hubungan dengan produk lainnya. Bentuk keterkaitan produk komplemen antara satu dengan lainnya adalah pelengkap atau adanya kemungkinan sebagai tambahan dari produk yang dikonsumsi. Contoh, ketika seseorang mengonsumsi produk kopi, maka produk gula menjadi kemungkinan komplemen dari kopi. Arti dari 'kemungkinan' menunjukkan derajat komplementaritas dari produk tersebut. Jadi gula bisa merupakan produk komplemen dari kopi, tetapi juga bisa jadi gula bukan merupakan pelengkap dari kopi, karena sebagian orang meminum kopi tanpa gula. Hubungan komplementer dalam sebuah produk adalah positif. Jika permintaan konsumsi terhadap kopi meningkat, maka umumnya akan diikuti dengan meningkatnya jumlah permintaan konsumsi terhadap gula pasir.

Seperti halnya hubungan substitusi, hubungan komplementer ini juga memiliki tingkat komplemen yang berbeda, satu dengan lainnya. Permintaan produk komplemen ini dipengaruhi oleh sifat produk tersebut terutama mengenai kegunaan produk yang bersangkutan. Tingkatan komplementaritas produk meliputi:

a) Hubungan komplementaritas sempurna

Hubungan komplementaritas sempurna antar produk terjadi ketika produk yang dikonsumsi tidak berguna jika tidak mengikuti produk komplementernya. Produk tersebut menjadi keharusan yang menyertai produk yang dikonsumsi, misalnya kendaraan bermotor (roda dua/roda empat) tidak bisa tidak harus juga dikonsumsi bahan bakar minyaknya (bensin atau solar).

b) Hubungan komplementaritas dekat

Hubungan komplementaritas dekat suatu produk terjadi ketika seseorang mengonsumsi suatu produk dan kemungkinan besar produk lainnya ikut dikonsumsi. Misalnya ketika seseorang membeli sebuah sepatu, maka produk kaos kaki memiliki peluang untuk dibeli juga, meskipun sebagian orang tidak memerlukan kaos kaki ketika menggunakan sepatu.

c) Hubungan komplementaritas jauh

Hubungan komplementaritas yang jauh suatu produk terjadi ketika produk yang dikonsumsi dapat saling melengkapi tetapi bukan dalam aktivitas yang rutin dilakukan, misalnya pemakaian dasi hanya dilakukan pada kegiatan atau aktivitas tertentu sebagai asesoris pakaian yang digunakan. Begitu juga produk parfum, bagi sebagian orang hanya pelengkap pada aktivitas tertentu saja seperti ke acara-acara besar saja. Komplementaritas jauh merupakan hubungan penggunaan produk yang saling melengkapi tetapi penggunaannya secara bersama tidak dapat diketahui secara pasti.

e) Domain Konsumsi

Hubungan diantara satu produk dan produk lainnya memberikan pilihan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut, terutama hubungan substitusi, yang sifatnya sebagai pengganti menyebabkan konsumen mengorbankan produk lainnya untuk dikonsumsi. Sementara pada hubungan komplemen, yang sifatnya melengkapi sehingga tidak menimbulkan pilihan bagi konsumen karena telah dicantumkan dalam pilihan mengonsumsi produk tersebut. Produk yang pengganti atau sebagai substitusi dianggap sebagai domain konsumsi yang telah menjadi keputusan konsumen.

Beberapa domain konsumsi yang terjadi yaitu:

1. Permintaan dan Penurunan (*Demand and Decrease*)

Domain konsumsi yang dilakukan oleh konsumen antar dua barang substitusi, bagi konsumen muslim dalam memprioritaskan produk yang dikonsumsi mempertimbangkan perolehan mashlahah yang optimal. Dengan demikian, produk yang memiliki kemaslahatan yang tinggi, akan memiliki permintaan yang cukup tinggi juga.

Hukum permintaan dalam teori ekonomi konvensional mengungkapkan bahwa: *“makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.”*

Hal ini memberikan gambaran bahwa harga sangat mempengaruhi suatu permintaan terhadap suatu produk. Dari aspek material terjadi perubahan manfaat, karena berkurangnya pendapatan konsumen sebagai akibat kenaikan harga. Sehingga kenaikan harga ini tidak diikuti

oleh tingkat permintaan atau pembelian yang sama oleh konsumen muslim demi mempertahankan kemaslahatan (fisik dan berkah) yang diterima.

Kemasalahatan dalam permintaan islami, selain kemanfaatan materi, juga non materi seperti keberkahan, keimanan, ketakwaan dan non materi lainnya berdasarkan prinsip syariah, sehingga fungsi permintaan dalam Islam, yaitu:

$$Q_d^i = f(P_x, P_r, I, T, A)$$

Q_d^i merupakan permintaan produk dalam Islam yang dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri ($P_x = \text{Price of product } x$), harga produk lain yang berhubungan dengan produk yang diminta ($P_r = \text{price of product related}$), baik sebagai substitusi maupun komplementer, penghasilan yang diperoleh ($I = \text{Income}$), selera ($T = \text{taste}$) terhadap produk yang diminta dan tingkat keimanan/akidah konsumen ($A = \text{Aqidah}$).

Permintaan islami ini juga memiliki kurva permintaan, yang didasarkan pada jenis produk yang dikonsumsi, seperti:

- (1) Produk halal, yaitu produk yang menurut zatnya dibolehkan untuk dikonsumsi, di antaranya:
 - (a) *Al-Haajat ad-Dhoruriyat (needs)*, yaitu permintaan terhadap suatu produk hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, sehingga seseorang dapat bertahan hidup, sehingga kurva permintaan tersebut adalah inelastis sempurna.
 - (b) *Ar-Roghat at-Tahsiniyyat (wants)*, yaitu permintaan terhadap suatu produk melebihi untuk keinginan fisik, tetapi tidak berlebihan, sehingga kurva permintaannya

bersifat inelastis

- (c) *Hedonistic materialistic*, yaitu permintaan terhadap suatu produk karena ditujukan untuk bermewah-mewah atau berfoya-foya, sehingga bentuk kuva permintaannya adalah inelastis sempurna atau berhimpitan dengan sumbu harga (P), artinya tidak ada yang diminta karena bersifat kemewahan dan kesombongan
 - (d) Ibadah, yaitu permintaan terhadap suatu produk yang beriringan dengan tingkat keimanan seseorang, sehingga kurva permintaannya cenderung positif atau semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin besar jumlah produk yang diminta untuk dikonsumsi.
- (2) Produk haram, yaitu produk yang menurut zatnya mengandung unsur haram, sehingga jumlah permintaannya adalah nol atau tidak adakarena tidak dibolehkan, di antaranya:
- (a) Tidak darurat, membentuk kurva permintaannya menjadi inelastis sempurna atau berdempetan dengan sumbu P (harga), atau jumlah permintaan sama dengan nol (produk haram)
 - (b) Darurat, membentuk kurva permintaannya menjadi *demand point* (titik) karena didasarkan pada kadar keterpaksaan karena kebutuhan hidup dan secara fitrah tergolong produk yang tidak disukai, sehingga dalam mengonsumsinya tidak berlebihan.

Dalam grafik, permintaan terhadap produk yang haram secara syariah dilarang dan terdapat konsekuensi pertanggungjawaban di akhirat kelak, karena mengonsumsi produk haram sama dengan melakukan perbuatan dosa. Di

samping itu, mengonsumsi produk haram memiliki dampak yang merusak, seperti merusak agama karena sudah melanggar syariah, tingkat keikhlasan dan kekhusyukan menjadi berkurang dalam beribadah, akhlak menjadi rusak dan tidak beretika, serta menimbulkan kemerosotan, kesatuan umat terpecah, kesehatan menjadi terganggu, hidup menjadi nista dan hina, dan menimbulkan kegagalan produksi serta kehancuran ekonomi.





PERILAKU PRODUSEN ISLAMI ***(ISLAMIC MANUFACTURER BEHAVIOR)***

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi *(Definition and Scope of Production)*

Konsep produksi dalam Islam memiliki arti yang luas. Islam mementingkan kemashlahatan dalam memproduksi suatu barang, sehingga setiap aktivitas produksi dalam Islam wajib memiliki kemanfaatan bagi kebutuhan manusia. Dengan demikian, tingkat produksi barang mewah tidak boleh berlebihan, karena tenaga kerja dalam memproduksi produk tersebut dianggap tidak produktif. Produksi dalam Islam merupakan aktivitas yang



sudah ada sejak manusia diciptakan di muka bumi ini. Produksi merupakan kebutuhan mendasar untuk kelangsungan hidup dan peradaban manusia di dunia ini.

Produksi memerlukan sumber daya, baik manusia maupun sumber daya alam. Aktivitas produksi merupakan awal mata rantai dari aktivitas distribusi dan konsumsi, karena output dari kegiatan produksi adalah produk atau jasa, yang diterima dan dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa kegiatan ini, maka perekonomian akan mati dan jika kegiatan produksi meningkat maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor produksi merupakan input bagi proses produksi yang menghasilkan output dalam suatu periode tertentu. Teori produksi dalam ekonomi menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam memproduksi suatu produk/jasa ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan bekerja seefisien dan seefektif mungkin. Kepemilikan faktor-faktor produksi tersebut, dalam Islam adalah tidak mutlak, meskipun diakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

Proses produksi terdiri input atau faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi dan manajerial yang kemudian dalam proses transformasi memerhatikan efisiensi (menghindari pemborosan), dan efektivitas (nilai tambah), sehingga tercipta output baik barang ataupun jasa yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh konsumen.

Secara teknis, produksi merupakan aktivitas dalam perusahaan industri atau individu berupa penciptaan nilai tambah dari input menjadi output secara efisien dan efektif sehingga produk sebagai output dari proses penciptaan



nilai tambah dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar global.

Karakteristik sistem produksi yaitu:

- a. Mempunyai komponen-komponen atau elemen—elemen yang saling berkaitan satusama lainnya dan membentuk kesatuan yang utuh yang merupakan komponen struktural (sumber daya).
- b. Memiliki tujuan, berupa menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat yang dapat dijual dengan harga yang kompetitif.
- c. Memiliki aktivitas, berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien.
- d. Memiliki mekanisme yang mengendalikan operasionalnya, berupa pengalokasian sumber daya-sumber daya.

Para ekonom muslim kontemporer mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam secara berbeda meskipun substansi dan outputnya adalah sama, di antaranya:

- a. Menurut al-Haq, produksi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik barang maupun jasa, yang hukumnya wajib (*fardhu kifayah*)
- b. Menurut Rahman, produksi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang menekankan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi produksi.
- c. Menurut Karf, produksi adalah suatu kegiatan atau usaha manusia dalam memperbaiki bukan hanya bentuk material fisiknya saja, tetapi juga morilnya yang merupakan media menuju capaian hidup yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Dalam ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu bentuk keimanan seseorang kepada Allah swt sebagai pencipta semesta alam, seperti yang termaktub secara jelas dalam al-Quran, yaitu: *“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya”*. Lebih lanjut tersirat dalam surah al-Jatsiyah, ayat 13 yaitu:

... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“... Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat ini jelas menyampaikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan termasuk dalam produksi barang dan jasa merupakan salah satu bentuk ikrar dan keyakinan manusia kepada Al-Malik (pemilik), Al-Murabbi (pemelihara), Al-Nashir (penolong), Al-Mushlih (memperbaiki), Al-Sayyid (tuan) dan Al-Wali (wali). Bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik, dan pengendali alam semesta dengan ketetapan-Nya (sunatullah), sehingga produksi dalam Islam bukan semata-mata bertujuan memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi yang lebih utama adalah memaksimalkan keuntungan akhirat, seperti tercermin dalam al-Quran surah al-Qashas ayat 77 yang memerintahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan akhirat dengan tidak menafikan urusan dunia.

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

B. Tujuan Produksi menurut Islam (*Production Objectives According to Islam*)

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan.
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen.

C. Motivasi Produsen dalam Berproduksi (*Motivation of Producers in Production*)

Motivasi produsen dalam berproduksi dalam ekonomi Islam sesuai dengan tujuan produksi yaitu menciptakan mashlahan dengan membantu umat manusia dalam menyediakan kebutuhan material dan spritualnya. Motivasi ini jugalah yang pada akhirnya merupakan tujuan kehidupan produsen yaitu mencari kemasalahatan baik keuntungan maupun keberkahan (Pio, 2014). Keuntungan yang diperoleh di dalam produksi termasuk bisnis lainnya selama tidak melanggar syariah maka aktivitas produsen dalam mencari masalah dapat dicapai. Aktivitas produsen dalam produksi terikat dalam tatanan nilai-nilai Islam.

Tatanan nilai yang berhubungan dengan produksi bersumber dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yakni *khilafah*, *adil* dan *takaful* yang secara lebih rinci, meliputi:

- a. Memiliki wawasan jangka panjang (visi), yang berorientasi ke masa depan;
- b. Berpegang teguh pada janji dan kontrak yang dibuat;
- c. Berlaku jujur dalam takaran, kebenaran, ketepatan, dan kelugasan;
- d. Selalu bertindak dinamis dan disiplin;
- e. Berorientasi kepada produktivitas dan prestasi;
- f. Mengutamakan ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi;
- g. Berwawasan sosial;
- h. Memberikan upah yang layak dan tepat waktu;
- i. Memerhatikan kepemilikan individu;
- j. Bersikap adil dalam setiap transaksi ekonomi;
- k. Mematuhi rukun dan syarat sahnya sebuah akad/transaksi;

- l. Menghindari kegiatan produksi yang diharamkan dalam Islam.

Tatanan nilai Islam inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan keuntungan (maslaha) bagi produsen, sehingga produsen dapat merasakan kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat, karena telah berkontribusi bagi terwujudnya *falah*.

Konsep *falah* merupakan konsep kesejahteraan dalam Islam, baik dalam aktivitas mengonsumsi maupun dalam kegiatan produksi, yang bukan saja terkait dengan hal-hal material saja, tetapi juga terkait dengan non material, serta menghindari apa yang dilarang oleh agama Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas produksi bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia melalui penyediaan kebutuhan hidup yang merupakan output produksi yaitu barang dan jasa. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Ditemukannya kebutuhan konsumen;
- b. Dipenuhinya kebutuhan konsumen;
- c. Dipersiapkannya persediaan barang dan jasa di waktu akan datang;
- d. Dipenuhinya sarana bagi aktivitas ibadah dan sosial.

M. Frank (2003) menyebutkan bahwa aktivitas produksi merupakan suatu kegiatan dalam ilmu ekonomi yang menciptakan utilitas atau manfaat, baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini mengisyaratkan bahwa aktivitas produksi merupakan aktivitas keseharian dan masa akan datang manusia.

Keberhasilan dari produksi ditunjukkan dengan ketercapaian tujuan perusahaan atau produsen (individu)



yaitu menghasilkan keuntungan. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan produksi ditunjukkan dengan ketercapaian keuntungan dan kepuasan, baik di dunia maupun di akhirat.

Di samping itu, keberhasilan produksi, tidak terlepas dari motivasi produksi itu sendiri dan masalah etika serta tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen untuk melakukan kegiatan produksi yaitu insentif keuntungan optimal. Mereka bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini kadang kala menyebabkan produsen bertindak dengan mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya.

Dalam pandangan ekonomi dalam Islam, motivasi produsen seharusnya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk menciptakan *mashlahah*, maka motivasi produsen tentu juga mencari *mashlahah*, dimana hal itu juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Mahdawi (2013) mengungkapkan bahwa mencari keuntungan dalam berproduksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang apa bila masih sejalan dengan hukum Islam.

D. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam

Di kalangan para ekonomi Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi, karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu-Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurut *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena *capital* (modal) bukanlah



merupakan faktor dasar. Menurut An-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu *amal (labor)* dan *capital*. Abu Sulaiman menyatakan, *amal* bukanlah merupakan faktor produksi. Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi (*muamalah*) adalah *ibahah* (diperbolehkan) sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nash atau dalil.

1) Amal/Kerja (*Labor*)

Amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoretis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan

2) Bumi/Tanah (*Land*)

Land (tanah) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya.

3) Modal (*Capital*)

Capital adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, *equipment* (peralatan), gedung, fasilitas kantor, transportasi dan lain sebagainya.

Faktor-faktor produksi dalam Islam ditujukan untuk menyediakan kebutuhan manusia dalam rangka tercapainya *mashlahah* baik materil maupun spritual. Dalam Islam, menekankan kebermanfaatan produk yang diproduksi yang semata-mata memenuhi kebutuhan manusia, baik kepuasan dunia maupun keuntungan akhirat.

Kegiatan pemenuhan kebutuhan ini memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi umat manusia untuk

berupaya mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi tuntutan kehidupan ekonomi. Konsep ekonomi Islam secara jelas memberikan peraturan sebagai landasan rohani bagi manusia, sehingga sifat tamak dan mementingkan diri sendiri dapat dikendalikan.

Sifat alami manusia dalam al-Quran dalam surah al-Ma'arij ayat 19 yang menjadi dasar aktivitas ekonominya adalah:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

“sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.”

Sifat ketamakan manusia menjadikan keluh kesah, tidak sabaran dan kegelisahan dalam memperoleh kekayaan memicu manusia untuk bertindak dalam berbagai kegiatan yang produktif. Ketamakan juga menimbulkan keinginan manusia semakin bertambah untuk dipuaskan sehingga cenderung melakukan aktivitas yang merusak dibanding dengan produksi.

Pemikiran As-Syatibi terkait kebutuhan asasi manusia mencakup:

1. Ad-Din, yaitu terjaganya kehidupan beragama;
2. An-Nafs, yaitu terpeliharanya jiwa;
3. Al-'Aql, yaitu terjaminnya berpikir dan berkreasi;
4. Al-Mal, yaitu terpenuhinya kebutuhan materi; dan
5. An-Nasl, yaitu keberlangsungan meneruskan keturunan.

Kelima kebutuhan dasar manusia ini menjadikan semua pelaku ekonomi dalam aktivitas produksi diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini

memberikan pemahaman bahwa pelaku ekonomi dalam proses produksinya berorientasi untuk mencapai kebutuhan universal dan kebutuhan spiritual.

Keyakinan ini menjelaskan kesempurnaan ajaran Islam dalam firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 3 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

"diharamkan bagimu (mamakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama bagi pelaku ekonomi adalah memperoleh keuntungan materi (uang) yang maksimal, sehingga produsen dianggap sebagai *profit seeker* dan *profit maximize*, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Motivasi inilah yang mengarahkan produsen dalam setiap strategi, konsep dan teknik yang digunakan ditujukan untuk memperoleh keuntungan maksimum, meskipun berkembang saat ini bahwa keuntungan maksimum bukanlah tujuan produsen semata.

Robert L Hetzel (2007) menjelaskan kontribusi Milton Friedman dalam ekonomi bahwa satu-satunya fungsi bisnis yaitu semua kegiatan bisnis ditujukan untuk meningkatkan keuntungan. Keuntungan maksimum merupakan sebuah insentif bagi pelaku bisnis dalam melakukan produksi fungsi inilah yang menyebabkan para pelaku bisnis, meskipun jarang melakukan tindakan pelanggaran hukum, namun seringkali mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Misalnya banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri yang dibuang secara serampangan karena adanya biaya pengolahan limbah yang besar yang memengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Begitu juga terjadi pada penebangan pohon secara liar tanpa memperhitungkan kelestariannya yang akan berdampak pada bencana longsor, banjir dan bencana lainnya yang berakibat pada kerugian pada kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi ini yang menimbulkan kemudharatan, bagi orang lain disebut *eksternalitas negatif*.

Aktivitas ekonomi dalam Konsep Islam disebut juga *Maslahah Maximizer*, yaitu suatu aktivitas mencari pendapatan melalui produksi dan aktivitas bisnis lainnya



selama aktivitas tersebut tidak dilarang dan termaktub dalam rancangan ekonomi Islam yang salah satunya adalah *ma'ad (return)*. Pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan yang tidak eksplotatif (keuntungan di atas normal) yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan semaksimalnya. Masalah *maximizer* adalah tindakan produsen yang memberikan keuntungan maksimal yang dicapai dengan kemasalahatan, baik bagi produsen itu sendiri dan orang lain, maupun bagi lingkungan sekitarnya.

Mufida (2005) mengungkapkan bahwa: “Produsen muslim harus berbeda dari produsen non muslim, tidak hanya dari tujuan, tetapi harus pula dari kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya”. Perbedaan ini ditunjukkan dengan:

- a. Setiap aktivitas produsen muslim harus menghindari seluruh praktik eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan yang ketat.
- b. Setiap aktivitas produsen muslim harus mengikuti kompetisi yang adil, baik sebagai penjual maupun pembeli barang /jasa.
- c. Setiap aktivitas produsen muslim harus menghindari strategi pasar yang dapat menyebabkan timbulnya pasar persaingan tidak sempurna.
- d. Setiap aktivitas produsen muslim tidak melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi yang dilarang menurut syariat Islam.

Di samping itu, aktivitas produsen dalam ekonomi Islam, ditujukan untuk selain kemasalahatan bagi dirinya sendiri, juga aktivitas ekonominya ditujukan untuk kemaslahatan orang lain, baik kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi.



1) Keuntungan, kerja dan tawakal

Aktivitas produsen dalam Islam diarahkan secara proaktif dan positif untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara yang tidak dilarang oleh syariat. Upaya mendapatkan keuntungan adalah konsekuensi dari aktivitas kerja yang produktif, sedang keuntungan merupakan rezeki yang diberikan Allah swt kepada hambanya. Aktivitas kerja adalah sarana mendapatkan penghidupan yang layak dan merupakan kesyukuran atas nikmat Allah swt.

Tawakkal adalah seseorang yang bekerja dan menyerahkan semua hasil kerjanya kepada Allah swt. Dengan berserah diri, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja menyerahkan segala rezekinya kepada Allah swt yang merupakan pemberian dan telah diatur oleh Allah swt.

2) Kegiatan produksi pada masa Rasulullah.

Pada masa Nabi Muhammad saw, perekonomian masyarakat pada saat itu mencapai 178 unit usaha baik dalam industri barang maupun jasa. Unit usaha yang berkembang hingga kini di antaranya:

- a) Industri penerjemahan buku;
- b) Industri perkapalan;
- c) Industri pembuatan alat berburu;
- d) Industri peralatan timbangan;
- e) Industri perumahan;
- f) Industri perhiasan dan kosmetik;
- g) Industri tenun dan pakaian;
- h) Industri mebel;
- i) Industri pembuatan senjata dan peralatan besi;
- j) Industri kesenian dan kebudayaan;
- k) Pekerjaan kedokteran dan kebidanan.



Industri-industri di atas semakin populer dalam bisnis saat ini. Industri ini populer karena mendatangkan keuntungan, sekaligus keberkahan. Kombinasi keduanya merupakan masalah yang didapatkan oleh produsen sehingga bisnisnya dapat *survive* (bertahan hidup).

Semangat produksi dalam mendapatkan masalah perlu ditunjang dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam, yaitu sebagai amanah untuk menghasilkan masalah, sebagai pembelajaran efisiensi sepanjang waktu dan sebagai profesionalisme di bidang masing-masing.

Profesionalisme dalam Islam harus dilihat sebagai faktor produksi bahwa fungsi manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna, yang memiliki, baik unsur materi maupun rohani yang saling melengkapi. Di samping itu, prinsip-prinsip produksi diarahkan sebagai:

- Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkannya dengan amal dan ilmu pengetahuan;
- Penggunaan metode ilmiah dalam bidang produksi, melalui penelitian, eksperimen dan analisis ilmiah sebagai hasil karya ilmu pengetahuan dalam mendorong kemajuan bidang produksi.
- Kemampuan dan keinginan manusia dalam teknik dan teknologi produksi, sesuai sabda Rasulullah saw:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

- Memberikan kemudahan dalam bereksperimen dan berinovasi dalam bidang produksi untuk



mengoptimalkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

Islam juga mengarahkan bidang produksi sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu:

- a) Proses produksi barang/jasa memenuhi kaidah halalan toyyiban.
- b) Memelihara ketersediaan dan keserasian sumber daya alam, termasuk menghindari kerusakan di muka bumi ini yang umumnya diakibatkan dari polusi dan limbah pabrik.
- c) Tujuan produksi untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat.
- d) Produksi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas fisik, mental maupun kualitas spritual.
- e) Produksi tidak lain diupayakan untuk menjamin kemandirian umat manusia.

Muhammad Abdul Mannan (1992) menyatakan bahwa perilaku produksi tidak sekedar memenuhi permintaan pasar, tetapi juga memerhatikan kemaslahatan. Sedang dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen hanya ditujukan untuk mencari keuntungan semata, bahwa produsen adalah seorang *profit maximer* dan juga *profit seeker*. Akibatnya, produsen seringkali mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya.

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun di larang dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni

semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak jaman Renaisans, suatu jaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepada logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.

Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Segala hal perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya dalam persaingan sesuai aturan yang ada tanpa adanya kecurangan dan penipuan/pemalsuan.

Dalam skala internasional, etika dan tanggung jawab sosial merupakan masalah yang serius, misalnya terkait dengan negara-negara pengimpor kayu yang merupakan hasil curian dalam jumlah besar dari negara penghasil kayu dunia termasuk Indonesia. Perekonomian negara-negara maju berkembang dengan pesat dengan pelanggaran *legal logging* yang mampu menekan biaya produksi dalam jumlah signifikan. Meskipun tidak melanggar secara hukum formal, karena tidak adanya legislasi di negara maju, maka secara etis dan tanggung jawab sosial dibolehkan dalam mengonsumsi kayu haram tersebut.

Namun demikian, tindakan tersebut merugikan



negara-negara penghasil kayu dan terjadilah pelanggaran etika. Hal ini memperlihatkan bahwa seringkali dengan tujuan memaksimalkan keuntungan berdampak pada kerugian pihak lain, termasuk diri sendiri. Perilaku produsen dalam Islam adalah masalah maximize, yaitu menghasilkan keuntungan dengan kegiatan yang tidak dilarang dalam syariat Islam, terutama dalam memproduksi kebutuhan material dan spritual.

E. Prinsip-Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam

Prinsip produksi dalam ekonomi Islam juga meruapakan keyakinan kepada Allah swt sebagai Rabb dari semesta alam, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Jatsiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip-prinsip produksi diarahkan kepada:

- 1) Fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertujuan memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Sifat *Rahman* dan *Rahiim* yang dimiliki Allah swt melandasi tugas manusia dalam memanfaatkan bumi dan langit beserta segala isinya.
- 2) Hasil karya manusia dalam ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari al-Quran dan sunnah, meskipun metode ilmiah telah digunakan melalui eksperimen,

penelitian dan perhitungan ilmiah lainnya.

- 3) Keinginan dan kemampuan manusia diserahkan sepenuhnya kepada manusia, sebagaimana nabiullah bersabda: “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”
- 4) Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja dan berbuat, serta bertindak berhati-hati dalam bereksperimen dan berinovasi dengan tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta pasrah kepada Allah swt segala urusan baik yang berjalan dengan kemudahan maupun yang dalam kesulitan, karena tawakkal kepada Allah swt. liq (2015) menuturkan bahwa “tawakkal dan sabar adalah konsep penyerahan kepada Allah swt sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal”.

Beberapa permasalahan ekonomi yang sering ditemui oleh produsen, di antaranya:

- a. Apakah jenis barang yang akan diproduksi
- b. Bagaimana proses produksi barang yang diproduksi
- c. Konsumen siapa yang ingin dituju dalam produksi

Sedangkan pada sisi konsumen, juga terdapat permasalahan ekonomi yaitu terbatasnya alat pemuas konsumen, dibanding kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka konsumen wajib menyusun skala prioritas. Faktor-faktor yang memengaruhi skala prioritas adalah tingkat penghasilan atau pendapatan, status sosial seseorang dan faktor lingkungan lainnya.

Kemajuan teknologi dalam teknik dan komputerisasi

yang mengakibatkan kehilangan kesempatan kerja. Kemajuan ini juga memberikan perubahan dalam sistem produksi dari efisiensi tenaga kerja ke efisiensi modal. Jummy (2010) mengatakan bahwa produksi yang semula memerlukan tenaga kerja untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, beralih ke mesin dan komputer yang menyebabkan kegiatan produksi menghilangkan kesempatan kerja dengan sistem efisiensi modal.

Upaya dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran disebut sistem ekonomi. Terdapat beberapa sistem ekonomi, di antaranya:

- 1) Sistem ekonomi tradisional yang merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dalam aktivitas dan aturan-aturannya, dengan ciri-ciri:
 - a) kehidupan bermasyarakat hidup dengan berkelompok secara kekeluargaan,
 - b) lahan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sumber kehidupan,
 - c) pembagian kerja belum ada dalam proses produksi,
 - d) perdagangan masih berbentuk barter,
 - e) aktivitas ekonomi sesuai hanya dengan kebutuhan manusia saja.
- 2) Sistem ekonomi komando yang merupakan aktivitas ekonomi yang berpusat pada sistem sentralisasi, dengan ciri-ciri:
 - a) Semua peralatan dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara,
 - b) Kepemilikan perorangan tidak diakui,
 - c) Semua regulasi perrekonomian diatur oleh negara,

- d) Sudah memiliki pembagian kerja tetapi diatur oleh negara,
 - e) Kesempatan kerja diatur oleh negara.
- 3) Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh swasta, sedang negara hanya mengawasi jalannya perekonomian, dengan ciri-ciri:
- a) Pengakuan terhadap kepemilikan swasta terhadap peralatan dan sumber produksi,
 - b) Masyarakat diberikan kebebasan mengatur peralatan dan sumber ekonominya,
 - c) Persaingan antar pengusaha terjadi,
 - d) Adanya pembagian antara pengusaha sebagai pemilik faktor produksi dan buruh sebagai salah satu faktor produksi.
- 4) Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi pasar dan komando, dengan ciri-ciri:
- a) Alat produksi vital dikuasai oleh negara,
 - b) Alat produksi alternatif dapat dikelola oleh swasta,
 - c) Perekonomian dijalankan bersama antara negara dan swasta,
 - d) Kepemilikan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

F. Formulasi Permasalahan Ekonomi

Aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Setiap aktivitas ekonomi mengalami permasalahan tersendiri. Adapun permasalahan ekonomi bagi produsen, di antaranya:

- a. *Menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi (what to produce)*. Karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat diproduksi. Suatu masyarakat ekonomi harus menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, barang dan jasa mana yang akan diprioritaskan, barang dan jasa apa yang akan diproduksi kemudian, serta barang dan jasa apa yang tidak dapat diproduksi. Ini merupakan masalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada (sumber daya alam, manusia, dan modal) ke dalam berbagai sektor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b. *Menentukan cara barang diproduksi (how to produce)*. Metode produksi atau teknologi mana yang akan digunakan ? Di sini, diperlukan penggunaan metode produksi atau teknologi yang paling efisien, artinya yang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa dengan pengorbanan (atau biaya) yang paling rendah. Ilmu ekonomi memandang teknologi sebagai faktor penting dalam proses produksi. Namun, masih banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan, seperti skala produksi, kemampuan manajerial, iklim, kemampuan finansial, dan sikap mental.
- c. *Menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi (to whom)*. Salah satu masalah ekonomi tentang bagaimana hasil produksi dibagikan adalah masalah tentang keadilan dan pemerataan distribusi. Bagaimana memberi balas jasa atas warga yang



bekerja lebih banyak daripada yang lainnya. Masalah distribusi juga terkat dengan pertanyaan bagaimana memberi jaminan kepada sebagian warga yang mendapatkan hasil produksi di dalam ekonomi, sekalipun tidak ikut memproduksi seperti anak-anak sekolah dan orang tua jompo. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat yang bersangkutan. Bagi masyarakat egaliter, keadilan berarti setiap individu berhak mendapatkan barang dan jasa secara adil dalam jumlah yang sama, tetapi bagi masyarakat utilitarian yang dimaksud dengan adil adalah pembagian barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sedangkan permasalahan ekonomi bagi konsumen terlihat pada keputusan dalam memuaskan kebutuhan mereka. Kebutuhan hidup manusia itu banyak sekali dan beraneka ragam, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Kenyataan inilah yang menjadi inti masalah ekonomi. Masalah ekonomi dihadapi oleh umat manusia, apakah mereka sebagai perseorangan, keluarga, perusahaan, atau negara.

Di satu sisi, masalah produsen adalah kelangkaan (*scarcity*) dalam mendapatkan faktor-faktor produksi atau sumber daya. Scarcity merupakan suatu situasi yang memperlihatkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Kelangkaan inilah merupakan inti masalah ekonomi. Penyebab terjadinya kelangkaan adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan ketersediaan sumber daya alam atau

faktor produksi yang berhubungan dengan bahan baku material,

- b) Keterbatasan yang terjadi karena sebagian besar telah terjadi kerusakan lingkungan,
- c) Keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam,
- d) Keterbatasan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk atau meningkatnya kebutuhan manusia sedang pemenuhannya terbatas.

Suatu aktivitas dalam mengatasi kelangkaan dapat dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya alam, menciptakan pemenuhan alternatif kebutuhan, dan memelihara sumber daya alam. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem ekonomi yang ada, yang merupakan paduan berbagai cara atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa, di antaranya:

- a) produsen adalah kreator dan desainer dalam penciptaan barang/jasa,
- b) produsen yang memilih dan mengkombinasikan faktor produksi dan penggunaan teknologi secara efisien,
- c) produsen yang menentukan lokasi dan tata letak mesin dalam proses produksi,
- d) produsen memproduksi dengan meningkatkan daya guna barang/jasa dan persediaan barang/jasa untuk kepentingan umum,
- e) Produsen mendistribusikan barang/jasa untuk konsumen.

Dalam ekonomi konvensional, produsen adalah pelaku



ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan atau dijual ke konsumen, sedang produksi adalah aktivitas produsen untuk menciptakan dan meningkatkan daya guna suatu barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, produksi adalah *flow concept* dari kegiatan yang diukur dari sejumlah barang/jasa yang diproduksi dalam periode tertentu, dan kualitas barang/jasa yang diproduksi tidak berubah.

Seorang produsen dalam aktivitas atau proses produksinya memiliki keputusan dalam mencapai tujuannya, yaitu jumlah barang/jasa yang harus diproduksi dan bagaimana input (faktor-faktor produksi) yang digunakan dalam proses produksi.

Setiap proses produksi memiliki landasan teknis yang disebut dengan fungsi produksi, yaitu suatu persamaan atau fungsi yang menunjukkan hubungan teknis atau fisik antara jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan dengan output produk yang diproduksi dalam satuan waktu, tanpa memerhatikan harganya.

Tahap produksi dilakukan melalui mengetahui keinginan pasar (konsumen) di tahap awalnya, kemudian mendesain barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. selanjutnya melakukan upaya-upaya dalam proses produksi secara efisien dan efektif yang sesuai dengan desain produk. Selain itu, tahap berikutnya adalah melakukan peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan keterbatasan faktor produksi yang dimiliki, memperhatikan penambahan input, total produk, produk rata-rata dan produk marjinal, serta hukum *the law of diminishing return*.

Dalam produksi barang/jasa dilakukan dengan maksud



untuk:

- a) terpenuhinya kebutuhan manusia yang beragam, dengan kegiatan produksi barang dan jasa.
- b) tercapainya peningkatan penghasilan atau laba dengan memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen.
- c) terjaganya kelangsungan hidup perusahaan.
- d) Terpenuhinya standar mutu dan jumlah produksi, untuk memuaskan keinginan konsumen, melalui eksperimen dan penelitian.
- e) Terpenuhinya kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri.
- f) Tercapainya peningkatan kemakmuran dan perluasan lapangan usaha.

G. Formulasi Mashlahah bagi Produsen (*Formulation of Mashlahah for Producers*)

Mashlahah bagi produsen terdiri dari dua unsur, yaitu kemanfaatan (fisik dan nonfisik) dan keberkahan. Kemanfaatan dalam perspektif produsen berupa profit atau keuntungan materiil (*maal*). Mashlahah lainnya berupa kemanfaatan fisik suatu produk, intelektual dan sosial. Formulasi masalah pada produsen yaitu:

$M = \pi + B$, dimana M adalah mashlahah yang merupakan penjumlahan dari keuntungan (π) yang diperoleh dan keberkahan (B). Baik produsen maupun konsumen menggunakan proksi yang sama dalam mengidentifikasi mashlahah yakni adanya pahala pada produk atau aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi.

Keuntungan yang diperoleh (π) adalah selisih antara total pendapatan (total revenue/TR) dikurangi dengan total biayanya (total cost/TC) sehingga $\pi = TR - TC$.

Sehingga keberkahan yang diperoleh merupakan hasil yang didapatkan dari penerapan nilai dan prinsip Islam dalam kegiatan produksi. Penerapan ini biasanya menambah biaya ekstra yang relatif cukup besar dibanding dengan mengabaikan nilai dan prinsip Islam tersebut.

Pada dasarnya, keberkahan yang diperoleh adalah kompensasi yang secara tidak langsung didapatkan oleh produsen (berkah revenue/BR) yang dikurangi dengan biaya (berkah cost/BC) untuk memperoleh keberkahan tersebut, dengan persamaan sebagai berikut:

$$B = BR - BC$$

Persamaan di atas yang merupakan keberkahan (B) diasumsikan bernilai nol atau secara inderawi tidak dapat diamati disebabkan keberkahan itu sendiri secara tidak langsung berwujud material. Sehingga mashlahah didefinisikan dalam persamaan menjadi:

$$M = TR - TC - BC$$

Persamaan di atas diekspresikan keberkahan atau berkah cost (BC) sebagai pengurang. Secara logis tercermin dari keberkahan yang kehadirannya dicari dan diusahakan sehingga menimbulkan biaya ekonomi atau biaya keuangan dalam mendatangkan keberkahan tersebut. Misalnya, penggunaan kayu dengan *legal logging* yang merupakan penerapan nilai dan prinsip Islam yaitu *halalan thoyyiban* dalam produksi, yang segala aktivitas produksi yang dilakukan menggunakan faktor-faktor produksi (input) yang halal dan baik. Meskipun ilegal logging memberikan keuntungan yang maksimal dibanding dengan legal logging, yang harganya cenderung lebih mahal sebagai tambahan biaya untuk legalitas kayu bersangkutan, tetapi produsen



muslim rela mengeluarkan biaya yang mahal tersebut untuk membeli kayu legal demi mendapatkan keberkahan.

Produsen muslim ini cenderung rela menghabiskan beban yang lebih mahal karena keyakinan bahwa tindakan tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah swt. dalam bentuk pahala yang diterima kelak di akhirat, dan berkah di dunia dengan mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan bagi produsen itu sendiri pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor produksi yang dimanfaatkan oleh produsen muslim. Keberkahan yang diperoleh yang bersumber dari tenaga kerja akan meningkatkan etos kerja, produktivitas dan loyalitas dari sumber daya manusia yang digunakan. Dampak lain dari keberkahan adalah akan terciptanya citra positif produsen di mata konsumen sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh karena meningkatnya jumlah permintaan konsumen terhadap barang/jasa yang diproduksi.

Selain itu, keberkahan duniawi dapat berbentuk kebaikan dan kemanfaatan yang diterima dari konsumen secara keseluruhan. Meskipun dalam kasus ilegal logging di atas memberikan keuntungan maksimal untuk bahan industri mebel, namun hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap lingkungan sekitar seperti kerusakan hutan yang semakin luas yang akan menyebabkan krisis sumber daya dan akan menimbulkan berbagai bencana berupa pemanasan global, banjir, tanah longsor, punahnya satwa dan tumbuh-tumbuhan, serta kerugian materialnya yang tidak dapat diperhitungkan jumlahnya.



Jadi, meskipun produsen memperoleh keuntungan yang maksimal dari pemanfaatan kayu yang ilegal logging, namun masyarakat harus menerima konsekuensi yang lebih mahal dengan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh ilegal logging. Sebaliknya, ketika produsen muslim memanfaatkan kayu yang halal dan thoyyiban, maka dampak bencana yang kemungkinan akan terjadi dapat dikurangi. Konsekuensi lainnya adalah biaya yang lebih mahal namun sebanding dengan kebermanfaatan yang akan diperoleh masyarakat secara keseluruhan.

Timbulnya biaya keberkahan (berkah cost/BC) merupakan implikasi aktivitas produksi yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam dan berdampak pada peningkatan harga barang/jasa yang diproduksi oleh produsen. Harga jual barang tersebut yang mengakomodir biaya keberkahan menjadikan fungsi harga menjadi:

$$BP = P + BC$$

Persamaan di atas merupakan harga jual yang memberikan keberkahan dalam produsen, sehingga formulasi masalah berubah menjadi:

$$M = BTR - TC - BC$$

Persamaan di atas akhirnya dapat memberikan pedoman yang dipergunakan oleh produsen untuk memaksimalkan kemaslahatan atau disebut juga dengan *optimum mashlahah condition* (OMC), dengan rumus:

$$BP\delta Q = \delta TC + \delta BC$$

Persamaan di atas menggambarkan bahwa OMC dapat terjadi ketika jumlah dari unit yang diproduksi ($BP\delta Q$) sama dengan perubahan biaya total yang terjadi (δTC) yang

ditambahkan dengan perubahan biaya keberkahan (δBC) pada unit yang diproduksi. Jika perubahan unit yang diproduksi ($BP\delta Q$) lebih besar dibanding dengan penjumlahan biaya pengeluaran dan biaya keberkahan, maka tercapai kondisi mashlahal yang optimum, sehingga produsen tidak akan menambah produksi lagi.





BAB XI

PERAN DAN MEKANISME PASAR (*ROLE AND MARKET MECHANISM*)

A. Pasar pada Masa Rasulullah (*Market at The Time of The Prophet*)

Pasar pada masa Rasulullah Muhammad saw memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Bahkan, beliau dikenal sebagai pebisnis tulen yang sukses. Seperti diketahui, Nabi ketika berusia tujuh tahun telah mengikuti pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan bisnisnya pertama kali. Semenjak dari negeri Syam inilah, jiwa bisnis Rasulullah berkembang dan

seiring dengan bertambahnya usia, beliau semakin giat berbisnis dengan modal sendiri atau dengan bermitra dengan orang lain.

Mudharabah atau syirkah merupakan sistem kemitraan yang populer pada waktu tersebut. salah satu mitra bisnis Rasulullah adalah Khadijah yang merupakan pengusaha yang cukup disegani pada saat itu. Hamsyari (1985) mengungkapkan bahwa Rasulullah dengan membawa modal dari khadijah seringkali terlibat bisnis ke luar negeri seperti ke negeri Syam, Suriah, Yaman dan negara lainnya. Keberhasilannya dalam berbisnis, tidak lepas dari profesionalisme beliau yang selalu menjunjung tinggi kejujuran sehingga mendapat gelar al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya.

Setelah diangkat menjadi Rasul Allah swt, Nabi Muhammad saw tidak lagi sebagai pebisnis yang aktif, sebagai akibat perjuangan dakwahnya menjadi prioritas dalam menyebarkan agama Islam pertama kalinya di Mekkah dan mendapatkan banyak teror dari masyarakat termasuk keluarga yang masih kafir. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah peran beliau dalam perekonomian mulai kembali dengan menjadi *muhtasib* atau pengawas pasar di Madinah agar tetap sesuai dengan perintah Allah swt dan menghindari apa yang dilarang-Nya.

Pada periode tersebut, mekanisme harga pasar diserahkan pada kekuatan pembeli dan penjual. Beliau menolak mengatur harga pasar dengan kebijakan, meskipun pada saat itu terjadi lonjakan harga yang murni berasal dari kekuatan permintaan dan penawaran di Madinah, namun tidak diikuti dengan dorongan monopolistik. Menurut beliau, kebijakan penetapan harga bisa berarti tidak



menghormati pasar, dan hal itu dilarang. Ketika itu, para sahabat berkata:

يا رسول الله حدد الثمن لنا!. أجاب الله سبحانه وتعالى هو حقاً
محدد السعر ، حامل ، معطي أيضاً ثروة معطي. أمل أن ألتقي
بربي حيث لا يقاضيني أحدكم على ارتكاب أخطاء في المشاكل
الدم والكنز

"Wahai Rasulullah tentukan harga untuk kita!". Rasulullah menjawab: "Allah swt sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapnkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta."

Hadis di atas menjelaskan bahwa pasar adalah termasuk sunnatullah atau hukum alam yang wajib dijunjung tinggi. Secara individu, tidak ada seorang pun yang bisa memengaruhi pasar. Sebab, pasar merupakan kekuatan kolektif sebagai ketentuan Allah swt. Enginer (19990) menyatakan bahwa harga pasar yang dilanggar, misalnya dengan penentuan harga pasar dengan alasan dan cara yang tidak baik, dapat menjadi ketidakadilan (*injustice/zulm*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt. Begitu juga jika penjual menetapkan harga jual yang adil, diumpamakan seperti jihad fii sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah swt., sebaliknya, jika penetapan harganya dilakukan dengan motif aniaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar kepada allah swt. Rasulullah saw ketika melihat seorang anak laki-laki berdagang makanan dengan harga yang melampaui harga pasar, beliau bersabda:



الأشخاص الذين يأتون لجلب البضائع إلى هذا السوق هم مثل الجهاد في سبيل الله ، بينما الأشخاص الذين يرفعون الأسعار (يتجاوزون أسعار السوق) هم مثل الذين كفروا بالله

“Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melibihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.”

Islam memberi penghargaan kepada perniagaan yang dilakukan dengan baik dan suka sama suka (*mutual goodwill/antaradin minkum*). Mekanisme pasar ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa nilai moralitas dalam mekanisme pasar wajib ditegakkan agar tercapai '*antaradin minkum* bagi pelaku pasar baik dari permintaan maupun penawaran.

Saat ini, penentuan harga pasar tergantung mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga pasar. Bahkan Rasulullah saw tidak berani melakukan kebijakan penetapan harga, karena

dianggap sebagai sepihak dari mekanisme pasar yang terjadi. Nilai moralitas secara khusus mendapat perhatian dalam pasar persaingan sempurna, karena menimbulkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Nilai ini mempunyai akar yang kuat dalam ajaran Islam. Rasulullah saw dengan tegas menetapkan larangan terhadap praktik bisnis yang mengganggu mekanisme pasar yang islami.

B. Pasar bagi Kaum Muslim (*Markets for Muslims*)

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki jumlah muslim terbanyak dan merupakan bangsa yang terdiri dari kepulauan dengan penghidupan dari sumber agraris. Saat ini, Indonesia memiliki permasalahan sosial dan ekonomi yang semakin meresahkan, seperti kesempatan kerja yang mulai berkurang, biaya kesehatan dan pendidikan semakin mahal, diikuti dengan beban hidup yang semakin bertambah. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat, sementara tingkat inflasi turut meningkat dan transaksi riba terjadi setiap harinya, yang secara keseluruhan menurunkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

Kondisi ini, mengarahkan umat muslim untuk berusaha melakukan usaha aktif dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki melalui ilmu dan amal yang sesuai ajaran Islam. Di samping itu, umat muslim nusantara secara bersama mengupayakan mengembalikan kekuatan mekanisme pasar dan menghindari transaksi riba dan kapitalisme. Tidak dapat dipungkiri, sistem riba dan kapitalisme telah gagal dalam membangun peradaban.

Masyarakat muslim Indonesia cenderung memerhatikan pembangunan masjid sebagai sesuatu hal yang mendasar. Mereka melupakan bahkan mungkin tidak



sedikitpun berpikir tentang membangun pasar. Pasar yang terdiri atas kekuatan permintaan dan penawaran secara kolektif tanpa campur tangan pemilik modal maupun pemerintah merupakan kekuatan ekonomi umat muslim.

Bercermin dari sejarah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, yang diikuti berikutnya dengan membangun pasar bagi umat muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad saw secara tegas dengan tindakan yang nyata menjadikan pasar sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa adanya pembagian, penarikan pajak ataupun redistribusi, bahkan tanpa penarikan uang sewa.

Hal ini terjadi juga pada masa khulafah rasyidin, yang dimulai dengan Umar bin al-Khattab ra yang memberi perhatian yang besar terhadap masjid dan pasar dalam setiap perencanaan pembangunan. Umar memerintahkan agar setiap pelosok kota dibangun masjid sebagai pusat ibadah dan keilmuan, serta membangun pasar sebagai pusat perdagangan. Umar bin al-Khattab ra memerintahkan untuk mendirikan pasar di setiap tempat tinggal yang dihuni umat muslim dan perhatiannya mulai dari perencanaan pendiriannya, pengelolaannya hingga pada pengawasannya.

Kegiatan rutin Umar dalam pengelolaan dan pengawasan pasar dengan berkeliling di pasar-pasar untuk melihat secara langsung transaksi yang terjadi di pasar. Meskipun seorang khalifah, Umar sering berkeliling sendiri di pasar-pasar dan beliau selalu membawa tongkat untuk menyelesaikan perselisihan atau penyimpangan dengan menghukum orang yang melakukan aniaya (Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqat al-Qubra* 5/43-44, Ibnu Hajar, *al-Ishabah* 4/143, Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanzu al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa*



al-Af'al 5/815). Umar menunjuk para muhtasib atau pegawai yang mengawasi pasar (Ibnu Abdul Barr, Al-Isti'ab 4/341), Ibnu Hizam, Al-Mahalla 8/527, Ibnu Hajar, al-Ishabah 8/202).

Muhammad saw bersabda: "Pasar-pasar harus mengikuti sunnah yang sama dengan masjid, siapa yang mendapat tempat duluan dia berhak duduk sampai dia berdiri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan perdagangannya (suq al Muslimun ka musalla al Muslimun, man sabaqa ila shain fahuwa lahu yawmahu hatta yadaahu)" (Al Hindi, Kanz al Ummal, V 488 no. 2688). Hadis ini menjelaskan tentang fungsi pasar yang sama dengan masjid.

Hadis lain menyebutkan Ibrahim ibnu Mundhir al Hizami meriwayatkan dari Abdullah ibn Ja'far bahwa Muhamad ibn Abdullah ibn Hasan mengatakan bahwa: "Rasulullah shallallahu alaihi wassalam memberi kaum Muslimin pasar sebagai sedekah (tasadaqa ala al Muslimin bi aswaqihim)" (Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 304). Hadis ini mengungkapkan tentang sedekah sehingga tidak ada kepemilikan pribadi.

Riwayat lain dijelaskan oleh Ibnu Zabala meriwayatkan dari Khalid ibnu Ilyas al Adawi mengatakan bahwa: "Surat Umar ibnu Abdul Azis dibacakan kepada kami di Madinah, yang menyatakan bahwa pasar adalah sedekah dan tidak boleh ada sewa kepada siapa pun" (As-Samhudi, Wafa al Wafa, no. 749). Hadis ini mengisyaratkan bahwa keberadaan penjual di pasar tanpa dikenakan biaya atau uang sewa.

Hadis lain juga menjelaskan dalam Ibrahim al Mundhir meriwayatkan dari Ishaq ibn Ja'far ibn Muhamad dari Abdullah ibn Ja'far ibn al Miswat, dari Syuraih ibn Abdullah ibn Abi Namir bahwa Ata ibn Yasar mengatakan bahwa:

“Ketika Rasulullah SAW ingin membuat sebuah pasar di Madinah, beliau pergi ke pasar Bani Qainuqa dan kemudian mendatangi pasar Madinah, menjejakkan kaki ke tanah dan bersabda: Inilah pasar kalian. Jangan membiarkannya berkurang (*la yudayyaq*) dan jangan biarkan pajak apa pun (*kharaj*) dikenakan” (Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 304). Hadis ini secara gamblang menjelaskan bahwa keberadaan pasar murni tanpa adanya penarikan pajak yang dilakukan baik oleh individu, sekelompok orang, atau pemerintah.

Dalam riwayat lain, dijelaskan oleh Ibnu Zabala meriwayatkan dari Hatim ibn Ismail bahwa Habib mengatakan bahwa: “Umar Ibn Khattab (pernah) melewati Gerbang Ma'mar di pasar dan (melihat) sebuah kendi diletakkan dekat gerbang dan dia perintahkan untuk mengambilnya. Umar melarang orang meletakkan batu pada tempat tertentu atau membuat klaim atasnya (*an yuhaijjir alaiha aw yahuzaha*)” (As-Samhudi, Wafa al Wafa, 749). Hadis ini menyebutkan bahwa pasar terjadi bukan karena adanya yang pesan atau mengkalim tempat dalam pasar tersebut.

Selain itu, Ibnu Shabba meriwayatkan dari Salih ibn Kaysan bahwa: “... Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: Inilah pasar kalian, jangan membuat bangunan apa pun dengan batu (*la tatahajjaru*) di atasnya dan jangan biarkan pajak (*kharaj*) dikenakan atasnya” (As-Samhudi, Wafa al Wafa, 747-8). Hadis ini meriwayatkan keberadaan pasar yang tidak diperkenankan membangun toko-toko. Hadis ini diperkuat dengan Abu Rijal meriwayatkan dari Israil, dari Ziyad ibn Fayyad, dari seorang syekh Madinah bahwa: “Umar ibn Khattab ra. melihat sebuah toko (*dukkan*)



yang baru dibangun oleh seseorang di pasar dan Umar merobohkannya” (Ibnu Saba K Tarikh Al Madinah Al Munawarah, 750).

Pasar dalam perspektif Islam berarti suatu kondisi dimana sistem monopoli telah berakhir. Awalnya pasar terbuka untuk umum, baik yang mempunyai keahlian maupun yang tidak, kemudian pasar berkembang hanya ditujukan bagi yang ahli saja, lalu hanya segelintir orang kemudian menjadi hak milik perorangan. Supermarket merupakan kondisi dimana barang-barang dan aksesnya dikuasai oleh segelintir perusahaan yang menjadikannya simbol ekonomi monopoli. Padahal pasar merupakan ruang terbuka yang tidaks eorang pun memiliki atau mendapatkan perlakuan khusus dari lainnya, sehingga setiap orang adalah memiliki hak yang sama dalam berdagang atau melakukan transaksi jual beli.



Sejak kehadiran pasar uang (dimana secarik kertas hanyalah benda yang tidak bernilai) dan sistem ekonomi

monopoli, fungsi pasar yang merupakan elemen inti dari masyarakat ke masyarakat semakin menghilang. Keberadaan barang dagangan menjadi lebih abstrak (*future trading*/pasar uang), bahkan antar pedagang dan penjual semakin tidak berhubungan sama sekali. Defenisi alat tukar pun juga menjadi abstrak. Fungsi pasar sebenarnya adalah mencoba mengembalikan sebuah transaksi perdagangan dalam bentuk yang nyata, pasar terbuka dengan barang, uang dan pedagang yang nyata.

Pasar merupakan dasar perdagangan dalam Islam, yang merupakan tempat terjadinya perdagangan jual beli barang/jasa. Pasar yang merupakan tempat umumbagi semua kalangan, pasar yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan siapapun berhak menempati pasar tersebut dan menggunakannya sebagai tempat berjualan. Di samping itu juga hal utama dalam perdagangan Islam adalah kebebasan pasar. Sayangnya hal ini telah dirusak oleh ekonom ribawi. Mereka mengotori kebebasan pasar dengan sistem bunga, pasar uang, surat utang, pinjaman berbunga, dan pasar modal, padahal dalam islam riba merupakan pelanggaran dan sumber ketidakadilan yang dilarang oleh Allah swt.

Riba merusak kebebasan pasar, karena faktor utama dalam Islam adalah 'antarodim (saling ridha) sehingga alat transaksi bebas digunakan di pasar. Dalam pasar pun, tidak seorangpun dibebankan membayar sewa dalam bentuk apapun. Semua pengeluaran terkait keamanan, kebersihan dan pemeliharaan pasar dibebankan dengan wakaf. Seperti halnya masjid, tidak seorang pun bisa melarang orang untuk ke pasar, kecuali untuk maksud yang jelas dilarang. Dengan demikian, baik tanah, maupun bangunan pasar berasal dari wakaf dan kepemilikannya berada di tangan masyarakat



untuk kesejahteraan umat.

C. Mengatur dan Mengawasi Pasar

Pada masa khulafah rasyidin, terutama pada masa Umar bin Khattab ra. kekuasaan pasar sangat penting untuk menjamin kebenaran jual beli dari setiap penyimpangan dengan pengawasan, dan mengambil harta di pasar untuk optimalisasi baitu mal berupa penarikan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kekuasaan pasar ini dimaksudkan untuk menjaga hak setiap orang dalam bertransaksi di pasar, begitu juga dengan hak-hak atas baitul mal.

Pengaturan pasar ditujukan untuk mewujudkan kebaikan bagi setiap orang yang bertransaksi di pasar, baik penjual maupun pembeli. Pengaturan pasar ini diharapkan dapat memerangi setiap aktivitas yang menghalangi kebebasan melakukan jual beli di pasar yang merupakan salah satu bentuk penzaliman.

Selain pengaturan pasar, juga penting dilakukan pengawasan pasar dan aturannya (Ath-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk 5/17-18, Ibnul Atsir, Al-Kamil2/374), di antaranya:

1) Bebas masuk dan keluar dari pasar

Umar bin Khattab melarang membatasi setiap tempat di pasar atau menguasai suatu tempat dan melarang seseorang yang tidak mengizinkan orang lain memilih dan menggunakan tempat untuk berjualan di pasar. Selama penjual menggunakan untuk berdagang, maka ia boleh menggunakan tempat tersebut kapan saja, tetapi jika dagangannya telah habis dan selesai menjual, maka tempat tersebut terbuka bagi siapa yang terlebih dahulu datang dan menggunakan tempat tersebut. pasar tetap terbuka dan



bebas bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Kebebasan ini tidak akan terwujud jika terdapat hal yang menghalangi kebebasan tersebut, termasuk bebas mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Umar bin Khattab ra. tidak memperbolehkan seseorang atau kelompok mengakui tempat di pasar menjadi milik pribadi tertentu. Jika itu terjadi, maka ketika beliau melihat tempat yang dibangun oleh seseorang di pasar maka akan dirubuhkannya. (Ath-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk 5/220).

Umar bin Khattab ra. juga melarang seseorang untuk menghalangi pergerakan orang lain seperti mempersempit jalanan. Jika hal itu terjadi maka beliau memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, "Enyahlah dari jalan!". (Al-Fakihi, Akhbar Makkah 3/245-247, Ibnu Hajar, Fathul Bari 3/526-527).

Saat ini, umat muslim tidak memiliki pasar untuk bertransaksi. Para penjual tidak lagi memiliki akses terhadap pasar. Yang terjadi, mereka berjualan di pinggir jalan, dan kadang dikejar atau digusur. Para pedagang tidak lagi memiliki hak. Kebebasan pasar hanya dimiliki pemilik modal semata. Merekalah yang bebas berjualan. Kenyataannya, pasar bebas adalah pasar tertutup berbasis riba dan monopoli. Distribusi barang juga dimonopoli oleh sekelompok pemilik modal. Saat ini toko dan mall semakin menjamur, tetapi itu bukanlah pasar, apalagi pasar bebas.

Islam mengajarkan bahwa pasar adalah tempat sedekah bagi kaum muslimin, karena setiap orang dapat menggunakan tempat yang tersedia di pasar, seperti halnya di masjid bahwa: "siapa yang datang duluan dia yang akan mendapatkan tempat yang diinginkan".



2) Pengawasan cara menawar penjual

Umar bin Khattab ra. dalam pengawasan pasar selalu memperlihatkan kepada pedagang mengenai cara menawarkan barang dagangan agar dagangan laku terjual. Umar bin Khattab ra. memperbolehkan menawarkan barang dagangan dengan cara yang menarik dan dengan persyaratan kemudahan tertentu, asal dibangun di atas kejujuran. Selama dalam ruang kejujuran, para pedagang tidak dilarang untuk memperlihatkan dengan baik dan menghiasinya menjadi menarik bagi pembeli. Namun demikian, tidak boleh melewati batas dalam menawarkan dagangannya.

Umar ra berkata, “Tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya”. (Muhammad Abdul Mun’im Afar & Muhammad bin Said Nahi al-Ghamidi, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, hal. 242)

3) Larangan Menimbun Barang

Menimbunan barang merupakan penghalang terbesar dalam persaingan dalam pasar Islam. Hal ini disebabkan dampaknya pada sejumlah barang yang tersedia ketika terjadi penimbunan. Hal ini kan mempengaruhi harga jual di pasar menjadi meningkat karena ketersediaannya semakin berkurang dan permintaan pada saat yang sama mengalami peningkatan.

Penimbunan barang merupakan perbuatan yang menzalimi manusia. Umar bin Khattab ra. dengan tegas dan keras melarang penimbunan barang di pasar. Beliau berkata: “Janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang!”. (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtishadi*, li Amiril Mu’minin Umar bin Khaththab)



4) Pengaturan perantara jual beli

Jual beli sering kali dimediasi oleh perantara. Perantara terjadi karena banyaknya jenis barang dan jasa yang tersedia, kuantitas barang dalam jumlah yang banyak, luasnya wilayah perdagangan, dan sulitnya hubungan langsung antara penjual dan pembeli.

Namun demikian, perlu pemahaman mendalam terkait perantara perdagangan, karena tanpa pemahaman terutama aturan dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang sebenarnya sehingga terjadi penipuan atau monopoli. Bisa jadi perantara perdagangan justru merusak persaingan, dengan kenaikan harga ketika terjadi ketidakstabilan harga di pasar karena ketersediaan dan permintaan barang tersebut. Umar bin Khattab ra. memerintahkan untuk melaksanakan pesan Rasulullah saw, “Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu”. Umar bin Khattab ra. juga memerintahkan para pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju pasar, agar dia mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga dan mereka bisa sampai ke pasar serta menjual barang dagangannya sesuai kehendaknya. Umar bin Khattab ra. berkata, “Tunjukkan mereka ke pasar, tunjukkan mereka jalan dan beritahu mereka tentang harga”. (Muhammad Abdul Mun'im Afar, al-Iqtishad al-Islami 2/231)

5) Mengawasi Harga

Umar bin Khattab ra. memberi perhatian dalam perkembangan harga dan mengawasinya. “Ketika datang utusan kepadanya, maka beliau bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka” (Shaluhuddin Namiq, An-Nuzhum al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah wa Thatbiqatuha,



hal. 370).

Kenaikan harga dalam Islam dianggap sebagai bencana atau musibah karena perbuatan dosa manusia. Kejadian ini terjadi ketika umat muslim datang kepada Nabi Muhammad saw untuk menetapkan harga. Maka Rasulullah Saw bersabda, “Tetapi aku berdoa...”. (Al-Azhim Abadi, Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud 9/250). “Artinya aku menghadap Allah agar menghilangkan mahalanya harga dan meluaskan rizki”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim harus menyadari perlunya membangun pasar seperti halnya membangun masjid. Seperti halnya masjid, pasar juga tidak diperbolehkan mengambil untung atau beban sewa bagi yang ingin memanfaatkannya. Begitu juga pembiayaannya dalam pemeliharaan, kebersihan dan keamanan juga berasal dari wakaf, zakat, infak dan sedekah seperti halnya masjid.

Selama terdapat sejumlah pedagang yang tinggal di suatu tempat dan sepakat memulai perdagangan, maka secara fitrah perdagangan itu dapat dijalankan, serta menjadi pilihan bagi umat muslim untuk menyingkirkan riba dan menghalalkan jual beli.

Membangun pasar sesuai syariat Islam, terutama dalam etika bisnis akan mendapatkan keberkahan Allah swt sehingga bisnis menjadi besar di pasar tersebut. karenanya, setiap pedagang dihalalkan jual beli dan diharamkan riba, serta pentingnya mustahib dalam pasar. Allah secara jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, seperti halnya sedekah dan mematikan riba. (Abbas Firman, IMN-World Islamic Standard).



D. Perdagangan Menurut Islam (*Trade According to Islam*)

Perniagaan atau jual beli merupakan suatu aktivitas membeli barang dari satu tempat dan waktu serta menjualnya kembali di tempat dan waktu lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Perniagaan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa. Aktivitas perdagangan yang rutin merupakan indikasi tingkat perekonomian bangsa tersebut. dengan kata lain, perniagaan adalah urat nadi perekonomian suatu bangsa. Dengan perniagaan pun, suatu bangsa dapat menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa lainnya. Marwati Djoened mengemukakan bahwa perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan produsen dan konsumen. Dalam kaitannya dengan distribusi, perdagangan menjamin penyebaran, peredaran, dan ketersediaan barang dalam mekanisme pasar.

Perdagangan berasal dari kata 'dagang' yang berarti setiap tindakan perantara antara produsen dan konsumen (dalam arti ekonomi). Hukum dagang di Indonesia didasarkan pada KUHD yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848, dengan alat tukar yang digunakan adalah uang.

Perdagangan pada fungsinya memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memindahkan/mengantar barang dagangan dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang membutuhkan (minus)
2. Membawa/memindahkan barang dagangan dari produsen ke konsumen
3. Menyimpan dan menimbun barang dagangan dengan jumlah yang banyak berpotensi mengalami kekurangan dalam persediaan di pasar.



1) Perdagangan dalam Islam

Dalam Islam, aktivitas perdagangan, atau perniagaan (jual beli) dihalalkan. Tentu saja dengan tuntutan tata cara dan aturan main berdasarkan prinsip syariat dalam rangka memperoleh berkah dan ridha Allah swt, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara bahasa, perdagangan atau jual beli, mengandung arti saling menukar. Terdapat dua kata yang digunakan tetapi berbeda makna yaitu *Al-Bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain) dan *asy-Syira'* artinya beli.

Secara terminologi, *al-Bai'* mengandung beberapa pengertian berdasarkan para ahli fikih, yaitu:

1) al-Qurthubi

Sebutan untuk aktivitas tukar menukar barang yang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan disebut dengan *at-Tijarah*

2) Ibn Qodamah

Perdagangan adalah "Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan menyerahkan milik"

3) Imam Nawawi

Perdagangan adalah "Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan"

4) Madzhab Hanafiyah

Perniagaan adalah "Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-Bai'*, seperti melalui



ijab dan Ta'athi (saling menyerahkan)."

Allah swt berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dengan demikian, perdagangan adalah salah satu aktivitas dan profesi yang dihalalkan oleh Allah swt dengan persyaratan setiap kegiatannya harus berlandaskan prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur riba.

Aktivitas perdagangan dihalalkan dalam Islam dan setiap muslim dituntut menggunakan tata cara khusus dan aturan main yang mengatur aktivitas seorang muslim dalam perdagangan agar memperoleh keridhaan dan keberkahan Allah swt. di dunia dan di akhirat kelak.

2) Etika perdagangan Islam

Perdagangan dalam Islam, juga mengatur berbagai etika yang wajib dilakukan oleh para pedagang dalam transaksi perdagangannya. Pemahaman terhadap etika perdagangan ini, menjadikan usaha perdagangan para pedagang muslim semakin berkembang karena melekat keberkahan Allah swt. etika perdagangan ini menjamin baik

penjual maupun pembeli saling memperoleh keuntungan. Etika perdagangan Islam antara lain:

a) Jujur (Shidiq)

Kejujuran adalah hal yang mutlak dalam transaksi perdagangan. Jujur dalam arti luas mencakup tidak berbohong, tidak menipu, bukan hoaks, tidak berkhianat, tidak ingkar janji dan lainnya. Ketidakjujuran seseorang dalam berdagang samadengan melakukan perbuatan dosa dan akan memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarganya secara negatif sehingga memengaruhinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Keharusan bersikap jujur dalam perdagangan, sangat jelas diterangkan dalam al-Quran sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-An'am/6:152,

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ... ﴿١٥٢﴾

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".

Dalam QS Asy-Syu'ara/26:181-183,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan."

Dalam QS Al-Isra/17:35,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam QS Ar-Rahman/55:9,

وَأَقِيمُوا الزَّوْزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Penjelasan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya Allah swt menganjurkan kepada setiap umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya agar berlaku jujur, baik dalam menimbang, menakar maupun mengukur barang dagangan. Kecurangan dalam perdagangan, meskipun penyimpangan ini tidak menyebabkan kerugian dan kerusakan dibanding dengan tindak kejahatan lainnya seperti perampokan, perampasan, korupsi dan lainnya, namun nyatanya, penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah swt.

Selain itu, tindakan penyimpangan atau kecurangan dalam perdagangan dianggap sebagai tindakan yang sangat keji dan culas, karena berlindung dibalik hukum dagang yang dilegalkan oleh pemerintah dan oleh agama karena jual beli tersebut seolah-olah berdasarkan prinsip suka sama suka. Tindak kejahatan ini jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil dan dilakukan

dengan terang-terangan.

Meskipun tindakan kejahatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun tidak ada perbedaan mereka dengan penjahat. Sehingga Allah swt dan rasul-Nya Muhammad saw mengharamkan perbuatan tersebut dan wajar jika para pelaku tindak kejahatan ini akan mendapatkan azab dan siksa yang pedih di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Muthaffiin/83:1-6,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam ini.”

Orang yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan dalam menakar, menimbang dan mengukur barang dagangan mereka, Selain akan mendapatkan azab dan siksa di akhirat kelak, al-Quran juga telah menjelaskan dengan tegas tentang kisah orang-orang Madyan yang terpaksa harus menerima siksa dunia dari Allah swt, lantaran menolak peringatan dari Nabi mereka Syuaib as, sebagaimana terekam dalam QS Al-A'raf/7:85,

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

Begitu pula dalam QS Hud/11:94,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثَمِينَ ﴿٩٤﴾

"Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dia dengan Rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggalnya."

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa tindakan kejahatan atas kecurangan yang dilakukan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, tidak akan memberikan keuntungan sama sekali dan kebahagiaan bagi para pelakunya, justru menimbulkan murka Allah swt, yang bukan hanya azab dan siksa di akhirat kelak, tetapi juga



hukuman di dunia akan dirasakan juga.

Nabi Muhammad saw seringkali mengingatkan para pedagang dalam beberapa hadisnya, untuk berlaku jujur dalam berdagang. Rasulullah saw bersabda: *"Wahai para pedagang, hindarilah kebohongan"*. (HR. Thabrani) *"Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang bila berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengada-gada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya dan bila mempunyai hak tidak menyulitkan"*. (HR Hakim, Thabrani dan Ahmad).

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Pedagang dan pembeli keduanya boleh memilih selagi belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terang-terangan, maka jual belinya akan diberkahi. Dan apabila keduanya tidak mau berterus terang serta berbohong, maka jual belinya tidak diberkahi." (HR. Muslim dan Bukhari)

Dalam penegasannya, Rasulullah saw bersabda: *"Pedagang yang jujur serta terpercaya (tempatny) bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati Syahid pada hari kiamat"*. (HR. Bukhari, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan Hakim). *"Pedagang yang jujur tidak terhalang dari pintu-pintu surga"*. (HR. Tirmidzi). *"Pedagang yang jujur di bawah Arsy pada hari kiamat"*. (HR. Al-Ashbihani).

Hadis di atas menegaskan bahwa pedagang yang jujur dalam melaksanakan jual beli, di akhirat kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia dan akan bersama-sama para Nabi dan para Syahid, serta suatu ketika berada di bawah Arsy, dan ketika lain akan berada di suatu tempat



yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga.

Hadis lainnya,

“Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. Apabila berlaku curang, maka Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Dawud)

“Sesama Muslim adalah saudara. Oleh karena itu seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, namun ia tidak menjelaskan cacat tersebut.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majaah)

“Sebaik-baik orang Mukmin itu ialah, mudah cara menjualnya, mudah cara membelinya, mudah cara membayarnya dan mudah cara menagihnya.” (HR. Thabarani).

“Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang dengan tidak menerangkan (cacat) yang ada padanya, dan tidak halal bagi orang yang tahu (cacat) itu, tapi tidak menerangkannya.” (HR. Baihaqie)

b) Bertanggung jawab (Amanah)

Setiap pedagang wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan usahanya atau profesi yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab ini merupakan keinginan dan kemampuan menjaga kepercayaan (amanah) masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya.

Dalam Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Begitu pula berdagang, juga sebagai suatu pekerjaan yang mulia karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan hidup masyarakat.

Tanggung jawab dan kewajiban para pedagang mencakup penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi



kebutuhan manusia dengan harga yang wajar, kuantitas yang cukup, serta manfaat dan kegunaan yang memadai. Dengan demikian, penimbunan barang yang dilakukan pedagang merupakan tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pedagang yang diridhai Allah swt.

Penimbunan barang dagangan dengan sengaja untuk meningkatkan harga jual, juga merupakan kecurangan para pedagang yang tidak amanah untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Islam secara tegas melarang para pedagang melakukan penimbunan barang terutama barang kebutuhan pokok manusia. Perbuatan ini secara langsung akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai hal yang bersifat negatif, seperti harga-harga barang di pasar meningkat tak terkendali, barang-barang tertentu sulit dicari, keseimbangan permintaan dan penawaran terusik, munculnya para spekulan lain yang memanfaatkan peluang dengan mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang lain dan keresahan masyarakat lainnya.

Berbagai bentuk peringatan disampaikan kepada para pedagang yang sering melakukan penimbunan barang dagangannya. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

"Allah tidak akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang lain."
(HR. Bukhari)

"Barangsiapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum Muslimin, Allah akan menyimpannya dengan kerugian atau akan terkena penyakit lepra." (HR. Ahmad)

"Orang yang mendatangkan barang dagangan untuk dijual,

selalu akan memperoleh rejeki, dan orang yang menimbun barang dagangannya akan dilaknat Allah.” (HR. Ibnu Majjah)

“Barangsiapa yang menimbun makanan, maka ia adalah orang yang berdosa.” (HR. Muslim dan Abu Daud)

“Barangsiapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka ia akan lepas dari tanggung jawab Allah dan Allah pun akan cuci tangan dari perbuatannya.” (HR. Ahmad)

c) Menghindari penipuan

Terdapat hadis yang menyatakan bahwa: “seburuk-buruk tempat adalah pasar”. Hadis ini mengisyaratkan bahwa pasar adalah tempat orang melakukan jual beli yang transaksinya mengandung penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan perilaku lainnya.

Rasulullah saw bersabda:

“Sebaik-baik tempat adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar”. (HR. Thabrani). “Siapa saja menipu, maka ia tidak termasuk golonganku”. (HR. Bukhari)

Setiap sumpah yang keluar dan mulut manusia harus dengan menyebut nama Allah swt. selanjutnya diikuti dengan kejujuran dan kebenaran. Jika tidak, maka dampaknya akan sangat fatal.

Olehnya itu, Nabi Muhammad saw sering memberikan peringatan kepada para pedagang untuk menghindari obral janji atau promosi yang berlebihan dan cenderung mengada-ngada, semata-mata ditujukan agar barang dagangan dapat terjual habis. Peringatan ini disampaikan, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, maka akibatnya kerugian akan menimpa dirinya.

Beliau bersabda:



“Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah, dia harus jujur (benar). Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju). Jika tidak rela (tidak setuju), niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” (HR. Aththusi dan Ibnu Majaah).

“Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata, tidak akan melihat, tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. Abu Dzarr berkata, “Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya itu”, dan aku bertanya, “Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya, orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasi kebajikannya), dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim)

“Sumpah dengan maksud melariskan barang dagangan adalah menghapus barokah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sumpah (janji) palsu menjadikan barang dagangan laris, (tetapi) menghapus keberkahan”. (HR. Tirmidzi, Nasal dan Abu Dawud)

“Berhati-hatilah, jangan kamu bersumpah dalam penjualan. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokah (memusnahkan perdagangan).” (HR. Muslim)

Sementara itu, apa yang dialami saat ini, jual beli atau perdagangan terutama di pasar-pasar bebas tidak banyak lagi ditemukan pedagang yang mau memerhatikan etika perdagangan Islam. Bahkan barang yang halal dan haram nyaris setiap orang penjual maupun pembeli tidak mampu lagi membedakannya. Keadaan ini sesungguhnya sudah disinyalir akan terjadi oleh Rasulullah saw, dalam hadisnya yang berbunyi,

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: *“Akan datang*



pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu dan barang yang halal atau haram.”(HR. Bukhari).

Selain itu, peringatan kepada para pedagang untuk berbuat jujur dan tidak menipu dalam transaksi jual beli mereka, serta tidak merugikan orang lain, dijelaskan dalam hadis berikut ini.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah seseorang menjual akan suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain.”*(HR. Bukhari).

Dari Ibnu Umar: Bahwa seorang laki-laki menyatakan pada Nabi SAW bahwa ia tertipu ketika berjual beli. Maka Nabi menyatakan: *“Jika engkau berjual beli maka katakanlah: Tidak boleh menipu”*(HR. Bukhari).

d) Menepati Janji

Menepati janji diwajibkan kepada para pedagang bukan hanya untuk kepada pembeli, atau kepada sesama pedagang, tetapi juga seorang pedagang dituntut untuk selalu menepati janjinya dihadapan Allah swt.

Para pedagang umumnya menepati janjinya kepada para pembelinya dengan tepat waktu pada saat pengiriman, menyerahkan barang dagangan sesuai dengan perjanjian awal mengenai kualitas, kuantitas, warna, ukuran dan spesifikasi barang dagangan yang dipesan, memberi layanan purnajual, garansi dan janji-janjia lainnya. sementara janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang di antaranya pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

Para pedagang juga dituntut untuk untuk selalu

menepati janjinya kepada Allah swt. sebagaimana Allah swt berfirman dalam al-Quran surah al-Jumuah ayat 10-11,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada-Nya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pedagang muslim betapapun sibuknya dalam perdagangan atau urusan jual beli, janganlah pernah sekalipun meninggalkan shalatnya. Karena, Allah swt memberi kesempatan seluas-luasnya kepada umatnya untuk mencari dan memperoleh rezeki setelah shalat, yang tercermin dari perintah-Nya yaitu: “bertebaranlah di muka bumi ini dengan mengingat Allah swt sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

e) Kemurahan hati

Nabi Muhammad saw menganjurkan umatnya terutama para pedagang untuk selalu bermurah hati dalam aktivitas perdagangannya. Kemurahan hati ini dapat berupa: ramah tamah terhadap orang lain, sopan santun terhadap orang lain, murah senyum, dan suka mengalah,



serta tetap penuh tanggung jawab.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

“Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah” (HR. Aththahawi). *“Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak.”* (HR. Bukhari).

f) Tidak melupakan akhirat

Jual beli merupakan perdagangan dunia dan menjalankan kewajiban syariat Islam merupakan perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat lebih utama dibanding keuntungan dunia. Hal ini membuat para pedagang muslim sekalipun tidak diperbolehkan menyibukkan diri hanya seemata-mata untuk mencari keuntungan duniawi dengan mengabaikan keuntungan akhirat. Dengan demikian, ketika azan dikumandangkan dan waktu shalat telah datang, maka para pedagang muslim wajib bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah. Begitu juga dengan pelaksanaan kewajiban rukun Islam lainnya, hendaknya para pedagang muslim tidak sekalipun melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan apapun termasuk kesibukan perdagangannya.

Etika perdagangan Islam yang telah dijelaskan di atas, dalam konteks sejarah, memberikan gambaran betapa jayanya para pedagang Muslim jaman dahulu yang terkenal di seluruh penjuru dunia karena setiap tingkah laku mereka selalu memerhatikan etika dalam bisnisnya.

Bisnis atau perdagangan yang diakui dalam Islam, yaitu:

1) Jual beli barang dengan uang tunai (*al-bay*)



- 2) Jual beli barang dengan barang (barter/*muqayadlah*)
- 3) Jual beli uang dengan uang (valuta asing/*sharf*)
- 4) Jual utang dengan barang, dengan jual beli *Salam* (penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian)
- 5) Jual beli *Murabahah* (suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut).

Jual beli dapat didefinisikan sebagai: “Suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa”. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah menjelaskan bahwa: “*Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.*”

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, dan hukum sahnya jual beli terlihat pada cara-cara yang nampak (*dhahir*) berdasarkan kerelaan suka sama suka, seperti pada ucapan penyerahan dan penerimaan barang dagangan. Perdagangan atau jual beli merupakan kategori muamalah dalam Islam yang dihalalkan Allah swt, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Baqarah ayat 275



yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam tafsir Al-Hafizh Ibnu katsir, yaitu: *“Apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala aktivitas perdagangan diperbolehkan selama jual beli tersebut dilarang oleh Allah swt. atau setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat unsur yang dilarang dalam jual beli tersebut.

3) Rukun Jual Beli

Terdapat 3 (tiga) rukun jual beli yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi/penjual dan pembeli (Al-‘Aqid),
2. Adanya transaksi (Al-‘Aqd),
3. Adanya objek transaksi mencakup barang dan uang (Al-Ma’qud ‘Alaihi).

4) Syarat Jual Beli

Baik penjual maupun pembeli (Al-‘Aqid) haruslah seorang yang berakal (tidak gila), merdeka, dan baligh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga). Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah kecuali atas izin dari tuannya, karena ia dan harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: *“Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta,*

maka hartanya itu milik penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan juga membeli apa yang dimiliki oleh budak itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman Allah swt dalam QS An-Nisa/4:6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Ayat di atas ditafsirkan oleh para ulama dengan mengatakan bahwa: “Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya”, dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia baligh. Dalam ayat ini pula, Allah swt melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

Selain itu, baik penjual, maupun pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur terpaksa dari pihak manapun meskipun tidak tersurat. Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Di samping itu, Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.” (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967).

Maka tidak sah jual-beli orang yang dipaksa. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, seseorang boleh dipaksa menjual harta miliknya, karena hutang yang dimiliki tidak mau dibayar, atau melaporkan ke pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus atau memberikan hukuman kepadanya seperti memasukkan ke dalam penjara, atau sanksi lainnya. Rasulullah saw bersabda: *“Orang kaya yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya telah berbuat zhalim. Maka dia berhak diberikan sanksi.”* (HR. Abu Daud)

5) Transaksi/Ijab-Qabul (*Al-‘Aqdu*) dari Penjual dan Pembeli

Penawaran (Ijab) adalah ketika si penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Dan penerimaan (Qabul) ketika si pembeli mengatakan, “saya terima atau saya beli”.

Dalam transaksi ijab qabul, terdapat dua pendapat, yaitu: ***pendapat pertama***, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi’i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli, maka tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafaz ‘saya jual... dan saya beli...’. Pendapat kedua: Tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli. Bahkan imam Nawawi – pemuka ulama dalam mazhab Syafi’i – melemahkan pendapat pertama dan memilih pendapat yang

tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab maliki dan hanbali.” (lihat. Raudhatuthalibin 3/5).

Pendapat kedua, merupakan dalil yang sangat kuat, karena dalam surah an-Nisa mensyaratkan saling ridha dalam transaksi perdagangan dan tidak mensyaratkan pengucapan lafaz ijab-qabul. Perbuatan seseorang yang mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa disebut dengan *qarinah*. Tidak ditemukan riwayat nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab-qabul. Seandainya lafaz tersebut merupakan syarat, maka tentulah hal ini telah diriwayatkan. (lihat. Kifayatul akhyar hal.283, Al Mumti’ 8/106).

Seorang ulama dalam mazhab Syafi’i, yaitu Imam Baijuri berkata:, “mengikuti pendapat yang mengatakan lafaz ijab-qabul tidak wajib sangat baik, agar tidak berdosa orang yang tidak mengucapkannya... malah orang yang mengucapkan lafaz ijab-qabul saat berjual beli akan ditertawakan...” (lihat. Hasyiyah Ibnu Qasim 1/507).

Pembelian barang dengan membayar uang pada mesin, lalu barang yang diinginkan keluar, atau berbelanja di supermarket dan membayar di kasir tanpa lafaz ijab qabul dibolehkan dalam Islam.

6) Objek Transaksi Mencakup Barang dan Uang (Al-Ma’qud ‘Alaihi)

Dalam al-ma’qud ‘laihi, obyek transaksi memiliki persyaratan, yaitu: obyek yang diperjualbelikan terdapat manfaat di dalamnya dan dibenarkan sesuai syariat, serta termasuk bukan najis atau obyek yang diharamkan oleh Allah swt.

Rasulullah saw bersabda: *“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”*. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih).

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang yang mengandung unsur haram seperti minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Mas’ud beliau berkata: *“Sesungguhnya Nabi Saw melarang (makan) harga anjing, bayaran pelacur dan hasil perdukunan”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Contoh lainnya obyek yang haram diperjualbelikan adalah kaset atau video CD, musik dan film porno. Keuntungan hasil menjual barang yang tidak halal sudah barang tentu tidak berkah. Lebih lanjut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *“Akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”* (HR. Bukhari no. 5590).

Obyek yang diperjualbelikan haruslah barang yang dimiliki dan kepemilikannya dari hasil transaksi menjadi sah jika terjadi aktivitas serah terima.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, “dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli



barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab: Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!" (HR. Abu Daud II/305 no.3503).

Di samping itu, tidak boleh hukumnya menjual obyek yang telah dibeli namun belum terjadi serah terima barang. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "aku bertanya kepada rasulullah, jual-beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan? Beliau bersabda, hai keponakanku! Bila engkau membeli barang jangan dijual sebelum terjadi serah terima"(HR. Ahmad).

Obyek yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang diserahkan kepada pembeli. Dengan seendusnya, maka tidak sah transaksi dilakukan ketika barang tersebut tidak ada, atau belum sampai kepada pemiliknya untuk diserahkan, misalnya barang yang dicuri dan belum kembali, burung yang masih ada di udara dan ikan dalam kolam yang belum dipancing/ditangkap. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan Abu Said, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membeli hamba sahaya yang kabur" (HR.Ahmad).

Obyek yang diperdagangkan termasuk harga jualnya harus diketahui oleh pembeli dan penjualnya. Pengetahuan terhadap barang yang diperjualbelikan melalui dengan cara melihat langsung secara fisik, mendengar dari penjual, kecuali bagi obyek yang masih terbungkus dan akan rusak bungkusnya jika obyek tersebut diperlihatkan, seperti telur, kelapa, durian, semangka dan buah lainnya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi buah tersebut rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut

bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Hal ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat. Karena nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan/penipuan). (HR. Muslim).

Sedangkan harga barang dapat diketahui melalui bertanya langsung kepada penjual atau harga yang tertera pada obyek barang, kecuali harga yang sengaja direayasa dan bukan harga sesungguhnya. Hal ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan).

Pada masa modern saat ini, perdagangan adalah suatu aktivitas perantara antara produsen dan konsumen untuk memudahkan melakukan transaksi jual beli. Dalam pandangan ekonomi, transaksi perdagangan terasa lebih mudah dilakukan, seperti pengolahan faktor produksi, mendesain produk, transportasi hasil produksi, promosi dan penjualan, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena munculnya berbagai teknologi baru yang mendukung untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang tersebut. kemunculan teknologi dan berbagai media elektronik turut memberi arti kemajuan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi.

Namun demikian, selain teknologi yang berkembang pesat, globalisasi juga memengaruhi perekonomian Indonesia. Setia negara menjadi lebih mudah dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor). Transaksi



ekspor dilakukan dengan menjual atau mengirim produk atau hasil bumi dari Indonesia keluar negeri, begittu pula sebaliknya, aktivitas impor adalah kegiatan pembelian barang dagangan dari luar negeri untuk mendukung ketersediaan barang untuk dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Transaksi perdagangan dunia ini menyebabkan indonesia berhadapan dengan ekonomi global.

Dengan semakin berlakunya globalisasi di seluruh dunia menyebabkan banyak hal dan transaksi yang tidak murni terjadi dalam perdagangan, seperti halal-haramnya suatu produk/barang tidak lagi menjadi hal yang diutamakan, termasuk fenomena perdagangan yang menerapkan sistem yang bersih. Dampak perdagangan saat ini sudah tidak banyak lagi yang memikirkan hasil akhirnya terkait sistem yang diikuti atau pelanggaran norma-norma bahkan dalam pelanggaran agama.

Usaha dan upaya yang ditingkatkan dalam sistem perdagangan memberikan beberapan landasan akhlak dan sikap seseorang yang bermoral, di antaranya:

- Menanamkan sikap dan etika berdagang sebagai landasan dalam bertransaksi.
- Meningkatkan moral dan akhlak seseorang sebelum transaksi perdagangan di mulai.
- Memiliki sikap kejujuran dan bersih serta memikirkan dampak akibat dari perilaku tersebut

Usaha di atas yang dapat terlaksana mampu membangkitkan Indonesia dan berdiri kokoh di tengah arus globalisasi menuju perbaikan dan kesejahteraan bangsa melalui perdagangan yang sehat dan bersih.

E. Keseimbangan Pasar (*Equilibrium of Market*)

Keseimbangan pasar atau equilibrium of market terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. Keseimbangan terjadi ketika terbentuknya harga keseimbangan, dimana harga yang ditentukan oleh produsen sama halnya yang ditetapkan oleh konsumen, sehingga keduanya tidak menginginkan penambahan atau pengurangan barang yang diproduksi ataupun barang yang dikonsumsi.

Fungsi dari permintaan adalah:

Permintaan (*demand*) = Penawaran (*supply*)

Kondisi ini mengisyaratkan keseimbangan pasar yang terjadi berada dalam jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah sama.

Keseimbangan pasar dalam Islam terdapat berbagai pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya:

a. Abu Yusuf

"Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan melimpah tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tapi murah".

Abu Yusuf menjelaskan bahwa harga barang yang beredar di pasar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor penawaran saja, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan permintaan.

b. Yahya bin Umar

Yahya bin Umar berpendapat bahwa harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Yahya bin Umar menambahkan keseimbangan ekonomi yang terjadi harus tunduk pada kaidah seperti pemerintah yang berhak melakukan intervensi ketika ditemukan penyelewengan dan kecurangan dalam penentuan harga dipasar, termasuk penimbungan barang yang mengakibatkan harga menjadi mahal yang akan meningkatkan inflasi dan berdampak buruk padaperekonomian negara.

c. Al-Ghazali

Al-Ghazali juga mengungkapkan tentang harga. Menurutny: "harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar." Konsep ini kemudian dikenal di kalangan muslim sebagai harga yang adil, atau dalam ranah konvensional konsep ini disebut harga keseimbangan.

d. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memberikan konsep harga yang adil, yang dalam aspek ekonomi disebutnya dengan harga yang setara. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ibnu Taimiyah mengutip tentang harga bahwa: "Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang serupa pada waktu dan tempat khusus."

e. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori yang memperlihatkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Ibnu Khaldun mendefinisikan harga sebagai hasil dari hukum permintaan dan penawaran, kecuali harga emas dan perak karena keduanya merupakan standar moneter.

Beberapa konsep pemikir Islam dan teori ekonomi konvensional yang membahas tentang keseimbangan pasar pada hakikatnya adalah sama karena keduanya terpengaruh dari kekuatan permintaan dan penawaran, namun dalam ekonomi Islam teori keseimbangan pasar juga dipengaruhi oleh faktor lain yang mengandung nilai moral dan syariat.



KONSEP ASURANSI SYARIAH (*CONCEPT OF SHARIA INSURANCE*)

A. Pengertian Asuransi Syariah (*Testing of Sharia Insurance*)

Secara etimologi, kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie* yang merupakan asal kata dari "*assaradeur*" yang bermakna sebagai penanggung dan "*geassureede*" yang bermakna tertanggung. Dalam bahasa Perancis kata "*assurance*" berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedang dalam bahasa Latin kata "*assecurare*" mengandung arti meyakinkan orang. Selain itu,



dalam bahasa Inggris kata “*insurance*” mengandung arti yaitu menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, dan begitu juga *assurance* yang bermakna menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Asuransi merupakan perjanjian antar penanggung dan tertanggung hal mana penanggung menerima premi dari tertanggung. Pihak penanggung dalam asuransi adalah perusahaan asuransi atau reasuransi, dengan tertanggung adalah masyarakat peserta asuransi.

H. Hamzah Ya’cub dalam bukunya tentang *Kode Etik Dagang menurut Islam*, menyebutkan bahwa asuransi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan jaminan (*insurance/assurance*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan bahwa:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihaerapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Selain itu, Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pasal 1 menjelaskan bahwa:

“asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”



Istilah asuransi dalam bahasa Arab, yaitu *at-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan beban dari rasa takut. Jenis asuransi ini disebut *at-ta'min* yang merupakan pemegang polis yang telah merasa aman dan mengikat diri sebagai anggota atau nasabah asuransi. Definisi lain dari *at-ta'min* adalah seseorang menyerahkan dan membayar uang cicilan dengan harapan pihak tertanggung atau pemegang polis atau ahli waris tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang yang disepakati atau sejumlah ganti rugi terhadap harta tertanggung yang hilang.

Dalam Islam, sering digunakan istilah *tafakul* atau asuransi syariah, yang berasal dari kata *kafala* yang mengandung arti menjamin (*kuflan*) atau menanggung (*yakfulu*). Istilah ini terlihat dalam Firman Allah swt dalam al-Quran surah Ali Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa."

Juga dijelaskan dalam surah at-Thaha ayat 40, yang berbunyi:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

وَفَتَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ
يَمُوسَى ﴿١٢﴾

"(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa",

Ayat di atas menjelaskan bahwa Musa a.s. membunuh seorang bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, yang dikisahkan dalam surah Al Qashash ayat 15.

Lebih lanjut, Nabi Musa a.s. datang ke negeri Madyan sebagai pelarian, namun di negeri tersebut, beliau dikawinkan dengan salah seorang puteri Nabi Syu'aib a.s. nya dan menetap selama beberapa tahun. Pada ayat selanjutnya Nabi Musa a.s. mengunjungi lembah Thuwa untuk menerima wahyu dan kerasulan.

Allah swt berfirman dalam surah al-Qashash ayat 12, yang berbunyi:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٣﴾

"dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka

berkatalah saudara Musa: Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"

Tafakul berarti saling menanggung, sedang *yatafakul*, *takafulan*, *kafil* berarti penanggung, penjamin yang terlihat dalam firman Allah swt surah an-Nahl ayat 21, yang berbunyi:

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

"(Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan."

Hukum perjanjian syariah, kata penanggungan (*kafalah*) merupakan suatu perjanjian khusus, yang di dalamnya termasuk perikatan menjamin (*al-Iltizam bi at-Tautsiq*) dalam bentuk suatu perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin). Terdapat tiga macam perikatan yang ditanggung, yaitu *al-kafalah bi ad-dain* (perikatan utang), *al-kafalah bi al-'ain* (perikatan benda) dan *al-kafalah bi an-nafs* (penanggung orang).

Nama lain asuransi adalah *at-tadhamun* yang mengandung makna solidaritas atau saling menanggung hak dan kewajiban. Asuransi merupakan sikap ta'awun sejumlah besar manusia yang diatur dengan sistem yang rapi dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika diantara mereka mengalami peristiwa, maka saling tolong menolong dalam menutupi kerugian yang tertimpa musibah dengan menderma sedikit pemberian. Berdasarkan hal ini, asuransi merupakan ta'awun yang terpuji karena tindakan saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

Asuransi, juga memiliki definisi lain berdasarkan perspektif para ulama, yaitu:

- a. Muhammad Bakhit al-Muth'i, Abdullah al-Qalqili, Sayid sabiq, dan Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa asuransi adalah haram, karena:
 - 1) Terdapat unsur perjudian
 - 2) Adanya unsur ketidakpastian
 - 3) Adanya unsur riba
 - 4) Adanya unsur eksploitasi yang memaksa
 - 5) Merupakan transaksi jual beli (akad sharf) yaitu pertukaran mata uang non tunai.
 - 6) Menggantungkan obyek asuransinya pada hidup dan matinya seseorang yang mendahului takdir
- b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Mustafa Ahmad Zarqa, Abdurrahman Isa, Muh. Yusuf Musa, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa asuransi umumnya adalah halal dan diperbolehkan, karena:
 - 1) Tidak ada ketentuan yang melarang asuransi dalam nas, al-Qur'an maupun sunnah.
 - 2) Terdapat kesepakatan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung dari keuntungan yang diperoleh
 - 3) Terdapat kemaslahatan yang lebih besar dibanding mudharatnya.
 - 4) Akad didasarkan *profit and loss sharing*.
 - 5) Termasuk kategori koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*)
- c. Muhammad Abu Zahro berpendapat bahwa asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur yang dilarang kecuali asuransi

yang sifatnya sosial.

- d. Pendapat lain tentang asuransi adalah termasuk *subhat* karena tidak secara jelas terdapat dalil syariat yang mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Asuransi Syariah merupakan “aktivitas saling melindungi dan tolong menolong antar sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset (*tabarru*) yang pola pengembalian terhadap risiko tertentu disesuaikan dengan akad syariah”.

Dengan demikian asuransi syariah merupakan asuransi yang sumber hukum, kepemilikan, investasi, pengelolaan dana, risikonya (jaminan), akad, dan lainnya didasarkan atas nilai dan prinsip syariah.

Asuransi syariah tampak bersifat saling melindungi dan tolong menolong (*ta’awuf*), yang merupakan prinsip saling tolong menolong dan saling melindungi yang didasarkan ukhuwah islamiyah antara sesama peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko atau malapetaka.

Selain itu, asuransi syariah juga membayar premi atau sejumlah dana yang dibayarkan peserta/nasabah asuransi melalui dana tabungan dan *tabarru’*. Dana tabungan merupakan dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (Life insurance). Dana kas yang terhimpun tersebut mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim manfaat asuransi.

Saat ini, masyarakat cenderung memilih asuransi konvensional yang lebih populer dibanding asuransi syariah. perbedaan mendasar asuransi konvensional dengan asuransi syariah terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekelompok orang yang tolong menolong dan saling membantu, serta saling menjamin dan bekerja sama dengan dengan cara akad <i>tabarru'</i> .
2.	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishod</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial). Asuransi takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional



			perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari hukum Allah sumber hukum dalam Syariah Islam adalah al-Qur'an, sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf "tradisi", dan Maslahah Mursalah.
4.	Maghrib	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan Riba; hal yang di haramkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan Riba
5.	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada, yang berfungsi mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6.	Perikatan/Akad	Akad jual beli di antaranya; <i>akad mu'awadhah</i> , <i>akad idz'aa</i> n, <i>akad gharar</i> , dan	Akad tabarru' dan ijarah yang meliputi <i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan lainnya



		<i>akad mulzim</i>	
7.	Jaminan/Risk (Resiko)	<i>Transfer of risk</i> , melalui transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , melalui proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8.	Pengelolaan Dana	Tidak terdapat pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving - life)	Pada produk-produk saving (<i>life</i>) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk untuk <i>term insurance</i> semuanya bersifat tabarru'
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana



			tersebut.
11.	Keuntungan (profit)	keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reansuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reansuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

Sumber: Data diolah, 2020

B. Asal Muasal Asuransi Syariah (*The Origin of Sharia Insurance*)

Asuransi dalam kajian historis telah ada sejak dahulu. Hal ini tercermin dari nilai dasar konsep asuransi yaitu tolong menolong dan aktivitas tersebut telah ada sejak adanya manusia.

Asuransi sendiri sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi, yang terlihat pada zaman mesir kuno ketika raja Firaun berkuasa, terjadi kekurangan bahan makanan dan banyaknya ancaman yang timbul. Asuransi juga disebut sebagai salah satu peradaban manusia, yang diciptakan untuk mengatasi kesulitan umat manusia, dengan proteksi terhadap rasa tidak aman dalam ketidakpastian yang mengikutinya, sedang kepastian yang sudah diperoleh akan dirinya terasa terlindungi atau terproteksi.



Beberapa literatur mengungkapkan bahwa asuransi ada bersamaan dengan tingkat perkembangan sosial tertentumsesuai kebutuhan manusia akan perlindungan. Tentunya suatu kepastian tingkat keuntungan tertentu membutuhkan adanya perlindungan tertentu bagi jaminan keberlangsungan kegiatan hidupnya.

Sedang dalam literatur Islam, dikenal konsep "*aqilah*" yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur Hukum Islam. Suku Arab, ketika melakukan pembunuhan pra-Islam, maka pembunuh dikenakan diyat yang ditanggung oleh anggota suku yang merupakan kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh inilah yang terkenal disebut "*aqilah*". Kemudian mereka mengumpulkan dana (*al-Kanzu*) untuk menolong keluarga yang terlibat kasus pembunuhan tersebut.

عن ابي هريرة [رض] قال: اقتتل امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و مافي بطنها فاختصموا إلى النبي [ص] فقضى أن دية جنيها غرة أو وليدة قضى دية المرأة على عاقلتها]. رواه البخاري

Selain itu, dalam kasus di atas, perjanjian jaminan (*al-Muwalat*) merupakan perikatan yang menjamin seseorang yang tidak memiliki ahli waris dan tidak diketahui pula ahli warisnya. Maka penjamin menyetujui menanggung pembayaran orang yang melakukan jinayah. Dan ketika orang yang dijamin telah meninggal, maka boleh mewarisi hartanya selama yang bersangkutan tidak memiliki dan ahli waris.

Asuransi syariah salah satu alternatif dalam ekonomi syariah menjadi hal yang mulai diminati oleh masyarakat.

Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi berbasis syariah semakin meningkat karena penghasilan yang diperoleh dari investasi syariah khususnya dalam asuransi syariah merupakan partisipasi dalam pembangunan ekonomi syariah.

Asuransi syariah, saat ini berkembang sangat pesat, bahkan banyak perusahaan asuransi konvensional menciptakan unit atau cabang syariah. Begitu juga banyak terdapat beberapa perusahaan yang mempersiapkan membuka bisnis asuransi syariah.

Perkembangan perusahaan asuransi syariah ini diiringi terbentuknya Asosiasi Asuransi Islam Indonesia (AASI) yang merupakan wadah perkumpulan perusahaan asuransi syariah dan sebagai media komunikasi sesama anggota asosiasi, serta sebagai wadah resmi untuk mewakili asuransi syariah terhadap pihak pemerintah, legislatif dan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Asosiasi Asuransi Islam Indonesia (AASI) ini dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2003 dalam mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah (*Principles of Sharia Insurance*)

Prinsip-prinsip asuransi syariah, mencakup unity (tauhid), keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

a. *Unity* (Tauhid)

Prinsip dasar asuransi syariah terkait tauhid atau kesatuan merupakan setiap bentuk aktivitas dalam asuransi syariah didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Asuransi syariah juga memerhatikan penciptaan suasana dan kondisi



bermuamalah dengan tuntutan nilai-nilai ketuhanan, yang merupakan keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia dan selalu berada di antara kita.

b. *Justice* (Keadilan)

Prinsip dasar asuransi syariah dengan terpenuhinya nilai-nilai keadilan antar pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam konsep asuransi syariah dipahami sebagai usaha dalam menempatkan hak antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Prinsip ini memberikan arahan kepada perusahaan asuransi syariah dan nasabahnya untuk membagi keuntungan yang dihasilkan sesuai akad disepakati sejak awal. Misalnya jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu 60:40, maka kenyataannya pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil tersebut.

c. *Ta'awun* (Tolong menolong)

Prinsip dasar ta'awun dalam asuransi syariah didasarkan pada adanya rasa tolong menolong antar nasabah dan perusahaan asuransi serta para anggotanya. Praktik tolong menolong dalam asuransi syariah merupakan pembentuk dalam setiap transaksi bisnis asuransi syariah.

d. *Cooperation* (Kerja sama)

Prinsip dasar asuransi syariah terkait kerjasama merupakan prinsip universal dalam ekonomi syariah. Kerja sama merupakan dasar dalam setiap transaksi ekonomi termasuk bisnis asuransi syariah. Kerja sama tercermin dalam akad asuransi syariah yang terdiri dari dua pihak yang bekerja sama yaitu nasabah dan pihak asuransi yang



dijadikan acuan aktivitasnya. Umumnya ikatan bisnis syariah menggunakan konsep mudharabah dan syirkah dalam kesepakatan yang tertuang dalam akad. Kedua konsep ini merupakan akad kerja sama bisnis antara pihak pemilik modal dan pengelola modal yang dilandasi al-Quran dan sunnah.

e. *Trustworthy* (Amanah/*al-amanah*)

Prinsip dasar asuransi syariah yang terkait amanah merupakan perwujudan akuntabilitas pihak perusahaan asuransi yang tercermin dari laporan keuangan yang dipublikasikan per periode akuntansi. Penyajian laporan ini seyogyanya dapat diakses terutama oleh nasabah untuk memperlihatkan nilai keadulatan dan kebenaran dalam bermuamalah karena telah diverifikasi oleh audit eksternal atau pihak lainnya.

Prinsip ini juga berlaku bagi nasabah asuransi syariah. nasabah juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang akurat, baik dalam proses mengklaim asuransi atas kerugian yang diderita maupun dalam penyetoran rutin premi asuransi.

f. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Prinsip dasar asuransi syariah terkait al-ridha, penerapannya ditujukan untuk memotivasi seseorang untuk menjadi nasabah asuransi hingga mengikhlaskan sejumlah modalnya untuk membayar secara rutin preminya ke perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai dana *tabarru* (dana sosial). Dana sosial inilah yang akan dimanfaatkan untuk menolong nasabah atau anggota lainnya dalam perusahaan asuransi yang mengalami bencana.

g. Larangan riba

Riba secara etimologi berarti tambahan. Dalam syariat Islam, riba adalah menambah sesuatu yang khusus. Jadi riba merupakan tambahan nilai atau sesuatu yang sifatnya memberatkan. Disebutkan dalam al-Quran tentang riba yang merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dibolehkan dalam transaksi ekonomi syariah. Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli ini merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang mencerminkan unsur sosial saling membutuhkan satu dengan lainnya, begitu pula pada asuransi syariah.

h. Larangan judi (*maisir*)

Allah swt secara tegas mengharamkan segala kegiatan ekonomi termasuk asuransi syariah yang memiliki kandungan maisir. Maisir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi atau memperoleh uang tanpa susah payah. Selain itu, maisir juga berarti *yasar* yang bermakna kaya. Dengan demikian, maisir dikatakan unsur obyek yang merupakan tempat untuk memudahkan sesuatu hal atau sering dikatakan juga sebagai judi, karena memudahkan dalam memperoleh hasil (uang) tanpa susah payah.

Dalam asuransi syariah, unsur maisyir diartikan sebagai salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya mengalami kerugian. Atau seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang untung-untungan untuk mendapatkan hasil (uang) secara mudah.

i. Larangan *gharar*

Gharar secara etimologi berasal dari kata *al-khida'* yaitu suatu aktivitas yang tidak terdapat unsur kerelaan. Dalam hukum syariat diartikan sebagai keraguan, tipuan, atau aktivitas yang sengaja merugikan orang lain. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa salah satu asuransi syariah yaitu dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan dalam akad pertukaran *aqad tabaduli*, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan kerugian yang diderita. Bahwa dalam akad asuransi ini harus jelas baik jumlah, waktu dan obyek yang diasuransikan, meskipun hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang.



PERANAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (*ROLE OF NATIONAL SHARIA BOARDS*)

A. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia/DSN- MUI (*Understanding of the National Sharia Council*)

Saat ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) di Indonesia berkembang dengan pesat. Lembaga ini perlu didukung oleh berbagai pihak guna pemberian pembinaan, pengarahan dan pengawasan yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Selain itu, aspirasi umat Islam terkait masalah ekonomi syariah, keuangan syariah dan



bisnis syariah yang sesuai dengan penerapan ajaran Islam menginisiasi terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional terbentuk dan diawali dengan rekomendasi dari hasil Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yaitu menginginkan suatu lembaga yang menangani masalah-masalah yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1997, dan diikuti dengan terbitnya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 10 Februari 1999.

DSN-MUI memiliki misi untuk “menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan



bangsa”. DSN-MUI merupakan lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia.

Perangkat DSN-MUI terdiri atas para ulama, otoritas, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan fikih muamalah, keuangan, bisnis dan perekonomian syariah, yang ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan MUI untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

1) Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI, mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS dan LPS lainnya;
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multipenafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edarana (*Ta’limat*) kepada LKS, LBS dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabut rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait;

- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Selain itu, dalam AD-ART tersebut, DSN-MUI mempunyai wewenang, yaitu:

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS dan LPS lainnya mengenai usulpenggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah;
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk

menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah.

Kepengurusan DSN-MUI terdiri atas para ulama, praktisi, para pakar dan otoritas dalam bidang-bidang yang terkait dengan fikih muamalah, keuangan, bisnis dan perekonomian syariah, yang perangkat organisasinya adalah Badan Pleno, Badan Pelaksana Harian (BPH), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan perangkat lainnya yang diperlukan.

Badan pleno DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS dan LPS lainnya. Sedang Badan Pelaksana Harian (BPH) merupakan badan yang sehari-sehari melaksanakan tugas DSN-MUI yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh alat kelengkapan yang diatur dalam tata kerja DSN-MUI. Di samping itu, DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS dan LPS lainnya. DPS merupakan pihak terafiliasi dengan LKS, LBS, dan LPS lainnya yang diawasinya.

Implementasi tugas dan wewenang DSN-MUI berkaitan erat dengan legislasi dari fikih ekonomi. Dalam pengembangan keuangan, bisnis dan ekonomi syariah segala keputusan DSN-MUI didasarkan pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan profesionalisme.



2) Mekanisme dan tata kerja DSN-MUI

Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan MUI tentang susunan pengurus terdapat 3 unsur yang menjadi perhatian yaitu:

- DSN-MUI memisahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI;
- DSN-MUI melakukan rapat pleno paling tidak sekali dalam triwulan, atau jika diperlukan;
- Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa LKS, LBS dan LPS lainnya telah atau tidak memenuhi kesesuaian sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

DSN-MUI dalam menjalankan kegiatannya dapat menyelenggarakan rapat-rapat yang termuat dalam Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI yaitu:

- 1) Rapat pleno yang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh DSN-MUI yang menghadirkan seluruh anggota pleno DSN-MUI dan pengurus BPH dalam rangka menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya, dan memutuskan kebijakan strategis DSN-MUI;
- 2) Rapat pimpinan BPH DSN-MUI yang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan BPH DSN-MUI yang membahas dan mengambil keputusan atas persoalan administratif, program kerja, evaluasi kegiatan, dan isu-isu strategis terkait ekonomi dan bisnis syariah;
- 3) Rapat BPH DSN-MUI yang merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPH DSN-MUI ddalam rangka membahas dan mengambil keputusan terkait permohonan, pengajuan tau topik tertentu dalam rangka

implementasi syariah yang berasal dari otoritas LKS, LBS dan LPS lainnya;

- 4) Rapat bidang yang merupakan rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang kerja yang ada di BPH DSN-MUI untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait bidang masing-masing.

Setiap rapat yang diselenggarakan diatur secara rinci ddalam peraturan DSN-MUI dan dikoordinasikan dengan bagian Sekretariat DSN-MUI. Rapat pleno dan rapat pimpinan BPH DSN-MUI diselenggarakan sesuai kebutuhan, dengan persetujuan Ketua atau Sekretaris DSN-MUI yang melibatkan pimpinan. Rapat BPH DSN-MUI diselenggarakan diselenggarakan sekali dalam seminggu yang melibatkan unsur pimpinan, sedang rapat bidang diselenggarakan sesuai dengan keperluan masing-masing bidang kerja.

Setiap keputusan yang diambil dalam rapat didasarkan pada musyawarah dan mufakat dan setiap keputusan tersebut dibuatkan risalah atau catatan rapat/notulen dan/atau berita acara rapat yang ditandatangani pimpinan dan sekretaris rapat.

Dalam mekanisme pengajuan dan penetapan fatwa diatur secara rinci dalam peraturan DSN-MUI, namun dalam pelaksanaannya dilakukan melalui:

- 1) BPH menerima usulan atau pertanyaan aspek syariah mengenai suatu produk dan kegiatan LKS, LBS dan LPS lainnya. Usulan atau pertanyaan tersebut ditujukan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH);
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua BPH;



- 3) Ketua BPH selambat-lambatnya 20 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai keperluan, harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap usulan/pertanyaan tersebut;
- 4) BPH melakukan kajian dan pembahasan atas usulan/pertanyaan tersebut dan disusun dalam bentuk draf fatwa;
- 5) Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN-MUI untuk dibahas dan disahkan menjadi fatwa;
- 6) Fatwa DSN-MUI ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN-MUI.

Mekanisme pemberian pernyataan kesesuaian syariaiah dan keselarasan syariah, yaitu dengan:

- 1) Pihak yang memerlukan pernyataan kesesuaian syariah mengajukan permohonannya kepada BPH DSN-MUI;
- 2) BPH DSN-MUI menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk meneliti/mengkaji dalam rapat BPH DSN-MUI;
- 3) Tim pengkajian difasilitasi BPH DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon: dalam hal dokumen yang dinyatakan tidak lengkap, BPH meminta untuk melengkapi, dan dalam hal dokumen yang lengkap, BPH mengundang pemohon untuk presentasi jika dipandang perlu;
- 4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi misinya bertentangan dengansyariaiah, permohonan dinyatakan ditolak;
- 5) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, dan BPH memutuskan bahwa permohonan dapat diterima, BPH kemudian menerbitkan Surat Pernyataan

Kesesuaian Syariah;

- 6) Petunjuk teknis pernyataan Kesesuaian syariah maupun keselarasan syariah, diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI.

Mekanisme pengajuan dan penetapan sertifikat kesesuaian syariah, dilakukan dengan tahapan:

- 1) Pihak yang memerlukan sertifikat kesesuaian syariah mengajukan permohonannya kepada DSN-MUI;
- 2) DSN-MUI menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menunjuk Tim untuk mengkaji dalam rapat BPH DSN-MUI;
- 3) Tim pengkajian difasilitasi sekretarian DSN-MUI melakukan evaluasi dokumen yang disampaikan pemohon: dalam hal dokumen tidak lengkap diminta untuk dilengkapi, dan dokumen yang lengkap, maka pemohon akan diundang untuk mempresentasikan permohonannya jika dipandang perlu;
- 4) Dalam hal dokumen pemohon dianggap kurang lengkap dan visi misinya bertentangan dengan syariah, permohonan sertifikasi kesesuaian syariah dinyatakan ditolak;
- 5) Dalam hal dokumen permohonan dianggap lengkap dan dalam rapat BPH DSN-MUI diputuskan bahwa permohonan tersebut dapat diterima, BPH DSN-MUI menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah;
- 6) Petunjuk teknis sertifikat kesesuaian syariah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan DSN-MUI;

3) Dasar Hukum DSN-MUI

Ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan penting dalam membangun perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan umat

Islam sesuai cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka mengembangkan ekkonomi syariaah dibutuhkan berbagai sumberdaya dan kelembaggaan yang bertugas menggerakkan, memajukan, mengawasi pelaksanaan maupun penerapan prinsip-prinsip syariah dalamseluruh aspek perekonomian khususnya pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah) dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah) lainnya, maka pada tanggal 10 Februari 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dalam pengembangannya diperlukan dukungan landasan dan pedoman kerja yang lebih opsional dan mengikat.

Adapun dasar hukumnya adalah:

- 1) Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pedoman dasar dan Pedoman Rumah tangga Majelis Ulama Indonesia akte notaris nomor 034, Tanggal 15 April 2014 dan Keputusn Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI Tahun 2015;
- 3) Keputusan Munas IX MUI Nomor Kep-03/Munas-IX/2015 tentang Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2019

DSN-MUI memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Menurut Abdullah Saeed (1996), Karakteristik utama dari metode itu adalah:

- 1) Jika ada suatu teks di dalam Al-Qur'an atau sunnah yang

tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah, Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu.

- 2) Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fikih. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih.

B. Dewan Pengawas Syariah/DPS (*National Sharia Council*)

Dewan Pengas Syariah (DPS) merupakan perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga tersebut.

Berbeda dengan DSN-MUI yang tidak diatur dalam Undang-Undang, DPS diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas. Di samping itu, DPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.

DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas



mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS dan LPS lainnya dan merupakan pihak yang terafiliasi dengan lembaga-lembaga tersebut, serta bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam pelaksanaan tugasnya.

Adapun tugas dan wewenang DPS dalam Anggaran Dasar DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1) Tugas DPS

- Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
- Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
- Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI, dua kali dalam setahun.

2) Wewenang DPS

1. Memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI;
3. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah, dan berhak melaporkannya kepada otoritas setempat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPS



berhak memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja LKS, LBS dan LPS lainnya yang diawasi.

Mekanisme dalam merekomendasikan calon DPS pada LKS, LBS dan LPS lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) LKS, LBS, dan LPS lainnya mengajukan permohonan rekomendasi calon DPS kepada DSN-MUI. permohonan tersebut disertai dengan usulan calon DPS;
- 2) Pengajuan calon DPS oleh LKS, LBS lainnya harus disertai surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dengan ketentuan:
 - a) Surat pengantar bagi calon DPS LKS, LBS dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di Jakarta, harus diperoleh dari MUI Pusat,
 - b) Surat pengantar bagi calon DPS LKS, LBS, dan LPS lainnya yang kantor pusatnya di luar Jakarta, harus diperoleh dari MUI Provinsi,
 - c) Surat pengantar bagi calon DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), harus diperoleh dari MUI Kabupaten/Kota.
- 3) Surat pengantar tersebut diberikan atas dasar hasil penilaian mengenai kepantasan atau kelayakan calon DPS yang diajukan;
- 4) Permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya dibahas dalam rapat pimpinan BPH DSN-MUI, dan menetapkan Tim yang bertugas melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepantasan calon DPS yang diajukan serta memastikan komitmennya untuk mendorong dan mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan syariah, dalam rangka



- memberikan atau tidak memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan;
- 5) Tim yang melakukan *muqabalah* (silaturahmi) dengan calon DPS tersebut melaporkan hasilnya kepada BPH DSN-MUI atau kepada pimpinan BPH DSN-MUI serta memberikan penilaian mengenai layak/pantas atau tidaknya calon DPS yang bersangkutan untuk diberikan rekomendasi;
 - 6) Calon-calon DPS yang diusulkan oleh LKS, LBS, LPS lainnya yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan dan ditetapkan sebagai DPS pada LKS, LBS atau LPS lainnya yang bersangkutan, oleh pimpinan DSN-MUI melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Peraturan terkait ASPM sebagai PS atau tim Ahli Syariah di Pasar Modal Syariah dan petunjuk teknis rekomendasi calon DPS akan diatur dalam peraturan DSN-MUI.

DPS memiliki peran dalam menjamin terpenuhinya prinsip syariah pada setiap aktivitas usaha LKS, LBS dan LPS lainnya dalam mewujudkan *good governance* dalam implementasi kesesuaian/keselarasan syariah. salah satu acuan dalam kepatuhan pada prinsip syariah ini mengacu pada *Accounting an Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang merupakan organisasi internasional Islam berbadan hukum korporasi nirlaba Islam, yang bertugas merumuskan standar dan isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar syariah pada LKS,LBS dan LPS lainnya.

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan negara dalam menjalankan



keuangan Islam di Indonesia dan dijadikan peraturan yang wajib atau pedoman dalam penyusunan standar keuangan syariah. Dengan demikian, DPS selaku lembaga pengawas juga memedomani standar AAOIFI dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah pada LKS, LBS dan LPS lainnya dalam kinerja lembaga tersebut.

AAOIFI mendefinisikan DPS sebagai:

“Dewan Pengawas Syariat/DPS yang merupakan badan independen dari para ahli hukum khusus dalam fiqh al-muamalat (yurisprudensi Islam dalam hal yang berkaitan dengan niaga dan perdagangan). Walaupun demikian, Dewan Pengawas Syariat juga memasukkan anggota selain dari yang ahli dalam fiqh almua’malat, tetapi siapa saja yang ahli di bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pengetahuan tentang pengetahuan tentang fiqh almua’malat. Dewan Pengawas Syariat dipercayakan dengan tugas mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan Aturan dan Prinsip Syaraiat Islam. Fatwa dan keputusan dewan pengawas syariat harus mengikat lembaga keuangan Islam”.

Menurut Abdullah A.A yang dikutip oleh Irawan Febianto, peran penasehat DPS dan sebagai audit harus mencakup:

- 1) Merancang dan menyetujui, dalam kerjasamanya dengan departemen terkait lainnya dan pejabat yang sah, kontrak model dan perjanjian untuk memerintah dan mengatur semua kegiatan bank dan transaksi bisnis;
- 2) Memperbarui dan memperbaiki model yang dikembangkan agar sesuai dengan prinsip, peraturan dan jiwa/semangat syariah;
- 3) Mempelajari dan memutuskan, dari sudut pandang



syariah, isu-isu dan masalah yang diberikan oleh dewan ddireksi atau manajer umum; dan

- 4) Memberikan saran dan petunjuk kepada manajemen bank.

Lebih lanjut, DPS dalam memastikan kesesuaian atau kepatuhan syariah melakukan pemeriksaan dalam kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi-transaksi, memorandum dan anggaran dasar, laporan keuangan, laporan lainnya (khususnya audit internal dan pemeriksaan bank sentral), surat edaran dan lainnya. Selain itu tanggung jawab DPS terlibat dalam perhitungan zakat, identifikasi dan pelepasan pendapatan non kepatuhan syariah, dan memberikan saran tentang distribusi pendapatan atau biaya di antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi lainnya.

Kesesuaian atau kepatuhan syariah tercermin dari laporan syariah yang dipublikasikan dan dapat dibenarkan jika laporan tersebut meyakinkan pihak lain bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan syariat Islam, serta auditor DPS memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang dianggap dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas mereka. Laporan syariah ini dimaksudkan untuk menunjukkan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari perspektif agama.

Pada lembaga keuangan bank, AAOIFI juga menerbitkan standar peninjauan syariah oleh dewan syariah dan peninjauan internal syariah, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan prosedur peninjauan;
- 2) Pelaksanaan prosedur peninjauan dan persiapan dokumen kerja;

3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

Dalam contoh laporan yang diberikan oleh AAOFI, terdapat beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, yaitu:

- 1) Kontrak, transaksi dan kesepakatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam.
- 2) Alokasi keuntungan dan pembayaran kerugian yang berhubungan dengan rekening investasi.
- 3) Pendapatan yang telah dihasilkan dari sumber atau cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 4) Perhitungan zakat.

Aktivitas DPS pada tahapan ini ditujukan untuk menjamin peningkatan dan penguatan kepercayaan para stakeholder dalam operasional bank syariah dalam mewujudkan kesejahteraan para pemangku kepentingan pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Peran DPS dalam perbankan syariah adalah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi proses pengembangan produk baru bank, dan meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.

Peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah yang mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lainnya agar lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan



syariat Islam. Di samping itu, peran DSN-MUI adalah melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS, LBS dan LPS lainnya dengan mengkaji, menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa yang akan dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas transaksi pada industri keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nul Karim
A. M. Saifuddin. 2014. *Studi System Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah
- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 2013. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2014. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana.
- _____. 2015. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amstrong, M. and Baron, A. 2017. *Performance Management – The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Amuaz. 2008. Perbedaan Karakteristik Bank Syariah dan Bank Konvensional, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/06/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional-2/>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema. Insani Press. Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Alfabet.
- Arwani, M. 2009. *Peran Moderator Karakteristik Individu: Pengaruh Kepuasan dan Relationship Marketing terhadap Loyalitas (Studi Empiris pada Nasabah Bank Syariah di Jawa Timur, Disertasi PPs FE UB*.
- Ascarca, 2014. *Akad dan Produk Bank Syri'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Barokah, Robby. 2009. Makalah BASYARNAS, <http://robbybarokah.blogspot.com/2009/06/makalah-basyarnas.html?m=1>
- Bernardin, H.J. and Russel, J.E.A. 2017. *Human Resource Management 2nd Edition – An Experiential Approach*. Singapore: McGraw-Hill.
- Cascio, W. F. 2013. *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits 6th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Cummings, L.L. and Schwab, D.P. 2013. *Performance in*



- Organizations: Determinants and Appraisal.* Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Dahlan Uar, Eka. 2013. Legalisasi Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah dalam Pandangan Fiqh Ekonomi Perbankan. *Tahkim*. Vol. IX No. 1. Pp. 106-121
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI, ADESy. 2016. *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Dian Faizzati, Savvy. 2017. Hukum Islam anatara Individu dan Masyarakat. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. Vol 7 No. 2. Pp13-35.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fatmah, 2007. Pengaruh Persepsi Religius, Kualitas Layanan, dan Inovasi Produk terhadap Kepercayaan dan komitmen serta Loyalitas Nasabah Bank Umum Syariah di Jawa Timur. *Disertasi*. Surabaya: ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Febianto, Irawan. 2011. Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengas Syariah (DPS) pada bank Syariah di Indonesia. *Forum Riset Perbankan Syariah*. Bandung: Bank Indonesia, Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PSEBI) FEB Universitas Padjadjaran, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), & Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).
- Gomes, Faustino Cardoso, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Andi Offset
- Hamoud, Sami. 1985. *Islamic Banking*. London: Arabian Information Ltd.
- Haradjat Zakiah. 2017. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta.
- Haron, Sudin. 1996. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd
- Hetzel, Robert L. 2007. The Contributions of Milton Friedman to Economic. *Economic Quarterly*. Vol. 93 No. 1. Pp. 1-30
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ilham Aji. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia
- Irawan, P., dkk. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA LAN Press.



- Ismail, 2015. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kafh, Monzer. 2015. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarma. 2016. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Rajagafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kastawindiyanti, Desi Emila. 2007. *Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan di PT Bank Syariah Mandiri Malang*. Theses Industrial Management. ITS.
- Khailani. 2014. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- M. A Mannan. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep:-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dewan Pimpinan Majelis Ulama.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Penerbit PT, Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2015. *Fiqh Ekonomi Syari'a*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mars Indonesia. 2008. *Studi Pasar dan Perilaku Nasabah Bank Syariah*, Jakarta: Mars Indonesia
- Marwansyah dan Mukaram. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.
- Metwally, 2015. *Teori dan Model Ekonomi Islam* (diterjemahkan oleh M Husein Sawit). Jakarta: Bangkit Daya Insana
- Mokh. Saiful Bakhri, 2017. *Ekonomi syariah dalam sorotan*, Jakarta: Pemodalan Nasional Madani.
- Mondy, R.W. and Noe, R.M. 2017. *Human Resource Management 4th Edition*. USA: Allyn and Bacon.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2016. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- Murni, Asfia. 2009. *Ekonomika Makro*, Bandung: Refika Aditama
- Nandag L. Hakim. 2017. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung.



- Ganeca Exac.
- Nawawi, H. Hadari, 2017 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Noe, R.A. et al. 2013. *Human Resources Management: Gaining A Competitive Advantage 4th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Pardiansyah, Elif. 2017. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 8 No. 2. Pp. 337-373
- Ponggawa, Hanafiah dan Partner, 2009, Pengumuman atas Ringkasan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah. Jakarta: Media BNI. Terbit 12 Juli 2009
- Purnomo, Syeihul Hadi. 2015. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachdian. 2011. Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional,
<http://databaseartikel.com/ekonomi/perbankan-ekonomi/20118034-perbedaan-antara-bank-syariah-dan-bank-konvensional.html>
- Rachman Fazlur. 2017. *Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Rahman, Afzalur. 2015. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmawaty, Anita. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise
- Rasjid Sulaiman. 2016. *Fiqih Islam*. Bandung: Attahiriyah.
- _____. 2016. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagafindo Persada.
- Rhanu. 2010. Tantangan dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Gunadarma.
- Ridlo, Ali. 2014. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*. Vol 7 No. 1. Pp. 119-137
- Rivai, Harif Amali; Lukviarman, Niki; Syafrizal; Lukman, Syukri; Andrianus, Fery ; Masrizal. Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional: kerjasama antara



- Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR)-Andalas University.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soleh, A. Khudari. 2014. Mencermati Sejarah Perkembangan Filsafat Islam. *Jurnal TSAQAFAH*. Vol.10, No. 1. Pp. 63-84
- Stewart, V. and Stewart, A. 2017. *Practical Performance Appraisal*. England: Gower Press.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2013. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- _____. 2014. *10 Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Supadi Didiek Ahmad. 2014. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardani, Nurul. 2008. Analisis Potensi dan Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kota Medan, *Jurnal Plan: Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 3 (1): 46-54
- Williams, Richard, R. 2014. *Managing Employee Performance: Design and Implementation in Organizations*. London: Thomson Learning.
- Yadiman, 2017. *Etika Bisnis Dinamika Hukum*. Bandung: Lekkaspers
- yadiman_____, 2018. *Studi Kelayakan Bisnis*. Bandung: Mutiarapers
- Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.





Irwan Misbach

Lahir di Sorong pada Tanggal 16 Januari 1973. Anak dari seorang Ayah H. Misbach Asaf dan Ibu Hj. Nur-niati. Menikah pada Tanggal 8 Juni 2003 dengan Sri Effrianti Caya Sita dan telah memiliki putri Anastasia Elvira Andini Misbach (16 Tahun) dan putra Muhammad Radithya Audrio Misbach (15 Tahun). Lulus Sekolah Dasar di Makassar pada tahun 1985, lulus SMP di Sorong pada Tahun 1988, lulus SMA di Sorong pada Tahun 1992, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan lulus Tahun 1999, kemudian melanjutkan ke tingkat Magister program studi manajemen di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, lulus Tahun 2007. Mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Manajemen pada Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, lulus Tahun 2013, serta aktif pada Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI) sejak Tahun 2010, Perkumpulan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia (PAMDI) sejak Tahun 2019, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia sejak Tahun 2018, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis (FORDEBI) sejak Tahun 2017, dan International Society for Development & Sustainability sejak Tahun 2014. Pengalaman bekerja dimulai tahun 1999-2000 di Bank Pembangunan Daerah (sekarang menjadi Bank Sulselbar), tahun 2000-2002 di Forhouse Cooperation Taiwan kerjasama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI dalam program Indonesia Young Entrepreneur Training Program (IYETP). Pada tahun 2005 sampai sekarang sebagai dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Buku yang pernah ditulis adalah “Kualitas Layanan Bank Syariah” Tahun 2012 dan “Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan” Tahun 2013, Pengantar Statistik Sosial Tahun 2014.



Alamat:

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63
Romangpolong, Samata,
Kabupaten Gowa

ISBN 978-602-328-290-6

